

Katalog: 2101038.75



  
Sensus  
Penduduk  
2020  
#Mencatat Indonesia

# Analisis Profil Penduduk Provinsi Gorontalo

Penduduk Gorontalo dalam Perspektif  
Pembangunan



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI GORONTALO**

<https://gorontalo.bps.go.id>



Sensus  
Penduduk  
2020

#Mencatat Indonesia

# Analisis Profil Penduduk Provinsi Gorontalo

Penduduk Gorontalo dalam Perspektif  
Pembangunan



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI GORONTALO



<https://gorontalo.bps.go.id>

## **Analisis Profil Penduduk Provinsi Gorontalo**

**ISBN:** 978-602-6493-49-1

**Katalog:** 2101038.75

**No. Publikasi:** 75000.2215

**Ukuran Buku:** 17,6 cm x 25 cm

**Jumlah Halaman:** viii + 130 halaman

**Naskah:** Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

**Penyunting:** Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

**Gambar Kulit:** Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

**Diterbitkan oleh:** ©Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

## **Tim Penyusun**

### **Pengarah**

Mukhamad Mukhanif

### **Penanggung Jawab**

Adam Sofian

### **Editor**

Adam Sofian

### **Penulis**

Ari Anggrayni Ramadhan

Hendri Cahyo Dwi Safitri

Sri Wandari

Wanda Pribadi

Wd. Rifqah Amalliah Ndangi

### **Pemeriksa Tabel/Grafik**

Amar Sumandari

Arista

### **Desain Cover dan Infografis**

Wd. Rifqah Amalliah Ndangi



# Kata Pengantar

**P**ublikasi Analisis Profil Penduduk Provinsi Gorontalo menyajikan kajian isu kependudukan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) di Provinsi Gorontalo. Publikasi ini menampilkan indikator kependudukan secara ringkas tentang kondisi Gorontalo. Pada edisi ini dibahas kondisi kependudukan secara menyeluruh pada kategori anak, usia produktif, dan lanjut usia (lansia).

Angka-angka yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari hasil SP2020. Selain menggunakan data hasil SP2020, publikasi ini juga menggunakan data dan informasi lain di luar SP2020 yang menerapkan standar akurasi antara lain data Susenas dan Sakernas.

Sumber data diluar SP2020 sebagai pelengkap bersumber dari BPS maupun instansi lain.

Ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Saran dan perbaikan selalu diharapkan untuk penyempurnaan publikasi di masa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Gorontalo, Juni 2022  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Gorontalo



**Mukhamad Mukhanif**





# Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>5</b>
A. Jumlah Penduduk Gorontalo Peringkat ke-32 di Indonesia .....	5
B. Antara Kuantitas dan Kualitas.....	9
C. Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	12
D. Penduduk Gorontalo Terkonsentrasi di Kabupaten Gorontalo.....	18
E. Perubahan Struktur Penduduk dan Implikasinya .....	20
F. Kesimpulan .....	27
<b>2. Profil Anak .....</b>	<b>33</b>
A. Anak dan bonus demografi .....	33
B. Struktur Pendudukan dan Persebaran Anak di Gorontalo.....	36
C. Pendidikan anak .....	42
D. Kesehatan anak .....	50
E. Pekerja Anak.....	61
F. Perkawinan Anak.....	63
G. Kesimpulan .....	65
<b>3. Profil Usia Produktif.....</b>	<b>71</b>
A. Penduduk Usia Produktif: Aktor Dalam Agenda Pembangunan Nasional....	71
B. Tren Usia Produktif Gorontalo .....	72
C. Kualitas Penduduk Usia Produktif Gorontalo .....	75
D. Penduduk Usia Produktif Menjawab Peluang Ketenagakerjaan .....	81
E. Penduduk Usia Produktif Menurut Generasi.....	88
F. Kesimpulan .....	92
<b>4. Profil Penduduk Lanjut Usia.....</b>	<b>97</b>
A. Kualitas Hidup Meningkat, Gorontalo Menuju Ageing Population .....	98
B. Lansia SMART, Tantangan dan Peluang .....	100
C. Sebaran Lansia.....	103
D. Lansia dan Keluarga.....	104
E. Perlindungan Terhadap Lansia.....	111
F. Potensi Lansia di Masa Setelah Bonus Demografi: Penduduk Pralansia .....	116
G. Kesimpulan .....	117
<b>Lampiran .....</b>	<b>121</b>

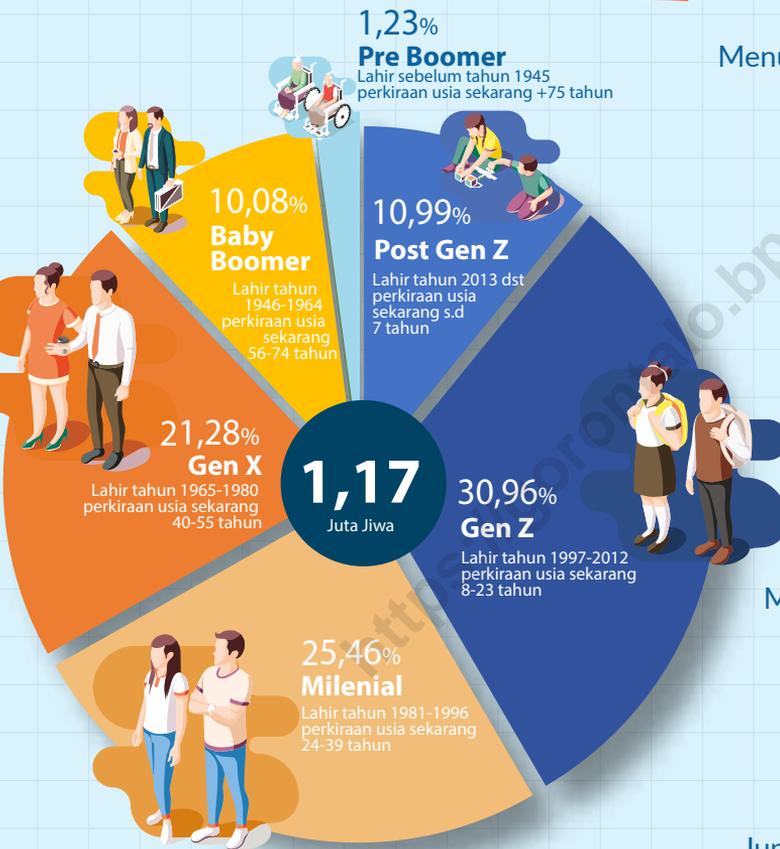


# Jumlah Penduduk Gorontalo Hasil SP 2020

(September 2020)

# 1,17 Juta Jiwa

## Komposisi Penduduk Gorontalo Menurut Generasi



Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, 2010-2020

▼ **1,16%**

Menurun dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 2,26%

Penduduk Usia Produktif 15-64 tahun

**71,26%**

Gorontalo masih dalam masa bonus demografi

Persentase Penduduk Lansia

▲ **7,98%**

Meningkat dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 5,979%

Rasio Jenis Kelamin

**101,90**

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan

## Sebaran Penduduk Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota







# 1

## Pendahuluan

- A. Jumlah Penduduk Gorontalo Peringkat ke-32 di Indonesia
- B. Antara Kuantitas dan Kualitas
- C. Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
- D. Penduduk Gorontalo Terkonsentrasi di Kabupaten Gorontalo
- E. Perubahan Struktur Penduduk dan Implikasinya
- F. Kesimpulan



Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat Penduduk Gorontalo sebanyak 1.171.681 jiwa atau tumbuh sebesar 1,16 persen per tahun (2010-2020).

# Pendahuluan

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan tingkat kepadatan yang relatif rendah. Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2010 tercatat sebanyak 1.171.681 jiwa atau hanya 0,43 persen dari total penduduk Indonesia. Tingkat kepadatan penduduknya hanya 104 jiwa per km<sup>2</sup> yang relatif rendah dari rata-rata kepadatan penduduk Indonesia yang mencapai 141 jiwa per km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo melambat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada periode 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 1,16 persen sedangkan periode sebelumnya (2000-2010) mencapai 2,26 persen per tahun.

Pertumbuhan penduduk menurut Lucas, Donald & Young (1990) dipengaruhi oleh tiga elemen utama yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi. Tingkat fertilitas memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan penduduk atau menambah jumlah penduduk, sedangkan tingkat mortalitas memberikan pengaruh negatif atau pengurang terhadap laju pertumbuhan penduduk. Migrasi penduduk yang telah mencapai pendidikan tersier mungkin akan meninggalkan negara dan menggunakan keterampilan dan kecerdasan mereka untuk membantu pengembangan negara lain yang berdampak terhadap penurunan perekonomian di suatu negara (Stephen, et.al 2003). Dinamika penduduk tersebut dapat memengaruhi pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ketika jumlah penduduk semakin besar maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai sehingga dapat menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya akan menjadi beban bagi suatu negara jika kualitas penduduknya rendah dan menghambat pembangunan.

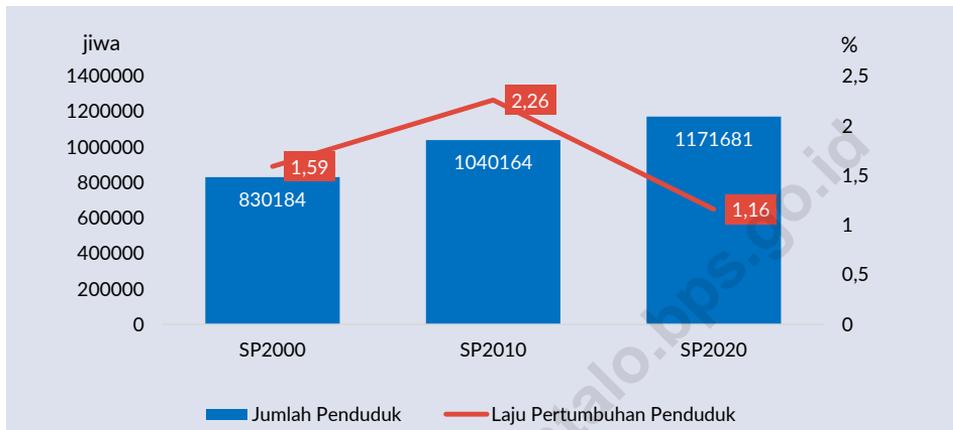
## A. Jumlah Penduduk Gorontalo Peringkat ke-32 di Indonesia

### 1. Tren Penduduk Gorontalo

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat (UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Sensus penduduk dilaksanakan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Bukan hanya di dunia, sensus penduduk juga dilaksanakan di Indonesia.

Pada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 sensus penduduk kembali dilaksanakan. Sensus kali ini merupakan sensus ke-7 setelah Indonesia merdeka. Berbeda dari sensus-sensus sebelumnya, sensus penduduk 2020 menggunakan

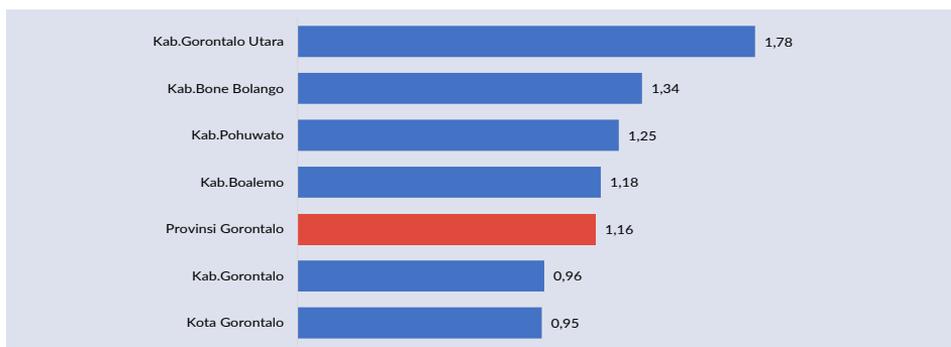
metode kombinasi (*combine methode*) melalui pemanfaatan data administrasi kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Berdasarkan hasil sensus penduduk September 2020, penduduk Gorontalo tercatat sebanyak 1.171.681 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Gorontalo terus meningkat. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah penduduk Gorontalo bertambah sebanyak 131.517 jiwa.



Sumber: Hasil SP2020

**Gambar 1. Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Gorontalo, 2000-2020**

Selama periode 2000-2010, pertumbuhan penduduk Gorontalo selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional. Berbagai usaha penurunan penduduk telah dilakukan pemerintah, salah satunya melalui program Keluarga Berencana (KB). Hal tersebut terlihat dari penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 2,26 persen per tahun pada periode 2000-2010, menjadi 1,16 persen per tahun pada periode 2010-2020. Berdasarkan perkembangan tersebut terlihat bahwa jika sebelumnya Provinsi Gorontalo telah berhasil menurunkan peringkatnya dari posisi daerah dengan laju pertumbuhan ke 15 tertinggi pada tahun 2010 menjadi peringkat ke 27 pada tahun 2020.



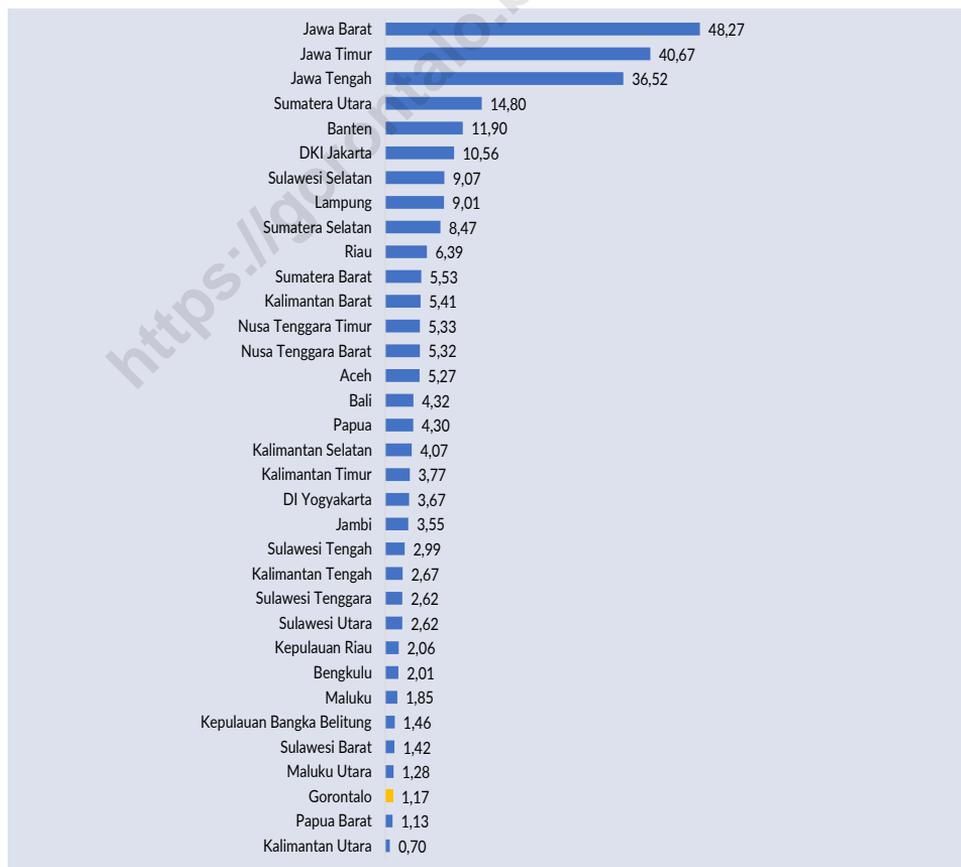
Sumber: Hasil SP2020

**Gambar 2. : Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo, 2010-2020**

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Gorontalo Utara menempati urutan pertama dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi yang mencapai 1,78 persen per tahun. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo secara keseluruhan. Daerah-daerah lainnya yang juga mengalami pertumbuhan pesat (lebih tinggi dari provinsi) secara berturut-turut dari yang tertinggi adalah Kabupaten Bone Bolango, Pohuwato, dan Bolaemo. Sedangkan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo laju pertumbuhannya berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Gorontalo yaitu masing-masing sebesar 0,95 persen dan 0,96 persen per tahun.

## 2. Posisi Gorontalo di Indonesia

Jika dilihat dari persebaran penduduk menurut provinsi, Gorontalo termasuk provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit. Tahun 2020 jumlah penduduk Gorontalo hanya 0,43 persen dari total penduduk Indonesia. Dari sisi jumlah, penduduk provinsi Gorontalo berada pada urutan ke 32 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dengan kata lain Gorontalo berada di posisi tiga terbawah setelah Kalimantan Utara dan Papua Barat. Selain itu, posisi ini tidak menunjukkan perubahan yang berarti sejak Sensus Penduduk tahun 2000.



Sumber: Hasil SP2020

**Gambar 3. Perbandingan Jumlah Penduduk di 34 Provinsi se Indonesia (Juta Jiwa), 2020**

### 3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Secara umum, penduduk laki-laki di Provinsi Gorontalo lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin dari tahun 2000-2020 berkisar antara 101 hingga paling tinggi 102. Nilai ini diartikan setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 101 atau 102 penduduk laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang di Provinsi Gorontalo.

Rasio jenis kelamin setiap kelompok umur lima tahunan dapat dilihat di Tabel 1. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir setiap tahun kelahiran penduduk laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio yang lebih dari 100 pada tahun 2000-2020 di umur 0-4 tahun. Sementara itu, pada tahun 2000-2010 jumlah penduduk laki-laki pada usia 20-24 lebih rendah daripada perempuan. Hal ini dapat diakibatkan oleh penduduk laki-laki yang melakukan migrasi keluar (merantau) untuk bersekolah atau mencari pekerjaan.

Jumlah penduduk lansia juga dapat diketahui polanya melalui tabel tersebut. Penduduk lansia laki-laki pada tahun 2000-2020 lebih rendah daripada perempuan. Rasio pada tahun 2010 bahkan menunjukkan angka 69. Hal ini menandakan usia harapan hidup perempuan lebih tinggi. Harapan hidup laki-laki yang rendah dapat dipengaruhi oleh pola hidup yang tidak sehat dibandingkan perempuan.

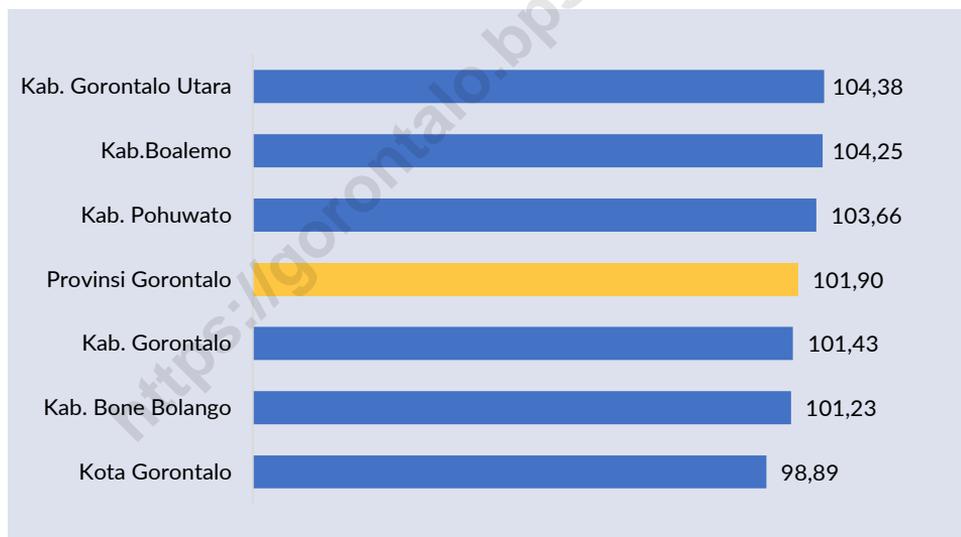
**Tabel 1. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Provinsi Gorontalo, 2000-2020**

Umur	Sex Ratio		
	2000	2010	2020
0-4	105	106	104
5-9	104	105	104
10-14	106	105	105
15-19	102	100	105
20-24	89	99	104
25-29	96	100	104
30-34	98	99	103
35-39	101	103	103
40-44	104	101	102
45-49	104	101	101
50-54	103	98	100
55-59	108	101	98

Umur	Sex Ratio		
	2000	2010	2020
60-64	103	89	96
65-69	98	90	92
70-74	88	75	87
75+	83	69	78

Sumber: SP2000, SP2010, dan SP2020

Rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi yaitu penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, terkecuali Kota Gorontalo. Kabupaten Gorontalo memiliki rasio jenis kelamin tertinggi sebesar 104,38. Sedangkan Kota Gorontalo memiliki rasio jenis kelamin terendah sebesar 98,89.



Sumber: Hasil SP2020

**Gambar 4. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2020**

## B. Antara Kuantitas dan Kualitas

### 1. Indikator Pendudukan dan Sosial Ekonomi

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. Akselerasi pembangunan di segala bidang memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan akan optimal jika pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan produktivitasnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pembangunan di suatu wilayah. Peningkatan jumlah penduduk tentunya akan meningkatkan pelaku pembangunan, sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas output pembangunan. Namun pada kenyataannya jumlah penduduk

yang banyak tidak serta merta menjadikannya keunggulan dalam pembangunan ketika peningkatan kuantitas penduduk tidak diikuti oleh peningkatan kualitas. Bahkan pada kondisi dimana kuantitas penduduk mengalami peningkatan yang tajam tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk justru akan menjadikan penduduk sebagai beban pembangunan. Hal inilah yang mendorong upaya peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk dan indikator pembangunan se-Sulawesi, 2020**

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa) <sup>1</sup>	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>	Sex Ratio (Laki-laki per 100 Perempuan) <sup>1</sup>	Rasio Ketergantungan <sup>1</sup>	TPT (Persen) <sup>2</sup>	PDRB per kapita ADHB* (Ribuan Rupiah) <sup>3</sup>	Peringkat IPM <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sulawesi Utara	2.621.923	189	104,84	45,13	7,37	50.521,13	6
Sulawesi Tengah	2.985.734	48	105,77	47,23	3,77	66.306,27	25
Sulawesi Selatan	9.073.509	194	98,59	45,84	6,31	55.675,79	12
Sulawesi Tenggara	2.624.875	69	102,81	49,84	4,58	49.745,19	17
Gorontalo	1.171.681	104	101,90	44,15	4,28	35.693,17	27
Sulawesi Barat	1.419.229	85	103,02	50,78	3,32	32.809,67	31

Sumber: <sup>1</sup>Hasil SP2020, <sup>2</sup>BPS (2020), <sup>3</sup>BPS (2021)

\*) Angka Sementara

Dari Tabel 2 di atas diketahui bahwa Gorontalo memiliki jumlah penduduk paling sedikit se-Sulawesi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki proporsi luas wilayah yang cukup kecil.

Besarnya usia produktif yang ditandai dengan angka ketergantungan atau *dependency ratio* di bawah 50 merupakan potensi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari tabel tersebut diketahui bahwa Gorontalo memiliki rasio ketergantungan terendah dibanding provinsi lain di pulau Sulawesi. Tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Demikian sebaliknya, angka rasio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Meskipun begitu bonus demografi tidak secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi melainkan tergantung banyak faktor, terutama dari sisi kualitas tenaga kerja (Bloom et al, 2003).

Kualitas tenaga kerja tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi Sulawesi Utara menempati peringkat ke 6 dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai IPM mencapai

72,93 pada tahun 2020. Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi ke 3 se-Sulawesi setelah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Untuk Provinsi Gorontalo dengan nilai IPM tahun 2020 yang mencapai 68,68 memiliki nilai PDRB per kapita sebesar Rp35.693,17 ribu per kapita per tahun.

Maratade dkk (2016) menyatakan bahwa ada hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dan sebaliknya. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan (peningkatan ataupun penurunan) maka hal tersebut akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Namun tidak selalu pembangunan manusia yang tinggi disertai pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, begitupun sebaliknya (Ezkirianto dan Findi A, 2013). Dalam penelitiannya yang menggunakan series data IPM dan PDRB per kapita tahun 2006-2011 menunjukkan bahwa Gorontalo merupakan 1 dari 11 provinsi yang termasuk dalam klasifikasi *vicious* yaitu provinsi yang memiliki kinerja indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita di bawah rata-rata nasional.

## 2. Penduduk Sebagai Objek Pembangunan

Program pembangunan mempunyai tujuan peningkatan taraf hidup penduduk, yaitu untuk meningkatkan kemampuan penduduk menuju kehidupan yang lengkap, produktif, dan memuaskan. Faktor yang dinilai menentukan keberhasilan setiap program pembangunan dan konsekuensi dari pembangunan yaitu penduduk karena penduduk merupakan objek sekaligus subjek pembangunan.

Keterkaitan kependudukan dengan permasalahan pembangunan, terutama pembangunan berkelanjutan adalah karena faktor dinamika kependudukan merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Hal ini kemudian akan ditentukan oleh kualitas penduduk sehingga *urgent* untuk dilakukan penyiapan generasi mendatang. Selain karena pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia, juga dikarenakan pembangunan SDM ini menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional. Pembangunan berwawasan kependudukan pada intinya mengandung arti pembangunan penduduk yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata (Handayani, 2014).

Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan diberbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut. Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian negara khususnya negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan oleh karena banyak negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan. Selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional (Mulyadi S, 2008).

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan *Human Development Report* (HDR). Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia

yang dikemukakan oleh UNDP tersebut bukan hanya menempatkan manusia sebagai input dari pembangunan tetapi juga menjadi tujuan akhir pembangunan, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk produktif sehingga dapat memiliki umur panjang dan hidup sehat, menguasai pengetahuan, dan memenuhi standar hidup yang layak. *Human Development Report* juga memberikan rekomendasi pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali Gorontalo telah memberi dampak yang cukup besar terhadap seluruh indikator makro dan sosial termasuk IPM. Pada tahun 2020, IPM Gorontalo mencapai 68,68 atau tumbuh sebesar 0,28 persen. Pertumbuhan tersebut melambat dibanding tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Sedangkan dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan yang diwakili variabel Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat. Meskipun melambat, Gorontalo masuk dalam sepuluh besar pertumbuhan IPM tertinggi diantara 34 provinsi di Indonesia.



Sumber: BPS (2020)

**Gambar 5. Capaian dan Pertumbuhan IPM Provinsi Gorontalo, 2011-2020**

## C. Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

### 1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, yang menunjukkan rata-rata jumlah penduduk setiap satuan luas (kilometer persegi). Kegunaannya adalah untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah dan sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi.

Provinsi Gorontalo tergolong sebagai provinsi kecil yang tidak terlalu padat penduduknya. Dengan luas wilayah 11.257,07 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Gorontalo sebanyak 104 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020.

Angka ini meningkat dari hasil SP2010 yang mencatat kepadatan penduduk Gorontalo sebanyak 92 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2000 sebanyak 74 jiwa per kilometer persegi.

Kota Gorontalo merupakan wilayah terpadat dengan luas sebesar 79,59 kilometer persegi, kepadatannya mencapai 2.495 jiwa per kilometer persegi. Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi menyediakan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, hiburan yang memberikan daya tarik tersendiri bagi penduduk di provinsi Gorontalo. Padatnya penduduk Kota Gorontalo terkait erat dengan fungsi sentral Kota Gorontalo disamping sebagai ibukota provinsi (pusat pemerintahan), juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat kesehatan, dan pendidikan.

Wilayah terpadat kedua di Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Gorontalo dengan kepadatan penduduk mencapai 225 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020. Wilayah Kabupaten Gorontalo berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo, selain itu di wilayah ini juga merupakan daerah lintasan jalur trans Sulawesi, serta Bandara Djalaludin berada. Sementara, wilayah yang paling jarang penduduknya adalah Kabupaten Pohuwato dengan kepadatan penduduk yang hanya sebesar 35 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten ini berada di ujung barat Provinsi Gorontalo dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli.



Sumber: Hasil SP2020

**Gambar 6. Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/Kota (jiwa/km<sup>2</sup>), 2020**

## 2. Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan

Tujuan kesepuluh *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyatakan bahwa pada tahun 2030 kesenjangan atau ketimpangan di dalam dan antar negara semakin berkurang. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan apabila tidak mampu dieliminir secara hati-hati dapat menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan serta dalam konteks makro sangat merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah (Mopangga, 2011).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, dalam banyak kasus di negara berkembang, tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam

pembangunan (*disparity*). Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Petunjuk awalnya adalah golongan kaya makin kaya sedangkan kaum miskin makin miskin, wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan, sedangkan sektor non unggulan membebani.

Pembangunan wilayah, secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja terampil. Selain itu adanya ketimpangan redistribusi pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah (Mopangga, 2011).

Di sisi lain pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi selama ini juga menimbulkan makin melebarnya ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah. Menurut Lincoln (2010) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan untuk menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan PDRB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.

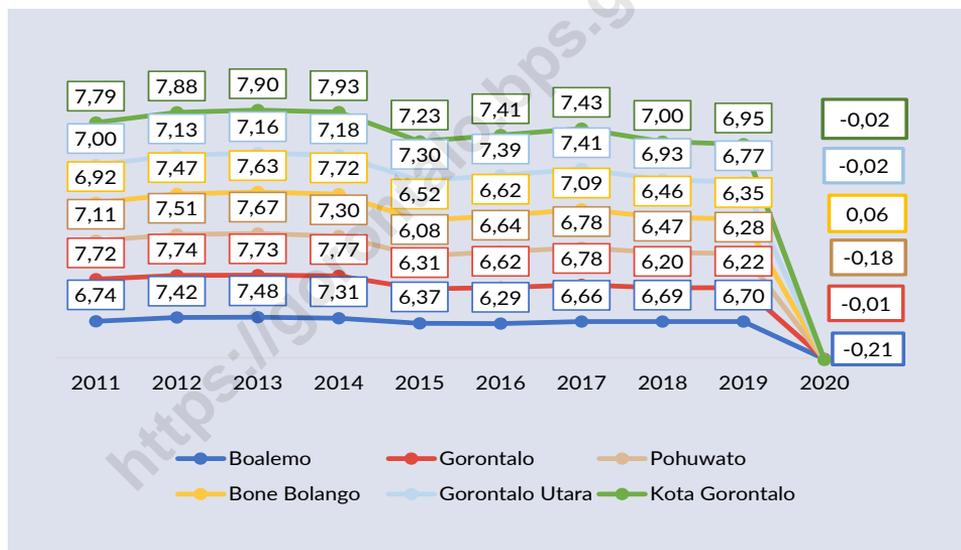


Sumber: BPS (2021)

**Gambar 7. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2011-2020**

Provinsi Gorontalo merupakan bentukan provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia. Dengan keunggulan strategis dari sisi lokasi, membuat perekonomian Gorontalo bergerak cepat dan tumbuh dari tahun ke tahun.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami pertumbuhan positif, ekonomi Gorontalo di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang menurunkan mobilitas perekonomian telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi 2020. Meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi Gorontalo jauh di atas pertumbuhan nasional yang mengalami kontraksi hingga *minus* 2,07 persen. Hal tersebut disebabkan oleh perekonomian Gorontalo masih ditopang oleh lapangan usaha pertanian sehingga pandemi tidak terlalu membawa dampak buruk bagi perekonomian di Gorontalo.



Sumber: BPS (2021)

**Gambar 8. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di provinsi Gorontalo, 2011-2020**

Gambar 8 menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo pada tahun 2011-2019 mengalami pertumbuhan yang positif selama kurun waktu sembilan tahun. Tetapi pada tahun 2020, hampir semua kabupaten/kota mengalami kontraksi kecuali Kabupaten Bone Bolango. Di tengah pandemi Covid-19, ekonomi Bone Bolango tetap tumbuh sebesar 0,06 persen meskipun melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan yang positif. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar diantaranya Pengadaan Listrik dan Gas (17,28 persen), Jasa Keuangan dan Asuransi (11,39 persen), serta Informasi dan Komunikasi (7,27 persen). Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap total PDRB tumbuh sebesar 0,61 persen.

Jika dilihat distribusi penduduk dan kontribusi PDRB menurut wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Gorontalo memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB di Provinsi Gorontalo yang mencapai 31,15 persen. Meskipun distribusi penduduk Kota Gorontalo setengah dari Kabupaten Gorontalo (16,94 persen), tetapi kontribusi PDRB di wilayah tersebut cukup tinggi yang mencapai 20,38 persen.

**Tabel 3. Distribusi Penduduk dan Kontribusi PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2010-2020**

Provinsi	Distribusi Penduduk (%)			Kontribusi PDRB <sup>4</sup> (%)		
	2010 <sup>1</sup>	2015 <sup>2</sup>	2020 <sup>3</sup>	2010	2015	2020
Kab. Boalemo	12,43	13,22	12,45	12,47	13,02	13,11
Kab. Gorontalo	34,22	32,68	33,55	31,15	31,58	31,15
Kab. Pohuwato	12,38	12,97	12,50	16,38	16,06	16,08
Kab. Bone Bolango	13,64	13,51	13,89	11,11	11,03	11,10
Kab. Gorontalo Utara	10,01	9,76	10,66	8,08	7,95	8,19
Kota Gorontalo	17,32	17,85	16,94	20,80	20,35	20,38

Sumber: <sup>1</sup>Hasil SP2010, <sup>2</sup>Hasil Supas 2015, <sup>3</sup>Hasil SP2020, <sup>4</sup>BPS (2020)

Menurut Sjafrizal (2012) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu perbedaan sumber daya alam, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan mobilitas barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Provinsi Gorontalo diikuti dengan meningkatnya tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini. Rasio gini atau *gini ratio* menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Tabel 4 menunjukkan perkembangan *gini ratio* Provinsi Gorontalo tahun 2011-2020.

**Tabel 4. Rasio Gini Provinsi Gorontalo, 2011-2020**

Tahun	Rasio Gini	
	Maret	September
2011	0,459	0,400
2012	0,437	0,413
2013	0,437	0,445
2014	0,412	0,453
2015	0,42	0,401
2016	0,419	0,41
2017	0,43	0,405
2018	0,403	0,417
2019	0,407	0,41
2020	0,408	0,406

Sumber: BPS (2021)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan positif ternyata tidak serta merta akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun (2011-2020), tingkat ketimpangan di Provinsi Gorontalo cenderung berfluktuatif. Nilai *gini ratio* pada tahun 2011 tercatat sebesar 0,459 dan angka ini berfluktuasi hingga Maret 2020 yang menunjuk pada angka 0,408. Pada Maret 2020, *gini ratio* turun jika dibandingkan dengan September 2019 (0,410) dan naik jika dibandingkan dengan Maret 2019 (0,407).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *gini ratio* di daerah perkotaan maupun di perdesaan juga bergerak fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir (2015-2020), *gini ratio* di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan kecuali pada September 2018. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di perkotaan cenderung di atas perdesaan. Pada Maret 2020, *gini ratio* perkotaan mencapai 0,393 atau turun 0,006 poin dibandingkan periode September 2019 (0,399) dan naik tipis 0,001 poin dibandingkan periode Maret sebelumnya (0,392). Pada wilayah perdesaan, nilai *gini ratio* sejak tahun 2015 cenderung meningkat. Pada Maret 2020 *gini ratio* mencapai 0,392 atau naik 0,004 poin dari periode yang sama di tahun sebelumnya (0,388).

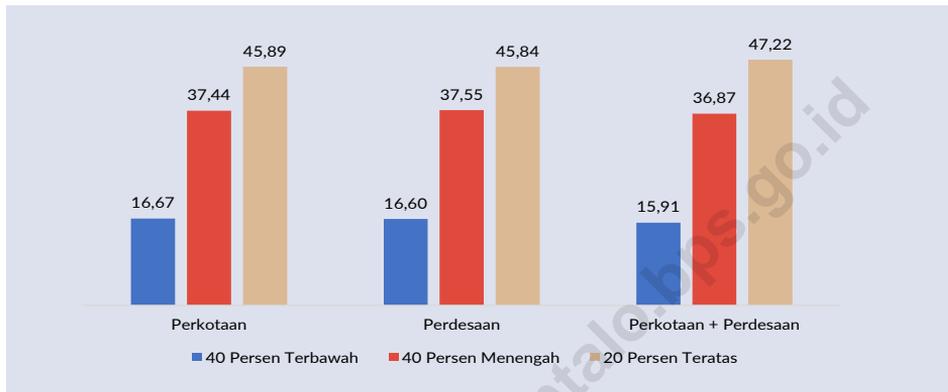
Disamping *gini ratio*, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2020, persentase kelompok penduduk 40 persen terbawah mencapai 16,47 persen dan berada pada ketegori ketimpangan sedang. Persentase ini naik dibandingkan dengan kondisi September 2019 (15,74 persen) dan Maret 2020 (15,91 persen).

**Tabel 5. Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia di Provinsi Gorontalo, 2016-2020**

Tahun	Kelompok Penduduk		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2016	15,30	38,28	46,42
Maret 2017	14,58	37,02	48,40
September 2017	15,27	38,97	45,76
Maret 2018	15,72	38,02	46,25
September 2018	15,35	37,19	47,46
Maret 2019	15,42	38,10	46,49
September 2019	15,74	36,56	47,70
Maret 2020	15,91	36,87	47,22
September 2020	16,47	35,22	48,31

Sumber: Berita Resmi Statistik Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Gorontalo September 2017-2021, BPS

Apabila ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2020 adalah sebesar 16,67 persen (ketimpangan sedang). Angka ini tercatat lebih tinggi dibanding kondisi September 2019 yang sebesar 16,16 persen dan dari kondisi Maret 2019 yang sebesar 16,26 persen. Sementara di daerah perdesaan, persentase kelompok penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2020 adalah sebesar 16,60 persen yang berada pada kategori ketimpangan sedang. Angka ini lebih tinggi dibanding kondisi September 2019 (16,41 persen) dan Maret 2019 (16,22 persen).



Sumber: Berita Resmi Statistik Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Gorontalo Maret 2020

**Gambar 9. Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia di Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Gorontalo, 2020**

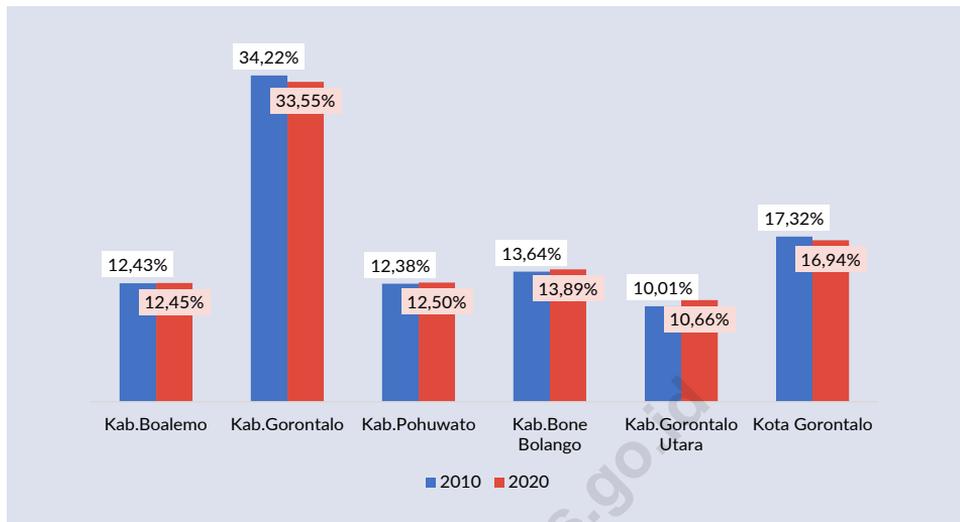
## D. Penduduk Gorontalo Terkonsentrasi di Kabupaten Gorontalo

### 1. Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Selain laju pertumbuhan penduduk, yang juga menjadi fokus dalam pengendalian masalah penduduk salah satunya adalah sebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Perbedaan distribusi penduduk antar wilayah dipengaruhi oleh pola migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Migrasi penduduk cenderung ke wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan. Migrasi ke wilayah pusat pertumbuhan berpotensi menciptakan tekanan permintaan hunian, masalah lingkungan, dan masalah sosial lainnya.

Berdasarkan sebarannya, penduduk Provinsi Gorontalo masih terpusat di Kabupaten Gorontalo. Dari total penduduk pada tahun 2020, 393.107 jiwa atau 33,55 persen diantaranya berada di Kabupaten Gorontalo, diikuti oleh Kota Gorontalo dengan penduduk sebanyak 198.539 jiwa (16,94%) dan Kabupaten Bone Bolango sebanyak 162.778 jiwa (13,89%). Sementara wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Gorontalo Utara hanya sebesar 10,67 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo (124.957 jiwa).

Membandingkan distribusi penduduk tahun 2020 dengan tahun 2010 memperlihatkan bahwa terdapat dua daerah dengan distribusi yang semakin menurun yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Sebaliknya empat daerah lainnya menunjukkan peningkatan distribusi.



Sumber: Hasil SP2010 dan SP2020

**Gambar 10. Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Gorontalo (persen), 2010 dan 2020**

## 2. Sebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Pengamatan pola penyebaran penduduk di suatu daerah digunakan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut sesuai dengan jumlah penduduk yang ada (Rahayu dkk, 2016).

Dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Gorontalo hampir sebanding. Sebagian besar kabupaten di Provinsi Gorontalo didominasi oleh penduduk laki-laki terkecuali Kota Gorontalo. Pada tahun 2020, total penduduk laki-laki di Provinsi Gorontalo sebanyak 591.349 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 580.332 jiwa. Secara umum tidak terdapat selisih jumlah yang signifikan antara penduduk laki-laki dan perempuan.

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin, 2020**

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Boalemo	74.450	71.418	145.868
Kab. Gorontalo	197.952	195.155	393.107
Kab. Pohuwato	74.532	71.900	146.432
Kab. Bone Bolango	81.885	80.893	162.778
Kab. Gorontalo Utara	63.817	61.140	124.957
Kota Gorontalo	98.713	99.826	198.539
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>591.349</b>	<b>580.332</b>	<b>1.171.681</b>

Sumber: Hasil SP2020

### 3. Perkembangan Kontribusi Penduduk di pulau Sulawesi

Pergeseran sebaran penduduk di pulau Sulawesi telah berangsur terjadi. Kontribusi penduduk terbesar di pulau Sulawesi terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi mengalami penurunan dibanding tahun 2000 dan 2010. Provinsi Gorontalo memiliki kontribusi sebesar 5,89 persen dari total penduduk yang berada di pulau Sulawesi.



Sumber: Hasil SP2000, Hasil SP2010, Hasil SP2020

**Gambar 11. Perkembangan Kontribusi Penduduk se-Sulawesi, 2000-2020**

## E. Perubahan Struktur Penduduk dan Implikasinya

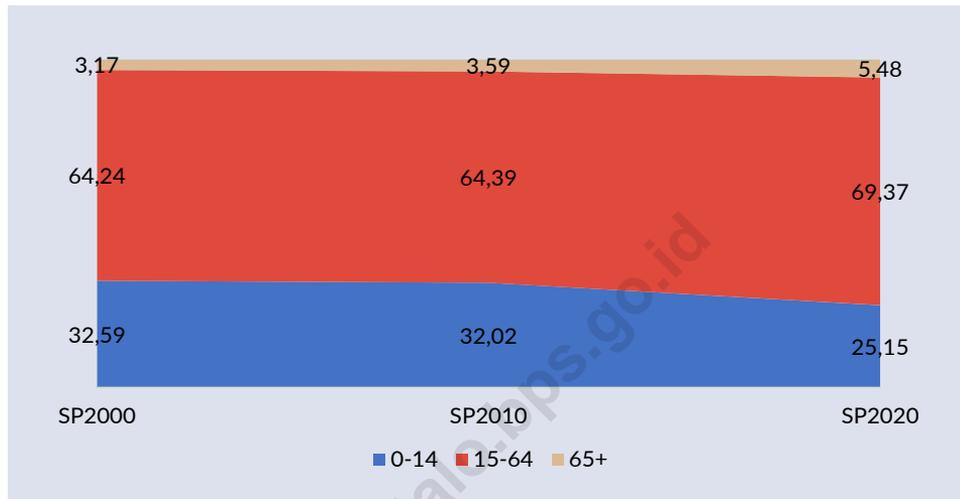
### 1. Komposisi Penduduk

Untuk menggambarkan keadaan penduduk, salah satu karakteristik utama yang umum dianalisis adalah komposisi umur. Komposisi umur penduduk pada kenyataannya sering menggambarkan riwayat fertilitas, mortalitas dan rata-rata umur penduduk. Selain itu juga dapat merefleksikan beban ketergantungan sekelompok umur tertentu terhadap kelompok umur lainnya, dalam hal ini beban ketergantungan usia muda (0-14 tahun) dan beban ketergantungan usia tua (65 tahun ke atas) terhadap usia produktif (15-64 tahun).

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 64,39 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 71,26 persen di tahun 2020. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Dengan struktur penduduk demikian, Gorontalo masih berada pada periode jendela untuk menikmati bonus demografi. Jika dimanfaatkan secara optimal, maka Gorontalo dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memanfaatkan keuntungan tersebut, berbagai penelitian mengenai hubungan perubahan struktur umur demografi dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Hanya saja belum ditemukan satu kesepakatan mengenai kelompok umur mana yang secara signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bloom & Williamson (1998) dalam Kurniawati dan Sugiyanto (2021) menemukan bahwa transisi demografi meningkatkan rasio

penduduk usia kerja dan berkontribusi sebesar 30 persen dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur. Pengaruh positif penduduk usia kerja terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh penemuan Yi & Li (2017) dan Aksoy et al (2017) dalam Kurniawati dan Sugiyanto (2021).



Sumber: Hasil SP2000, SP2010, dan SP2020

### Gambar 12. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2000-2020

Secara teoritis, struktur umur penduduk dapat dikelompokkan atas dua kelompok yaitu:

1. Struktur umur muda, jika penduduk umur dibawah 15 tahun lebih dari 40 persen dan penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 5 persen;
2. Struktur umur tua, jika penduduk umur dibawah 15 tahun kurang dari 40 persen dan penduduk usia 65 tahun ke atas lebih dari 10 persen.

Dalam konteks tersebut dapat dikemukakan bahwa struktur umur penduduk di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 sudah tidak tergolong lagi pada struktur umur muda, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kategori struktur umur tua. Pada tahun 2020, proporsi penduduk umur di bawah 15 tahun di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 25,15 persen atau sudah berada di bawah 40 persen, tetapi proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas masih dibawah 10 persen (5,48 persen). Dengan mengamari perkembangan data selama tahun 2000-2020, terlihat kecenderungan pencapaian struktur umur tua di Provinsi Gorontalo. Selama periode tahun 2000-2020 terlihat kecenderungan semakin berkurangnya proporsi penduduk usia dibawah 15 tahun (0-14 tahun) yang diikuti dengan peningkatan yang pesat dari proporsi penduduk umur 65 tahun ke atas.

Terjadinya transisi struktur umur dari struktur umur muda ke struktur umur tua ini disebabkan transisi fertilitas dan mortalitas yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Penurunan penduduk umur 0-14 tahun ini merupakan dampak program keluarga berencana yang telah berhasil menurunkan angka kelahiran (fertilitas). sebaliknya peningkatan penduduk umur 65 tahun ke atas merupakan dampak dari penurunan

angka kematian (mortalitas) dan peningkatan usia harapan hidup sebagai akibat meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Transisi struktur umur ini menciptakan suatu potensi peningkatan pendidikan, khususnya penduduk muda. Dengan jumlah penduduk muda yang lebih sedikit, perhatian pada mutu pendidikan dapat menjadi lebih baik. Anggaran pemerintah dan masyarakat dapat lebih diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, dan bukan sekedar mengejar sasaran jumlah. Ditambah dengan perubahan pada tingkat keluarga (yang makin menginginkan anak dalam jumlah sedikit tetapi dengan mutu yang lebih tinggi), transisi struktur usia ini akan menyebabkan peningkatan kebutuhan mutu pendidikan yang makin tinggi. Berbagai perubahan ini dapat mendorong terjadinya transisi pendidikan, dari masyarakat berpendidikan rendah ke masyarakat berpendidikan tinggi.

Namun demikian, transisi struktur umur ini juga menyebabkan masalah baru, akibat peningkatan penduduk lanjut usia. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk muda yang telah mengonsumsi tetapi belum memproduksi, pertumbuhan penduduk yang lambat menyebabkan transisi struktur usia ke penduduk yang makin banyak terdiri dari penduduk tua, yang merupakan bagian penduduk yang masih mengonsumsi tetapi tidak memproduksi lagi. Pengeluaran pemerintah akan makin banyak digunakan untuk para lansia ini.

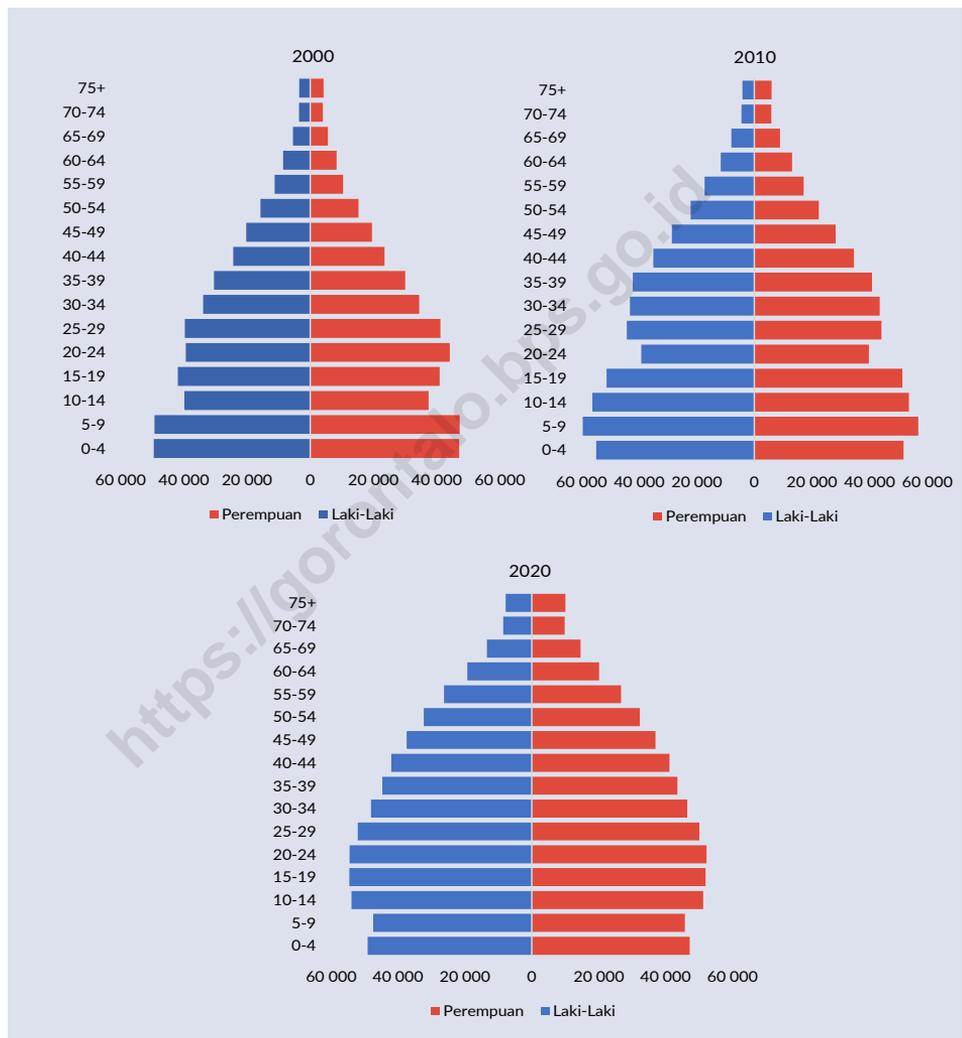
Hal yang perlu diwaspadai dengan kesehatan. Transisi struktur umur/transisi demografi akan diikuti oleh transisi epidemiologi. pola penyakit dominan akan berubah dari penyakit infeksi dan parasit ke penyakit degeneratif, kecelakaan dan penyakit jiwa. ini secara langsung juga membutuhkan perubahan dalam orientasi pelayanan kesehatan.

Gambar 13 memberikan secara terperinci komposisi umur lima tahunan penduduk Provinsi Gorontalo dalam bentuk piramida penduduk. Menurut Plane dan Rogerson 1994 dalam Anggani dan Pitoyo (2017) dari bentuk piramida penduduk menurut umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk suatu daerah dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Ekspansif, jika sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Tipe ini umumnya terdapat pada negara-negara yang mempunyai angka kelahiran dan kematian tinggi. Bentuk piramidanya melebar kebawah dan semakin keatas semakin menyempit;
- b. Konstruktif, jika penduduk yang berada pada kelompok umur muda jumlahnya sedikit, pada umur pertengahan lebih banyak dan semakin sedikit pada umur-umur diatasnya. Tipe ini terdapat pada negara-negara dimana tingkat kelahiran turun dengan cepat, dan tingkat kematian rendah. Bentuk piramidanya menyempit pada bagian bawah, melebar bagian tengah dan kembali menyempit pada bagian-bagian ke atasnya;
- c. Stasioner, jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama banyaknya, kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang mempunyai tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Bentuk piramidanya lebih lurus dan hanya menyempit pada bagian puncaknya.

Pada tahun 2020, bentuk piramida penduduk Provinsi Gorontalo termasuk kategori konstruktif. Jika diamati lebih jauh pada piramida penduduk pada tahun

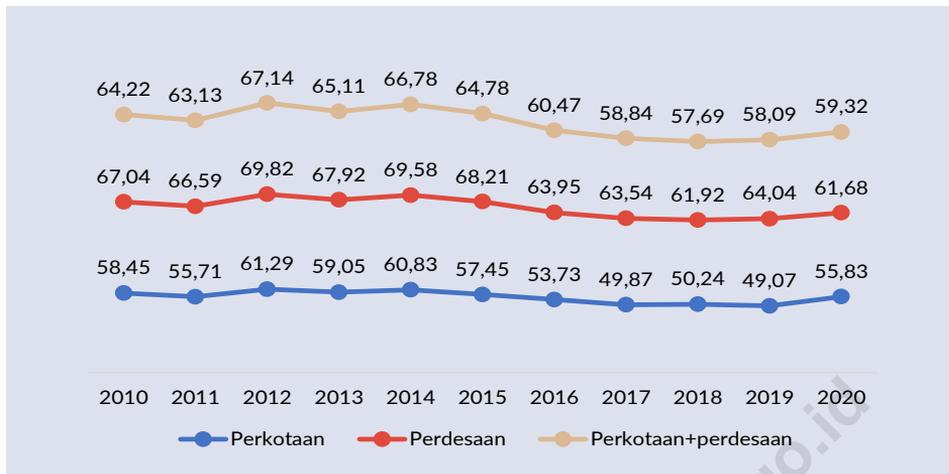
2020, terlihat adanya cekungan pada kelompok umur 0-9 tahun yang menunjukkan proporsi penduduk pada usia-usia tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan penduduk pada usia-usia di atasnya. Pola ini memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan angka kelahiran pada periode 2010-2020. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2016, tetapi kembali meningkat ditahun 2019.



Sumber: Hasil SP2000, SP2010, dan SP2020

### Gambar 13. Perkembangan Piramida Penduduk Gorontalo, 2000-2020

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase tertinggi perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan sedang menggunakan/memakai alat KB terdapat di wilayah perdesaan yang mencapai 61,68 persen di tahun 2020. Sedangkan wilayah perkotaan mencapai 55,83 persen. Menurut Syamsul dkk (2020), rendahnya penggunaan alat KB pada wanita yang tinggal di perkotaan di Provinsi Gorontalo dikarenakan terbatasnya sumber pelayanan, akibat adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan alat/cara KB dengan ketersediaan alat KB.



Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2010-2020

**Gambar 14. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Gorontalo, 2010-2020**

Dari sisi penggunaan alat kontrasepsi, sebagian besar pasangan usia subur (PUS) memakai suntikan (37,32 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar PUS memakai alat/cara KB modern jangka pendek yang sangat tergantung pada ketersediaan dan juga pada kedisiplinan penggunaannya. Pemakai alat kontrasepsi pria (kondom dan sterilisasi pria) amat rendah, yang menunjukkan belum teratasinya masalah adanya bias gender dalam hal pemakaian KB. Namun demikian, terdapat kecenderungan semakin meningkatnya proporsi peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi yang berjangka panjang (IUD, MOW, MOP, Implan) yang ditunjukkan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Persentase Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi yang Digunakan, 2010 dan 2020**

Alat Kontrasepsi	Tahun	
	2010	2020
(1)	(2)	(3)
MOW/Sterilisasi wanita	1,03	3,20
MOP/Sterilisasi pria	0,65	0,50
IUD	5,94	7,49
Suntikan	42,05	37,32
Implan	18,66	23,68
Pil	31,08	20,97
Kondom	0,27	0,10
Lainnya	0,33	6,74

Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat RI, 2010 dan 2020

## 2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun ke atas/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun ke atas dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

**Tabel 8. Rasio Ketergantungan Usia Non Produktif Terhadap Usia Produktif di Provinsi Gorontalo, 2000-2020**

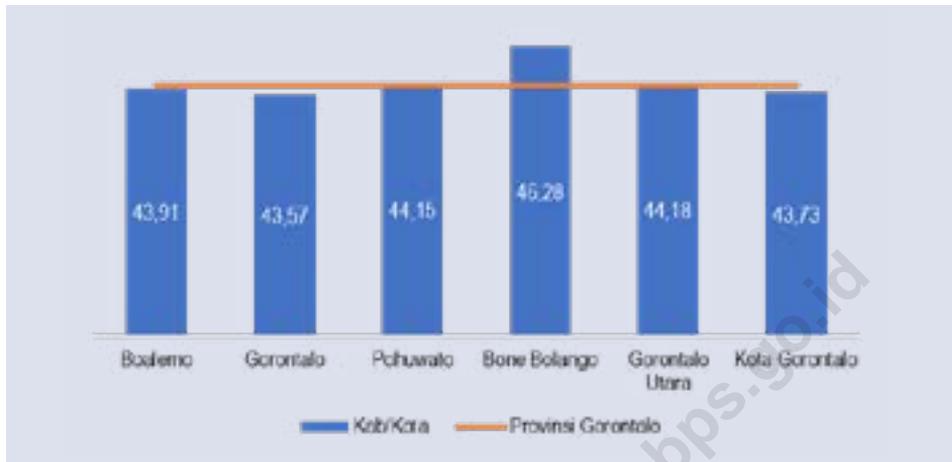
Rasio Ketergantungan	2000 <sup>1</sup>	2010 <sup>2</sup>	2015 <sup>3</sup>	2020 <sup>4</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usia 0-14 tahun	50,72	49,72	38,00	36,25
Usia 65+ tahun	4,94	5,57	6,83	7,90
Usia 0-14 dan 65+ tahun (total)	55,66	55,29	44,84	44,15

Sumber: <sup>1</sup>Hasil SP2000, <sup>2</sup>Hasil SP2010, <sup>3</sup>Supas 2015, dan <sup>4</sup>Hasil SP2020

Rasio ketergantungan di Provinsi Gorontalo selalu menurun dari tahun ke tahun (Tabel 8). Hal ini dikarenakan jumlah penduduk usia produktif terus meningkat dibandingkan penduduk usia non produktif. Pada tahun 2000 rasio ketergantungan Provinsi Gorontalo mencapai 55,66. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo mempunyai beban tanggungan sebanyak 55 sampai 56 jiwa penduduk non produktif. Sementara pada tahun 2020 rasio ketergantungan mencapai 44,15. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo mempunyai beban tanggungan sebanyak 44 sampai 45 jiwa penduduk non produktif. Rasio ketergantungan sebesar 44,15 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 36,25 dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 7,90. Hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan usia muda yang paling berperan dalam mendorong tingginya angka ketergantungan secara total.

Jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, rasio ketergantungan tertinggi terdapat di Kabupaten Bone Bolango yang mencapai 46,28. Artinya setiap 100

orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bone Bolango mempunyai beban tanggungan sebanyak 46 sampai 47 jiwa penduduk non produktif. Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding rasio ketergantungan provinsi.



Sumber: Hasil SP2020

**Gambar 15. Total Rasio Beban Ketergantungan Usia 0-14 tahun dan 65+ Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Gorontalo, 2020**

Suatu wilayah atau daerah yang memiliki rasio ketergantungan dibawah 50 dikatakan mendapat “bonus demografi”. Bonus demografi merupakan kesempatan langka yang dialami suatu negara atau wilayah, karena hanya akan terjadi 1 kali atau 2 kali dalam sejarah perjalanan penduduk. Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh rasio ketergantungan akibat penurunan kematian bayi dan fertlilisasi (kelahiran) jangka panjang. Penurunan proporsi penduduk muda (0-14 tahun) serta besarnya proporsi penduduk produktif (15-64 tahun) mengurangi investasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga biaya ini dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga (Sri M.A, 2004).

Bonus demografi selain dapat menjadi anugerah dapat pula menjadi suatu petaka. Bila bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah, maka tidak akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, masyarakat tidak akan lebih sejahtera, bahkan akan menjadi beban bagi negara.

Pemerintah harus memperhatikan bonus demografi setelah tahun 2035 dimana penduduk usia produktif mulai menginjak usia tua (tidak produktif). Sementara generasi di bawahnya akan memasuki masa produktif yang jumlahnya tidak terlalu banyak dikarenakan angka kelahiran menurun. Angka kelahiran total (TFR) Gorontalo tahun 2017 sebesar 2,5, menurun dibanding tahun 2012 yang mencapai 2,6. Sehingga dampak bonus demografi ke depan akan mengakibatkan porsi usia tidak produktif (terutama lansia) yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi bertambah karena adanya perubahan masa usia produktif sekarang menjadi lansia. Melihat permasalahan ini maka dalam menyongsong kedatangan bonus demografi perlu ada penyiapan sumber daya manusia agar menjadi terdidik dan terampil.

## F. Kesimpulan

- Secara nasional, proporsi penduduk Provinsi Gorontalo relatif sedikit dengan tingkat kepadatan yang rendah. Meskipun demikian, terdapat ketimpangan yang tinggi dari distribusi penduduk antar kabupaten/kota.
- Penduduk Gorontalo mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya melambat. Melambatnya laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat kematian dan kelahiran.
- Struktur umur penduduk di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 sudah tidak tergolong muda lagi pada struktur umur muda, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kategori struktur umur tua. Mengamati perkembangan selama tahun 2000-2020, terlihat kecenderungan pencapaian struktur umur tua dengan semakin berkurangnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan peningkatan yang pesat dari proporsi penduduk umur 65 tahun ke atas.
- Rasio ketergantungan Provinsi Gorontalo tahun 2020 mencapai 44,15. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo mempunyai beban tanggungan sebanyak 44 sampai 45 jiwa penduduk non produktif. Dapat dikatakan bahwa Gorontalo saat ini mendapat “bonus demografi”. Untuk dapat menuai bonus demografi secara optimal, maka berbagai kebijakan perlu diimplemetasikan pada tiga kategori penduduk, yaitu usia anak, usia produktif dan lansia.
- Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan mengalami fase penuaan penduduk (*ageing population*).
- Aspek yang perlu diteliti pada setiap tahapan bervariasi, mulai dari aspek gizi dan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan sosial bagi lansia.
- Perbandingan kondisi anak, usia produktif dan lansia antar kabupaten/kota juga sangat diperlukan.

## Referensi

- Anggani, N.L., dan Pitoyo, A.J. (2017). Analisis Perubahan Struktur Umur Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1971-2010. Available at <https://media.neliti.com/media/publications/228504-none-4109d9ef.pdf> [Diakses pada tanggal 17 Mei 2022].
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2010). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2010. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2011). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2011. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2012). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2013). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2013. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2014). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2014. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2015). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2016). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2017). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020. BPS. Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2021). Available at: Available at <https://bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>. [Diakses pada 17 Mei 2022].
- Bloom, David E, David Canning and Jaypee Sevilla (2003). The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change. Santa Monica, CA : RAND
- BPS Provinsi Gorontalo (2018). Berita Resmi Statistik : Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Gorontalo September 2017. BPS Provinsi Gorontalo. Gorontalo.
- BPS Provinsi Gorontalo (2018). Berita Resmi Statistik : Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Gorontalo Maret 2018. BPS Provinsi Gorontalo. Gorontalo.
- BPS Provinsi Gorontalo (2019). Berita Resmi Statistik : Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Gorontalo Maret 2019. BPS Provinsi Gorontalo. Gorontalo.
- BPS Provinsi Gorontalo (2020). Berita Resmi Statistik : Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Gorontalo Maret 2020. BPS Provinsi Gorontalo. Gorontalo.
- BPS Provinsi Gorontalo (2021). Berita Resmi Statistik : Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Gorontalo September 2020. BPS Provinsi Gorontalo. Gorontalo.
- Ezkinato dan Findi A (2013). Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vo. 2, No. 1 Juli 2013, Ilmu Ekonomi, IPB.
- Handayani, R. (2014). Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Bagi Stakeholder dan Mitra Kerja di Provinsi Banten. Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Available at: <https://eprints.untirta.ac.id/1394/1/04.%20Riny%20Handayani.pdf> [Diakses pada 17 Mei 2022].

- Kuncoro, Mudrajad (2006). *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kurniawati, E. dan Sugiyanto, C (2021). Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 21 No. 1 Januari 2021, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.
- Lincolin, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lucas, D., Mc Donald, P & Young, C. (1990). *Pengantar Kependudukan*. Terjemahan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Maratade, S.Y., Rotinsulu, D.Ch., dan Niode. A.O (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo Sulawesi Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mopangga, H.(2011). Analisis Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Trikonomika*, Vol. 10, No. 1 Juni 2011, Hal 40-51, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
- Mulyadi, S. (2008). *Ekonomi Sumber Day Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Edisi 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rahayu, Y., Muludi, K., dan Hijriani, A. (2016). Pemetaan Penyebaran dan Prediksi Jumlah Penduduk Menggunakan Geometrik di Wilayah Bandar Lampung Berbasis Web-GIS. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, Vol. 2, No.2 Tahun 2016. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Lampung.
- Sjafrizal (2012). *EKonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Stephen, D, et al., (2003) . *The Economic Impact of Migration: A survey*. *Hamburgisches Welt-Wirtschafts- Archiv (HWWA)* .Hamburg Institute of International Economics. ISSN 1616- 4814.
- Syamsul, S., Bakri, B., dan Limonu, H.S. (2020). Penggunaan Alat KB pada Wanita Kawin di Perdesaan dan Perkotaan (Studi Hasil SDKI 2017 Provinsi Gorontalo). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 15, No. 1 Tahun 2020. Universitas Ichsan Gorontalo.
- Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.





# 2

## Profil Anak

- A. Anak dan bonus demografi
- B. Struktur Pendudukan dan Persebaran Anak di Gorontalo
- C. Pendidikan anak
- D. Kesehatan anak
- E. Pekerja Anak
- F. Perkawinan Anak
- G. Kesimpulan



Berdasarkan hasil Sensus Penduduk September 2020, 30,60 persen dari total penduduk Gorontalo merupakan penduduk usia anak (0-17 tahun).

# Profil Anak

**A**nak-anak adalah harapan terbaik untuk masa depan bangsa. Anak merupakan generasi awal yang akan membuat pembangunan itu berjalan. Mempersiapkan anak-anak sejak dini agar terwujud generasi yang baik dan berkualitas menjadi hal yang tak dapat dihindarkan. Di sisi lain, anak merupakan populasi yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal. Kemampuan anak dalam bertahan hidup dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, merencanakan masa depan mereka adalah suatu bentuk investasi, mengingat masa depan tersebut dapat diciptakan sejak dini. Perkembangan anak menjadi sangat krusial, khususnya untuk menghadapi bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal. Potensi yang luar biasa tersebut harus diimbangi dengan upaya-upaya mengatasi kesenjangan investasi pada anak-anak dan generasi muda dengan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta bidang lainnya yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

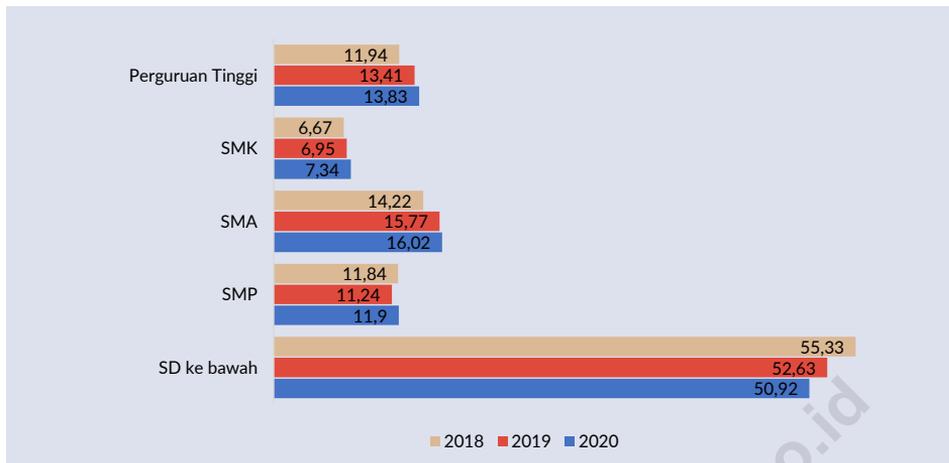
## A. Anak dan bonus demografi

### 1. Bonus Demografi Sebagai Peluang dan Tantangan

Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus disiapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bonus demografi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1990an ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Sementara itu jendela peluang terbesar terjadi pada tahun 2020-2035, dimana *dependency ratio* mencapai titik terendah (Adioetomo dan Pardede, 2020).

Anak saat ini akan menjadi tumpuan di era puncak bonus demografi dan penuaan populasi. Bonus demografi dapat menjadi modal manusia untuk memicu pertumbuhan ekonomi (Adioetomo dan Pardede, 2020). Selain memiliki peluang, bonus demografi juga memiliki tantangan. Tantangan yang ditimbulkan dari kehadiran bonus demografi diantaranya masih tingginya tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke bawah, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan kerja dan masih sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

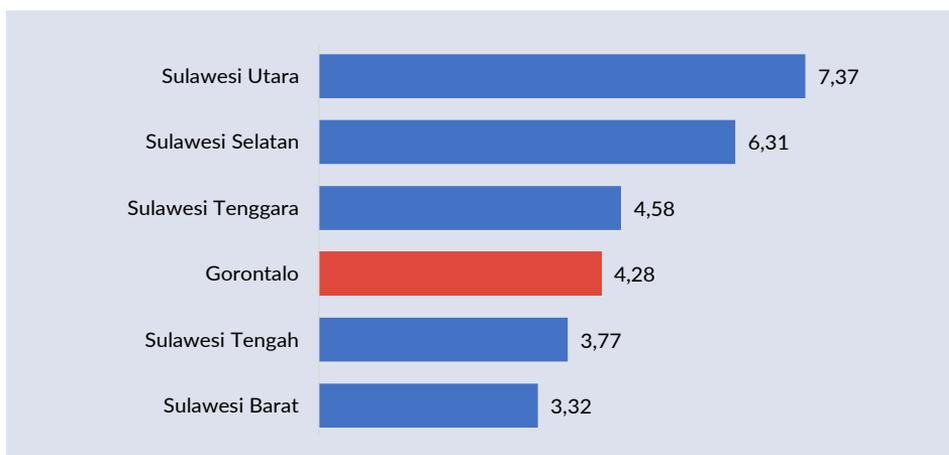
Tantangan serupa bisa terjadi di Gorontalo, dimana penyerapan tenaga kerja di tahun 2020 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebesar 50,92 persen. Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah turun sebesar 1,71 poin. Sementara pada persentase penduduk bekerja berpendidikan lainnya meningkat.



Sumber: Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2020 Provinsi Gorontalo

**Gambar 1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Gorontalo, 2018-2020**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Ditinjau dari tingkat pendidikan, jumlah pengangguran berpendidikan menengah atas ataupun kejuruan masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain, secara persentase sebesar 52,42 persen dari total pengangguran. Kemampuan atau keterampilan yang diperoleh dari kedua jenjang pendidikan tersebut diduga masih belum sesuai atau belum bisa diterapkan langsung dengan permintaan pasar kerja. Disisi lain TPT yang berpendidikan SD ke bawah lebih rendah dibanding jenjang pendidikan lainnya. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja tanpa pilih-pilih.



Sumber: BPS (2020)

**Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sulawesi (Persen), 2020**

Tiga provinsi di Sulawesi dengan angka tingkat pengangguran terbuka terendah antara lain Sulawesi Barat (3,32%), Sulawesi Tengah (3,77%), dan Gorontalo (4,28%).

## 2. Persiapan Setelah Era Bonus Demografi

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020, sebanyak 8,33 persen penduduk lanjut usia Provinsi Gorontalo, terdiri dari 8,93 persen perempuan dan 7,74 persen laki-laki. Kondisi tersebut menjadi tantangan pembangunan dalam sektor peningkatan kualitas manusia. Peningkatan kualitas manusia dilaksanakan melalui pendekatan siklus kehidupan yang diarahkan menuju kemampuan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Hayes, 2014), melalui tabungan keluarga dan investasi.

Upaya peningkatan kualitas manusia sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan, terlepas dari ada atau tidak adanya bonus demografi. Bonus tersebut lebih sekedar peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik, dan dapat diperoleh jika persyaratannya dapat dipenuhi, terutama terkait sumber data manusia yang berkualitas. Meski penduduk usia kerja lebih banyak dari bukan usia kerja, jika tidak produktif maka belum tentu dapat memanfaatkan bonus tersebut (Cicik dan Nugroho, 2021). Penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.



Sumber: BPS Gorontalo (2020)

**Gambar 3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja di Provinsi Gorontalo, 2018-2020**

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja yang masuk kategori bekerja mengalami fluktuasi yaitu sebanyak 569.639 pada taun 2018, lalu pada tahun 2019 meningkat menjadi 572.841. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 568.563 penduduk.

Namun perlu menjadi perhatian bahwa penduduk yang masuk kategori angkatan kerja akan berubah menjadi bukan angkatan kerja. Menyadari pentingnya sistem

pendukung yang menjamin penduduk yang menua, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 40 tahun 2004 untuk memasukkan sistem tunjangan dana pensiun ke sektor formal dan informal. Jika dipersiapkan sejak dini dengan program-program yang bersifat *population responsive*, penuaan penduduk tidak akan menjadi masalah untuk pemerintah, justru akan menjadi peluang yang dapat disebut sebagai bonus demografi kedua. Di masa itu, para penduduk yang menua ini akan dapat produktif lebih lama dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan ekonomi.

## B. Struktur Pendudukan dan Persebaran Anak di Gorontalo

### 1. Jumlah Penduduk Usia Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Dalam UUD 1945 pada pasal 28 B ayat 2 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Definisi anak menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan anak yang digunakan dalam penulisan ini dimulai dari anak yang masih bayi (penduduk berumur di bawah 1 tahun) dan belum berusia 18 tahun (SP2020). Data tentang anak sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan, antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan sanitasi dan hak-hak hidup lainnya.

Jumlah penduduk Gorontalo hasil Sensus Penduduk 2020 adalah sebesar 1.171.681 jiwa. Jika dipilah berdasarkan kelompok umur, terdapat 358.553 jiwa (30,60 persen) penduduk usia anak (0-17 tahun), sementara 813.128 jiwa (69,40 persen) adalah penduduk dewasa.



Sumber: SP2020, BPS

**Gambar 4.** Jumlah dan Persentase Penduduk di Gorontalo Menurut Kelompok Umur, 2020

Jika dibandingkan berdasarkan se-Sulawesi, komposisi penduduk anak di masing-masing provinsi cukup bervariasi. Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa tiga provinsi dengan persentase penduduk anak tertinggi adalah Sulawesi Barat (34,63 persen), menyusul Sulawesi Tenggara (34,22 persen), dan Sulawesi Tengah (32,33 persen). Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk anak terendah adalah Sulawesi Utara (27,88 persen). Angka tersebut bahkan berada dibawah angka nasional yang sebesar 29,50 persen.



Sumber: SP2020, BPS

**Gambar 5. Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Menurut Provinsi se-Sulawesi, 2020**

Berdasarkan jenis kelamin, dari Tabel 1 terlihat secara nasional persentase penduduk anak laki-laki lebih besar dari persentase penduduk anak perempuan yang masing-masing sebesar 51,34 persen dan 48,66 persen. Pola ini sama dengan pola di Provinsi Gorontalo dimana persentase penduduk anak laki-laki (51,08 persen) lebih besar dari persentase penduduk anak perempuan (48,92 persen).

**Tabel 1. Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun di Provinsi Gorontalo dan Nasional, 2020**

Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Jumlah</b>			
Provinsi Gorontalo	183.153	175.400	358.553
Indonesia	40.920.479	38.788.668	79.709.147
<b>Persentase</b>			
Provinsi Gorontalo	51,08	48,92	100
Indonesia	51,34	48,66	100

Sumber: SP2020, BPS

## 2. Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk identitas bagi anak yang merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi sejak kelahirannya, sebagaimana tertulis pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa

identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Kemudian ditegaskan kembali pada pasal yang sama di ayat (2) yang menyebutkan bahwa identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Sasaran SDGs tujuan 16 diantaranya menyebutkan bahwa pada tahun 2030 semua penduduk mempunyai identitas yang sah, termasuk pencatatan kelahiran.

Akta kelahiran dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang. Berbagai macam layanan dan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah akan membutuhkan akta kelahiran sebagai salah satu syarat, seperti misalnya dalam pengurusan kependudukan untuk KTP dan KK, keperluan untuk pendidikan, pembuatan paspor, pendaftaran pernikahan, melamar pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran merupakan langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi.

Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kepemilikan akta kelahiran di Gorontalo sebesar 93,32 persen. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatannya serta pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) harus digaungkan untuk meningkatkan kepemilikan aktra kelahiran.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2020, BPS

**Gambar 6.** Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Gorontalo, 2015-2020

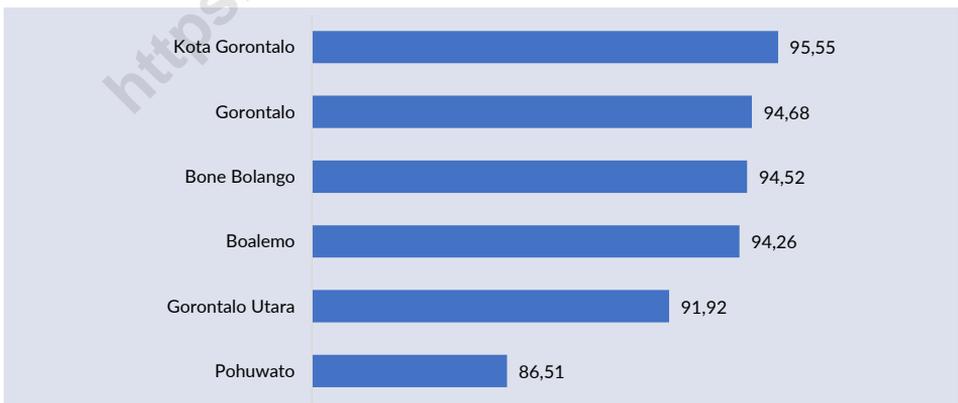
Kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Gorontalo sudah berada di atas angka rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan persentase anak yang memiliki akta kelahiran tertinggi se-Sulawesi diantaranya Gorontalo (93,32 persen), Sulawesi Selatan (91,06 persen), dan Sulawesi Utara (91,00 persen). Hanya saja masih terdapat provinsi di Sulawesi dengan capaian terendah bahkan berada di bawah rata-rata angka nasional yaitu Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 83,37 persen.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020, BPS

**Gambar 7. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-17 Tahun menurut Provinsi se-Sulawesi dan Nasional , 2020**

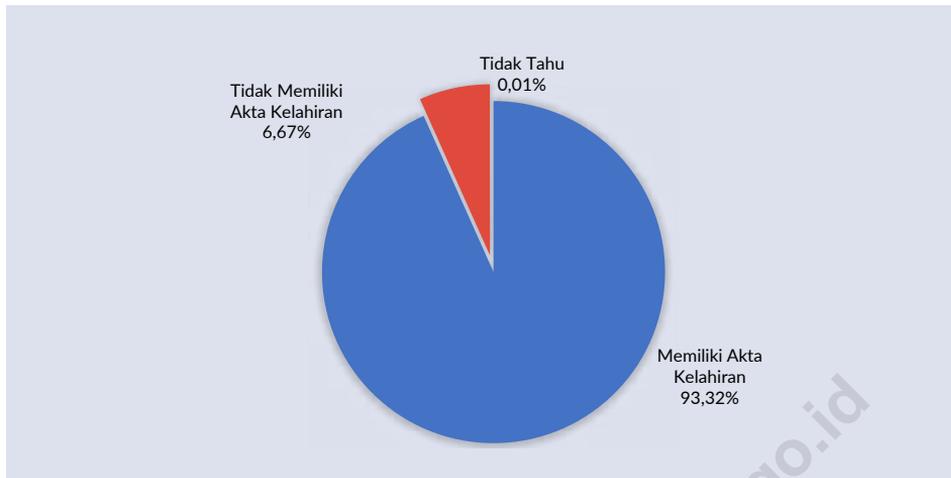
Jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota (Gambar 8), persentase tertinggi anak yang memiliki akta kelahiran yaitu Kota Gorontalo (95,55 persen), kemudian disusul oleh Kabupaten Gorontalo (94,68 persen), dan Kabupaten Bone Bolango (94,52 persen). Masih terdapat satu wilayah yang persentasenya di bawah 90 persen yaitu Kabupaten Pohuwato (86,51 persen). Oleh karena itu, pemerintah harus membuat inovasi dalam pembuatan akta kelahiran melalui unit pelaksana tugas di daerah, sehingga semua anak di Provinsi Gorontalo mempunyai akses yang sama terhadap kepemilikan akta kelahiran tersebut.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020, BPS

**Gambar 8. Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, 2020**

Meskipun kepemilikan akta kelahiran sudah berada di atas rata-rata nasional, masih ada sekitar 6,67 persen anak yang tidak memiliki akta kelahiran, bahkan 0,01 persen orang tua tidak mengetahui tentang akta kelahiran, dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh stakeholder.

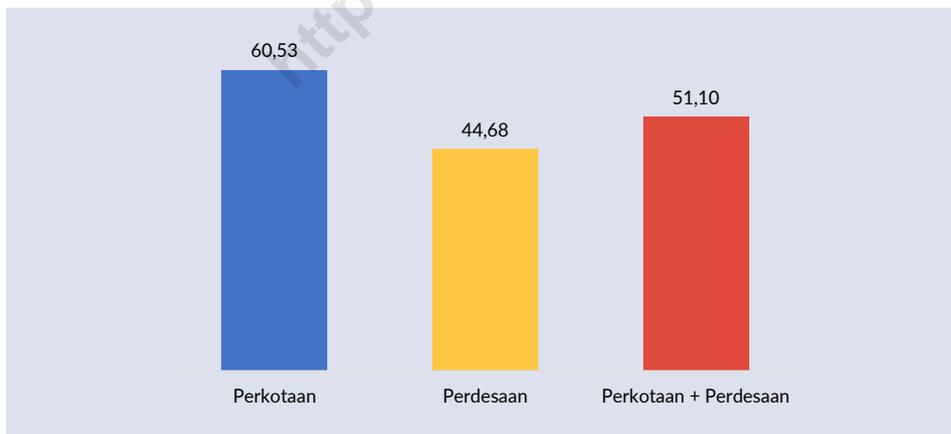


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2020, BPS Gorontalo

**Gambar 9. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Gorontalo, 2020**

### 3. Akses Internet

Internet adalah dunia yang tidak memiliki batasan dan bisa dikatakan sebagai dunia yang bebas. Semua orang dapat mengakses internet ditambah dengan semakin lajunya teknologi membuat siapapun semakin mudah mengaksesnya, mulai dari orang tua, remaja bahkan anak kecil. Bahkan jika ada anak kecil yang bermain sosial media sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat (Aheniwati, 2019).



Sumber: Susenas BPS (2020) dari Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

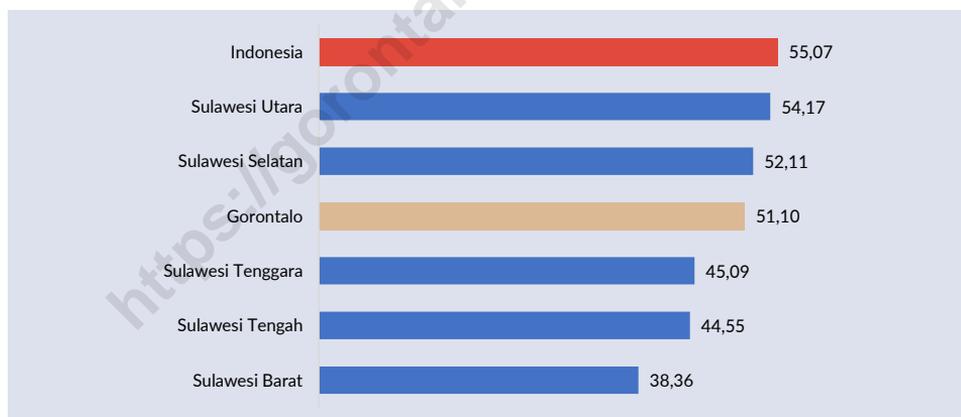
**Gambar 10. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet menurut Tipe Daerah, 2020**

Selama masa pandemi kebutuhan akan akses internet semakin di Indonesia semakin meningkat tidak terkecuali di Gorontalo. Ruang digital menjadi opsi wahana kegiatan dan jembatan komunikasi yang efektif bagi masyarakat. Banyak kegiatan

beralih dari luring (luar jaringan) menjadi daring (dalam jaringan). Teknologi atau lebih spesifiknya internet, ponsel pintar, dan laptop sekarang digunakan secara luas untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan kepentingan lainnya.

Akses internet menjadi hal yang sangat dibutuhkan di seluruh wilayah baik perdesaan maupun perkotaan. Dari Gambar 10 terlihat sebagian besar (51,10 persen) anak umur 7-17 tahun di Gorontalo sudah mengakses internet. Lebih dari separuh jumlah anak di perkotaan (60,53 persen) sudah mengakses internet, sedangkan di perdesaan baru mencapai 44,68 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran akses internet di Gorontalo masih belum merata. Tingginya pasar pada daerah perkotaan merupakan salah satu faktor berkembangnya jaringan internet, jika dibandingkan dengan daerah perdesaan yang memiliki populasi lebih sedikit.

Persentase anak umur 7-17 tahun yang mengakses internet menurut provinsi se-Sulawesi, terlihat pada Gambar 11 bahwa semua provinsi memiliki angka persentase di bawah rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang terletak di pulau Sulawesi, Gorontalo menempati urutan ketiga tertinggi persentase anak usia 7-17 tahun yang mengakses internet setelah Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sementara persentase terendah dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat yang hanya sebesar 38,36 persen.



Sumber: Susenas BPS (2020) dari Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

### Gambar 11. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet di Provinsi se-Sulawesi dan Nasional, 2020

Relasi anak dengan internet, terutama mereka yang berusia di bawah 12 tahun sering menimbulkan pertanyaan apakah ada dampak negatif dari penggunaan internet atau tidak. Pertanyaan ini wajar muncul karena internet dianggap menimbulkan kecanduan yang menyebabkan anak-anak kurang berinteraksi dengan anggota keluarga lain maupun teman sebayanya. Alasan lain, internet sering dianggap memberikan dampak negatif karena alasan konten, seperti pornografi, kekerasan, dan *cyberbullying*.

Disisi lain internet juga dianggap memiliki dampak positif, karena dapat digunakan sebagai sarana belajar oleh anak. Sebagai contoh, studi yang dilakukan Christina Davidson dalam Kurnia dkk (2019) menunjukkan bahwa internet bisa digunakan secara positif oleh anak-anak di rumah. Studi ini menunjukkan bahwa untuk

bisa menggunakan internet dengan positif, anak-anak membutuhkan bimbingan orangtua dan untuk dapat melakukan pembimbingan orangtua dituntut mempunyai kecakapan baik teknis, pengetahuan, maupun emosi dalam mengakses berbagai informasi maupun hiburan melalui internet.

Dengan perkataan lain, dalam penggunaan internet anak-anak di rumah, bimbingan orangtua sangat diperlukan. Pembimbingan ini merupakan sebuah wujud nyata dari literasi digital dapat dapat ditularkan orangtua kepada anak-anak, terutama yang berusia di bawah 12 tahun. Pentingnya peran orangtua sebagai pendamping anak dalam menggunakan internet tidak lain karena anak belum mempunyai kecakapan teknis, pengetahuan maupun emosi dalam mengakses berbagai informasi dan hiburan melalui internet Kurnia dkk (2019).

## C. Pendidikan anak

### 1. Pendidikan Anak Usia Dini

Tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan kurun waktu yang sangat penting dan kritis dalam tumbuh kembangnya secara fisik, mental, dan psikososial, yang berjalan sedemikian cepatnya sehingga keberhasilan tahun-tahun pertama untuk sebagian besar menentukan hari depan anak (Sunarwati 2007 dalam Hartawan, 2020). Pengasuhan anak merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada masa-masa kritis, yaitu umur 0 hingga 8 tahun. Pendidikan Anak Umur Dini (PAUD) merupakan salah satu pengasuhan sebagai upaya dari lingkungan kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang terpenuhi. Sebagai pengasuhan alternatif, pendidikan anak usia dini pada hakekatnya merupakan suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak sejak lahir hingga enam tahun secara menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pendidikan usia dini telah menjadi perhatian pemerintah, faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan seperti peserta didik, pendidik, sistem kurikulum, fasilitas dalam mengajar, dan waktu mengajar. Kegiatan-kegiatan tersebut tak terlepas dari campur tangan pemerintah sebagai pelaksana dan eksekutif di pemeritahan, termasuk dalam sistem bidang pendidikan, faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan juga di tunjang dari segi kualitas guru (tenaga pendidik) itu sendiri dan juga faktor lingkungan masyarakat sekitar.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu kunci membangun sumber daya manusia. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, oleh karena itu pembangunan SDM di usia dini akan memberikan *rate of return* tertinggi dibandingkan di usia lainnya (Restra Kemendikbud, 2020). Oleh karena pentingnya pendidikan anak usia dini maka PBB melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengamanatkan untuk setiap negara meningkatkan akses ke pengembangan anak usia dini terhadap pra-pendidikan dasar yang berkualitas.

Akses pendidikan anak usia dini terhadap pra-pendidikan dasar dapat digambarkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD atau APK anak usia 3-6 tahun. Gambar 12 menunjukkan APK anak usia 3-6 tahun di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 APK PAUD mencapai

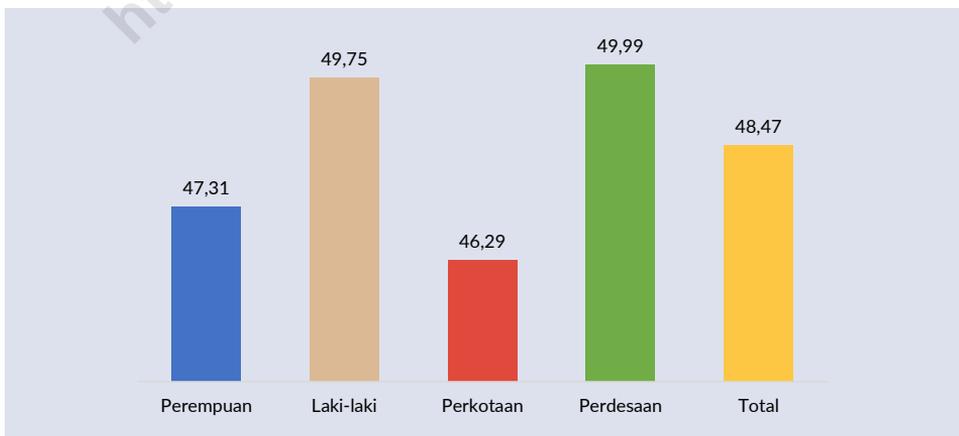
50,23 persen, kemudian turun menjadi 49,49 persen di tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020 APK PAUD sebesar 48,47 persen.



Sumber: Susenas 2015-2020, BPS

**Gambar 12. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak (Usia 3-6 Tahun) yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Gorontalo, 2015-2020**

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APK PAUD laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Pada tahun 2020, APK PAUD laki-laki mencapai 49,75 persen sedangkan perempuan sebesar 47,31 persen. APK PAUD baik laki-laki maupun perempuan sudah sama-sama mencapai target nasional tahun 2020 yaitu minimal 40,20 persen. Demikian juga jika dilihat menurut tipe daerah, baik di perkotaan maupun di perdesaan APK PAUD sudah melebihi target nasional.



Sumber: Susenas Maret 2020,

**Gambar 13. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak (Usia 3-6 Tahun) yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Gorontalo, 2015-2020**

## 2. Angka Kesiapan Sekolah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 menyatakan bahwa setiap warga negara berumur tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pasal 28 menyatakan bahwa Pendidikan umur dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pada tahun 2020 capaian penduduk anak umur 0-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD di Provinsi Gorontalo sangat rendah yaitu 26,16 persen. Capaian pada kelompok anak laki-laki dan anak perempuan tidak terlalu berbeda, dimana anak laki-laki umur 0-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD sebanyak 26,12 persen dan anak perempuan mencapai 26,19 persen. Sedangkan untuk daerah perkotaan nilainya lebih rendah, sebanyak 24,88 persen penduduk 0-6 tahun yang mengikuti PAUD dan perdesaan sebanyak 27,05 persen (lihat Tabel 2).

**Tabel 2. Persentase Keikutsertaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anak Umur 0-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020**

Keterangan	Sedang mengikuti PAUD	Tidak mengikuti PAUD	Jumlah
Jenis Kelamin			
Laki-laki	26,12	73,88	100,00
Perempuan	26,19	73,81	100,00
Laki-laki+Perempuan	26,16	73,84	100,00
Tipe Daerah			
Perkotaan	24,88	75,12	100,00
Perdesaan	27,05	72,95	100,00
Perkotaan+Perdesaan	26,16	73,84	100,00

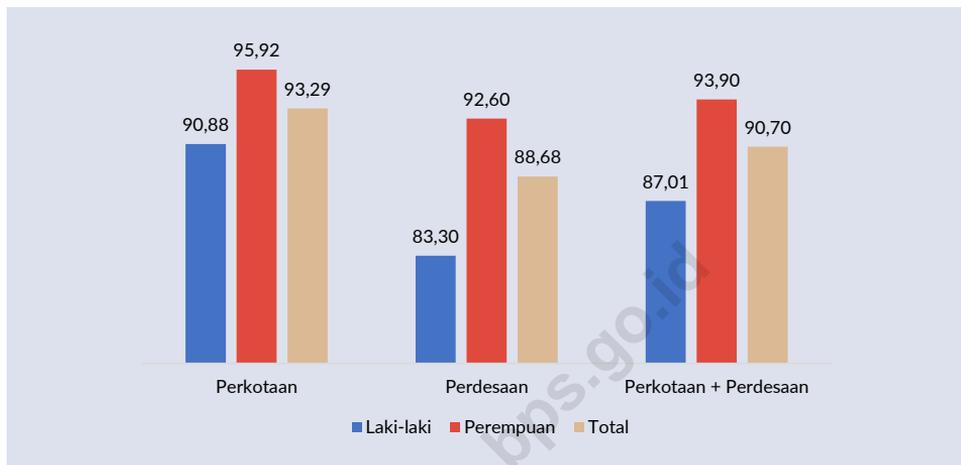
Sumber: Susenas BPS (2020) dari Lampiran Publikasi Profil Anak Indonesia 2021

Terkait dengan kesiapan sekolah, Hurlock (1980) menyatakan bahwa kesiapan bersekolah terdiri dari kesiapan secara fisik dan psikologis, yang meliputi kesiapan emosi, sosial dan intelektual. Seorang anak dikatakan telah memiliki kesiapan fisik bila perkembangan motoriknya sudah matang, terutama koordinasi antara mata dengan tangan (visio-motorik) berkembang baik.

Menurut Kustimah et.al (2007) ada 5 faktor utama yang dapat mempengaruhi kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar, yaitu kesehatan fisik, umur, tingkat kecerdasan, stimulasi yang tepat serta motivasi. Hal ini diperkuat oleh Papalia et.al (2008) yang menyebutkan 3 faktor yang dapat memengaruhi kesiapan anak diantaranya adalah keturunan, lingkungan, kematangan tubuh dan otak. Hasil penelitian Damayanti (2015) menyebutkan bahwa anak yang mempunyai dukungan dari orangtua dalam kesiapan bersekolahnya lebih baik daripada anak yang tidak mendapat dukungan dari orangtua dan anak yang mempunyai motivasi belajar lebih baik kesiapan bersekolahnya dibanding anak yang tidak mempunyai motivasi belajar.

Angka kesiapan sekolah di Provinsi Gorontalo tahun 2020 mencapai 90,70 persen. Lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 74,96 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka kesiapan perempuan lebih tinggi dibandingkan angka kesiapan laki-laki yaitu masing-masing sebesar 93,90 persen dan 87,01

persen. Bila dibandingkan angka kesiapan sekolah berdasarkan tipe daerah, terlihat bahwa di perkotaan angka kesiapan sekolah lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu masing-masing 93,29 persen dan 88,68 persen.

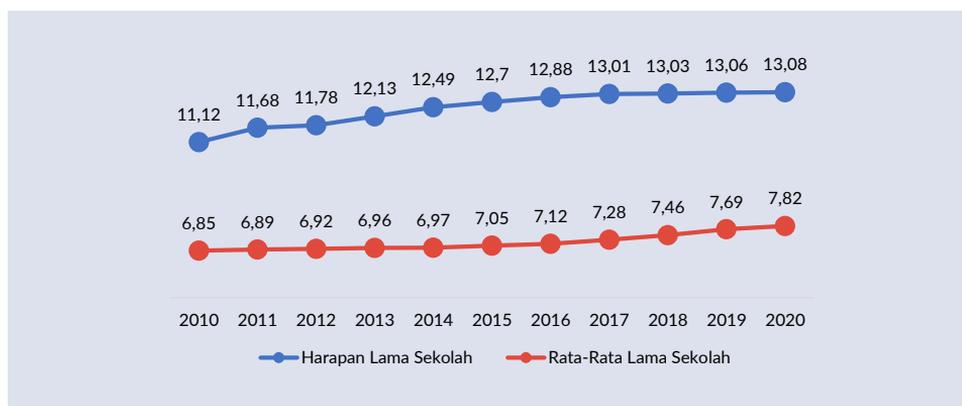


Sumber: Susenas BPS (2020) dari Lampiran Publikasi Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 14. Angka Kesiapan Sekolah Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2020**

### 3. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator rata-rata lama sekolah mencerminkan output jangka panjang atau investasi dari pembangunan pendidikan di masa lampau karena dihitung dari capaian lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Sementara indikator harapan lama sekolah menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan pada jangka pendek karena merupakan cerminan dari partisipasi sekolah di periode berjalan.



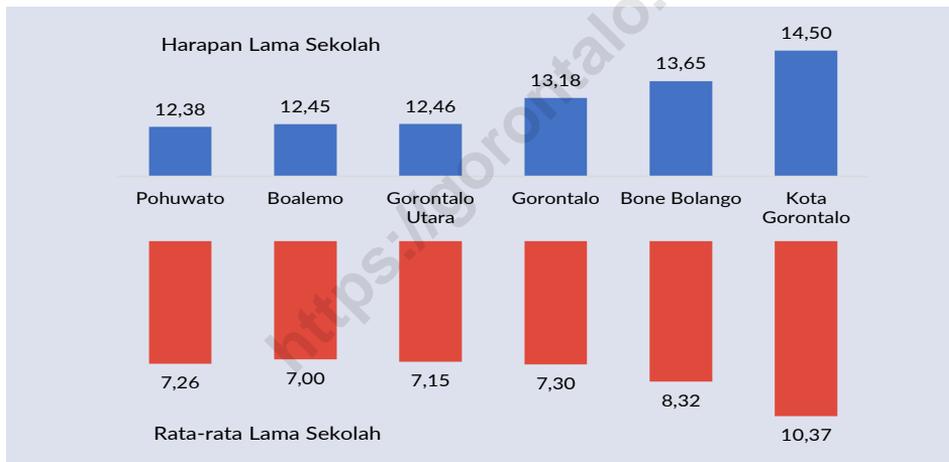
Sumber: BPS Provinsi Gorontalo (2020)

**Gambar 15. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Gorontalo (Tahun), 2010-2020**

Dalam kurun 2010-2020, indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tersebut, harapan lama sekolah di Gorontalo meningkat dari 11,12 tahun (2010) menjadi 13,08 tahun (2020). Harapan lama sekolah sebesar 13,08 tahun memiliki arti bahwa anak-anak usia 7 tahun di Gorontalo berpeluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I. Peningkatan harapan lama sekolah tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan partisipasi sekolah di Gorontalo yang berarti bahwa semakin banyak penduduk Gorontalo yang bersekolah.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Gorontalo meningkat dari 6,85 tahun (2010) menjadi 7,82 tahun (2020). Rata-rata lama sekolah sebesar 7,82 tahun memiliki arti bahwa pada tahun 2020 penduduk yang berusia 25 tahun ke atas di Gorontalo rata-rata telah menyelesaikan pendidikannya hingga kelas VII (SMP kelas II).

Jika dibandingkan menurut wilayah kabupaten/kota, capaian yang diperoleh cukup beragam. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 12,38 tahun hingga 14,50 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah berkisar antara 7,00 tahun hingga 10,37 tahun.



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo (2020)

**Gambar 16. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (Tahun), 2020**

#### 4. Akses Pendidikan di Gorontalo

Akses pendidikan merupakan segala kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya untuk meraih pendidikan yang layak. Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pendidikan harus bisa diakses dan dijangkau oleh semua warga negara, melampaui berbagai kendala seperti fisik, mental, jenis kelamin, ekonomi, geografis, dan sosial.

Ketersediaan sekolah beserta sarana penunjangnya secara teoritis menyediakan akses terhadap kegiatan belajar di sekolah atau kesempatan untuk melanjutkan

pendidikan. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa di semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo telah tersedia sekolah berbagai jenjang. Total jumlah fasilitas Pendidikan jenjang SD/MI sebanyak 1.022 dan jumlah tersebut merupakan jumlah paling banyak dari total fasilitas pendidikan jenjang yang lain.

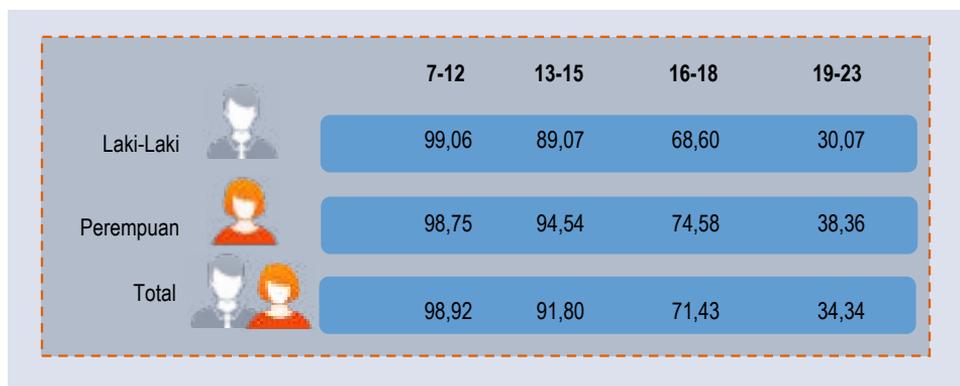
**Tabel 3. Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut/Kabupaten/Kota, 2020/2021**

Kabupaten/Kota	Total				
	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)
Boalemo	112	146	66	16	10
Gorontalo	294	321	151	36	13
Pohuwato	112	141	58	16	12
Bone Bolango	140	144	52	15	6
Gorontalo Utara	60	148	54	14	6
Kota Gorontalo	110	122	31	16	9
Provinsi Gorontalo	828	1022	412	113	56

Sumber: Gorontalo Dalam Angka, 2021

### 5. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu. APS perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki untuk semua kelompok umur kecuali kelompok umur 7-12 tahun. Ketersediaan fasilitas sekolah jenjang SMP dan SMA masih belum sebanyak sekolah SD yang dapat dengan mudah ditemui di hampir setiap desa. Kondisi infrastruktur lain seperti akses jalan juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi sekolah tersebut.



Sumber: Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo 2020, BPS Provinsi Gorontalo

**Gambar 17. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Persen), 2020**

Gambar 17 menunjukkan bahwa APS Provinsi Gorontalo pada kelompok umur 7-12 tahun mencapai 98,92 persen. Semakin meningkatnya kelompok umur, APS semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolahnya cenderung semakin menurun seiring bertambahnya usia penduduk.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan, perbedaan APM antara laki-laki dengan perempuan semakin besar. Gambar 18, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi yaitu 98,50 persen kemudian APM semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan gender, APM SD/ sederajat untuk laki-laki dan perempuan juga memiliki nilai paling tinggi.

	SD	SMP	SMA	PT
Laki-Laki	98,32	68,25	57,75	21,06
Perempuan	98,70	73,14	57,99	31,61
Total	98,50	70,68	57,86	26,49

Sumber: Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo 2020, BPS Provinsi Gorontalo

**Gambar 18. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan (Persen), 2020**

### 6. Keselarasan Pendidikan dan Lapangan Kerja

Permasalahan tenaga kerja seakan tidak pernah selesai dengan tuntas. Permasalahan ini melibatkan berjuta-juta penduduk di Indonesia termasuk Gorontalo. Semakin berkurangnya kesempatan kerja menjadikan persaingan antar angkatan kerja sangat ketat. Dari masalah ini menimbulkan pengangguran pada angkatan kerja yang belum terserap di lapangan pekerjaan.

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. Masalah tenaga kerja menyangkut banyak aspek dan sifatnya menyeluruh, serta merupakan isu nasional yang mempunyai implikasi kebijakan (Muhson dkk, 2012).

Pada tahun 2020, jumlah pengangguran berpendidikan menengah (atas dan kejuruan) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lain. Kemampuan atau keterampilan yang diperoleh dari kedua jenjang pendidikan tersebut diduga

masih belum sesuai atau belum bisa diterapkan langsung dengan permintaan pasar kerja. Berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah melalui dunia pendidikan, diantaranya dengan dikembangkannya pendidikan yang bercirikan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) dan dikembangkannya pendidikan berbasis kompetensi. Cara-cara tersebut menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan kerja, sehingga keterserapan lulusan oleh dunia kerja menjadi tinggi. Oleh karena itu, pendidikan harus memperhatikan kompetensi yang ada pada dunia kerja untuk dikembangkan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki kompetensi seperti harapan dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan saat ini harus berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau dunia usaha (Muhson dkk, 2012).



Sumber: Sakernas Agustus (2020), BPS

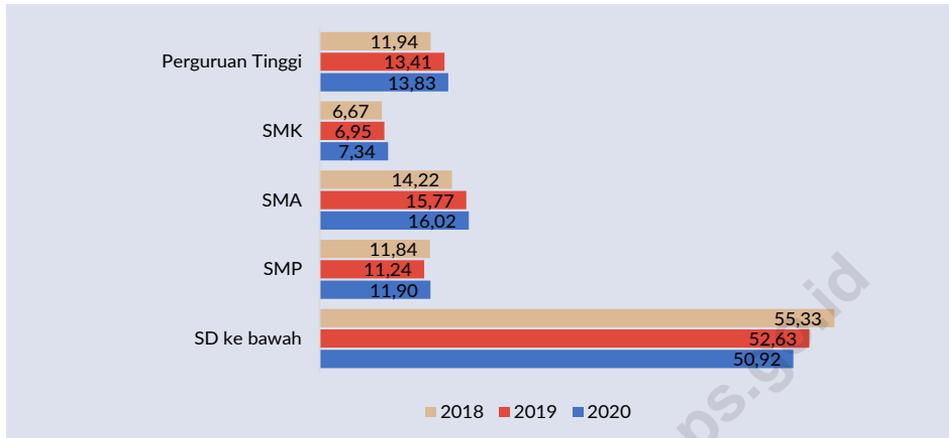
**Gambar 19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Gorontalo (Persen), 2018-2020**

Sebagai pekerja, kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun non formal sangat terbatas dan bahkan dapat dikatakan cenderung jarang diberikan kepada para pekerja informal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pelatihan teknis atau keterampilan yang mendukung keterampilannya pun dapat dikatakan jarang terjadi secara terprogram, bertahap, dan berkesinambungan. Padahal setiap pekerja masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan minimal wajib belajar 9 tahun (minimal tamat SMP) disamping hak untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bakat dan minatnya.

Kondisi ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Gorontalo masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebesar 50,92 persen atau secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tergolong rendah. Meskipun angka melek huruf sudah cukup tinggi, namun jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan di atas sekolah dasar masih rendah.

Diharapkan keselarasan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja akan semakin terwujud melalui berbagai program dan kebijakan yang bersinergi antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Tenaga Kerja sebagai lini

terdepan dalam upaya menyiapkan tenaga kerja yang dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan daya saing yang sepadan dengan kebutuhan dunia kerja di masa mendatang.



Sumber: Sakernas Agustus (2020), BPS

**Gambar 20. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Gorontalo, 2018-2020**

## D. Kesehatan anak

### 1. Penolong Persalinan

Persalinan yang aman harus didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan alat yang aman dan bersih untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi (Prawirohardjo, 2016). Menurut WHO (2020), bidan, dokter, atau perawat merupakan tenaga kesehatan profesional yang terakreditasi untuk menangani kehamilan, persalinan, dan periode segera setelah melahirkan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting agar komplikasi persalinan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani dengan baik. Melahirkan bukan oleh tenaga kesehatan berdampak pada tingginya kematian ibu dan bayi. Hasil penelitian Rofiqoch dkk (2016) menunjukkan adanya hubungan nyata antara penolong persalinan dengan kematian bayi.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 di Gorontalo, penolong persalinan tertinggi adalah bidan yang mencapai 50,49 persen. Persalinan yang ditolong oleh dokter sebesar 47,09 persen. Sementara dukun beranak sebagai penolong persalinan masih juga ditemukan sebesar 1,78 persen. Komposisi ini tidak berbeda polanya dengan tahun 2019, bidan menjadi penolong kelahiran terbanyak bagi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir.

Jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sudah cukup tinggi, akan tetapi masih ditemukan penolong persalinan oleh dukun beranak di dua kabupaten yang jaraknya lumayan jauh dari ibukota provinsi yaitu Kabupaten Boalemo (3,64 persen) dan Kabupaten Pohuwato (7,64 persen).

Penelitian yang dilakukan oleh Djama dkk (2011) menyebutkan bahwa salah faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pertolongan persalinan tenaga kesehatan

adalah transportasi dan keberadaan bidan di tempat pelayanan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menyediakan dan memperluas jaminan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat sehingga akses pada persalinan tenaga kesehatan dapat lebih baik. Melalui upaya pemerintah atau pemberdayaan masyarakat desa perlu meningkatkan akses transportasi penduduk sehingga memudahkan mencapai fasilitas pelayanan kesehatan atau menambah bentuk jaminan dengan penggantian biaya transportasi.

**Tabel 4. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir dalam 2 Tahun Terakhir, 2020**

Kabupaten/Kota	Penolong Proses Kelahiran dalam 2 Tahun Terakhir				
	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat	Dukun Beranak/ Paraji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)
Boalemo	43,22	4,05	49,09	0,00	3,64
Gorontalo	40,91	5,24	53,85	0,00	0,00
Pohuwato	30,66	0,00	61,01	0,69	7,64
Bone Bolango	46,89	5,44	46,66	1,01	0,00
Gorontalo Utara	26,08	0,00	69,93	3,99	0,00
Kota Gorontalo	69,26	2,84	27,90	0,00	0,00
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>43,78</b>	<b>3,31</b>	<b>50,49</b>	<b>0,64</b>	<b>1,78</b>

Sumber: Susenas Maret (2020), BPS

## 2. Tempat Melahirkan

Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas sangat penting bagi keberlangsungan hidup ibu dan bayi, termasuk dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Menurut Hamal et.al (2020), salah satu faktor yang dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi selama kehamilan dan persalinan adalah fasilitas kesehatan. Setengah dari kematian bayi terjadi pada masa neonatal (28 hari pasca melahirkan), maka sangat penting dalam memastikan penanganan saat melahirkan dan satu bulan pertama pasca melahirkan (Bappenas, 2017).

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa wanita pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir telah melaksanakan persalinan di rumah sakit atau rumah bersalin atau tempat melahirkan lainnya. Sebanyak 52,70 persen memilih melahirkan di Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, dan 4,98 persen melahirkan di rumah bersalin/klinik.

Puskemas/Polindes/Pustu/Praktek Nakes dan rumah juga menjadi rujukan tempat melahirkan dengan persentase masing-masing mencapai 31,11 persen dan 11,22 persen. Keberadaan Pustu bertujuan untuk meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah kerja puskesmas utama. Untuk wilayah-wilayah pelosok keberadaannya membantu warga untuk mengakses layanan kesehatan walaupun layanan yang disediakan terbatas.

**Tabel 5. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir, 2020**

Kabupaten/Kota	Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir				
	RS Pemerintah/ Swasta	Rumah Bersalin/ Klinik	Puskesmas/ Polindes/ Pustu/Praktek Nakes	Rumah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)
Boalemo	45,44	8,41	35,24	10,91	0,00
Gorontalo	55,88	3,78	26,29	14,05	0,00
Pohuwato	37,86	0,89	40,45	20,79	0,00
Bone Bolango	54,82	1,67	36,70	6,81	0,00
Gorontalo Utara	36,51	1,26	54,29	7,94	0,00
Kota Gorontalo	75,65	12,18	9,04	3,12	0,00
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>52,70</b>	<b>4,98</b>	<b>31,11</b>	<b>11,22</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Susenas Maret (2020), BPS

Jika ditinjau berdasarkan wilayah kabupaten/kota, persentase tertinggi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir telah melaksanakan persalinan di rumah sakit pemerintah/swasta terdapat di Kota Gorontalo (75,65 persen). Kemudian disusul oleh Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango dengan persentase yang masing-masing sebesar 55,88 persen dan 54,82 persen. Sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato sebagian besar memilih Puskesmas/Polindes/Pustu/Praktek Nakes sebagai tempat melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir.

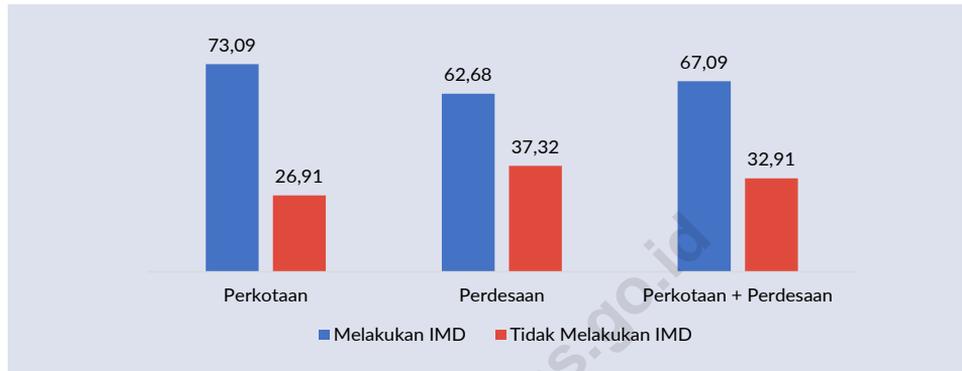
Hasil Studi Tsegay et.al (2013) menunjukkan bahwa yang menentukan pemilihan tempat melahirkan adalah faktor sosiodemografi, karakteristik kebidanan, dan akses ke tempat melahirkan. Lebih lanjut hasil penelitian Asseffa et.al (2016) melaporkan bahwa penggunaan fasilitas kesehatan ditentukan oleh usia ibu, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, paritas, kehadiran perawat antenatal empat kali atau lebih dan kesiapan kelahiran.

### 3. Inisiasi Menyusui Dini

Inisiasi menyusui dini (IMD) adalah pemberian ASI segera biasanya sekitar 30-60 menit setelah bayi dilahirkan. Hal ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bayi baru lahir dan memantapkan masa menyusui dalam jangka panjang (UNICEF 2019). Menurut WHO (2020), IMD menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif (6 bulan pertama kehidupan bayi) hingga usia anak 2 tahun.

Gambar 21 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sebagian besar praktik IMD di Gorontalo baik daerah perkotaan maupun di perdesaan sudah cukup baik yaitu masing-masing 73,09 persen dan 62,68 persen. Manfaat dari IMD adalah membuat ibu dan bayi lebih tenang serta meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi melalui kontak kulit. Masih terdapat 32,91 persen wanita pernah kawin yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir tidak melakukan IMD. Secara

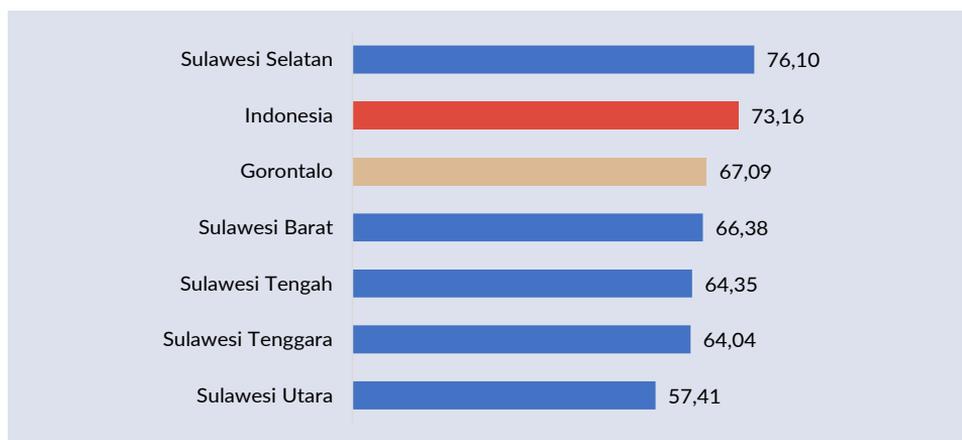
umum terdapat berbagai faktor kegagalan praktek IMD dan ASI eksklusif, seperti ibu bekerja, tidak ada dukungan keluarga, tidak adanya pendampingan dari bidan, rendahnya pengetahuan dan sikap ibu, budaya yang turun temurun, gencarnya promosi susu formula, dan lain-lain. (Sinaga dkk, 2016).



Sumber: Susenas (2020) BPS dari Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 21. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Gorontalo, 2018-2020**

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi se-Sulawesi, Provinsi Gorontalo berada di urutan kedua tertinggi persentase wanita pernah kawin yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir yang melakukan IMD. Posisi pertama dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan (76,10 persen). Dukungan dari orang terdekat sangat berperan dalam sukses tidaknya menyusui, semakin besar dukungan yang didapatkan maka semakin besar kemampuan ibu untuk menyusui. Pada ibu pasca melahirkan kondisi emosi yang stabil menentukan tingkat produksi ASI yang dihasilkan ibu, kestabilan emosi tersebut dapat diraih apabila suami atau anggota keluarga turut mendukung selama proses kehamilan dan menyusui (Roesli, 2012).



Sumber: Susenas (2020) BPS dari Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

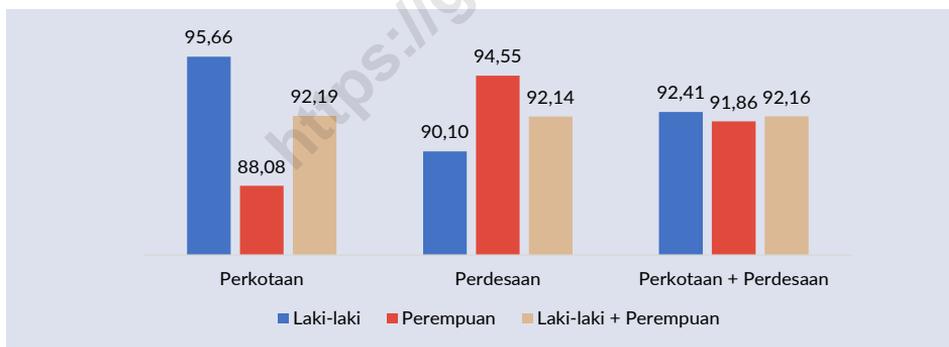
**Gambar 22. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Gorontalo, 2018-2020**

#### 4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan alami pertama untuk bayi dan menyediakan semua vitamin, nutrisi, dan mineral yang diperlukan bayi untuk pertumbuhan enam bulan pertama, tidak ada cairan atau makanan lain yang diperlukan. ASI terus tersedia hingga setengah atau lebih dari kebutuhan gizi anak pada tahun pertama dan sampai tahun kedua kehidupan. Selain itu, ASI mengandung antibodi dari ibu yang membantu memerangi penyakit (Khrist, 2011).

Pemberian ASI dikenal sebagai salah satu yang memberikan pengaruh kuat terhadap kelangsungan hidup anak, pertumbuhan dan perkembangan. Penelitian menyatakan bahwa inisiasi dini dalam satu jam pertama dapat mencegah 22 persen kematian bayi dibawah umur satu bulan di negara-negara berkembang. Pencapaian enam bulan ASI eksklusif bergantung pada keberhasilan inisiasi dalam satu jam pertama. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, bersamaan dengan makanan pendamping ASI dan meneruskan ASI dari enam bulan sampai dua tahun, dapat mengurangi sedikitnya 20 persen kematian anak balita (Roesli, 2008).

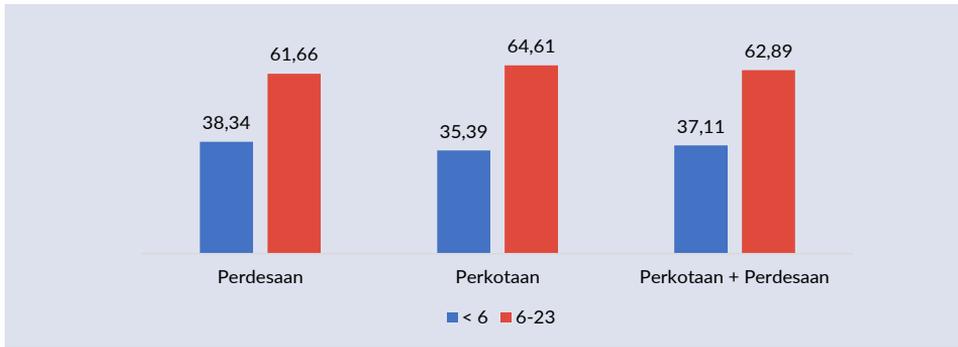
Persentase baduta yang pernah diberi ASI menurut tempat tinggal dan jenis kelamin di Gorontalo pada tahun 2020 disajikan pada Gambar 23. Capaian baduta yang pernah diberi ASI cukup tinggi yaitu 92,16 persen dan tidak ada perbedaan signifikan antara baduta laki-laki dan baduta perempuan, meskipun persentasenya sedikit lebih besar pada baduta laki-laki. Selain itu, jika dilihat menurut tipe daerah, daerah di perdesaan memiliki persentase bayi yang diberi ASI sedikit lebih rendah dibandingkan daerah di perkotaan.



Sumber: Susenas (2020) BPS dari Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 23. Persentase Baduta (Bayi 0-23 Bulan) yang Pernah Diberi Air Susu Ibu menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020**

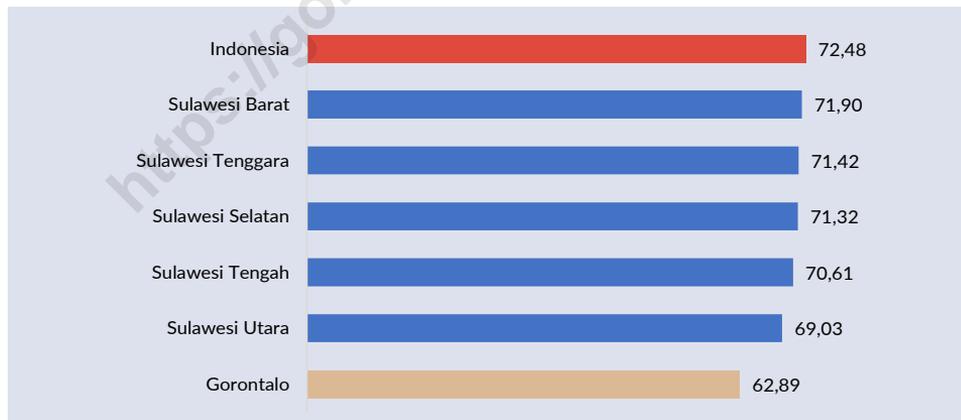
Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa pemberian ASI pada bayi hingga usia 6-23 bulan di Gorontalo mencapai 62,89 persen. Pengalaman menyusui tidak hanya didapat dari menyusui anak sebelumnya. Hasil penelitian Hastuti dkk (2015) menyebutkan bahwa terdapat hubungan pengalaman menyusui dengan pemberian ASI eksklusif. Namun juga dipengaruhi oleh budaya keluarga, jika orang tuanya tidak melakukan ASI eksklusif akan memberikan tekanan kepada anaknya untuk tidak memberikan ASI eksklusif. Struktur keluarga, pada bentuk keluarga besar, dapat mendorong terhadap sikap memberikan ASI eksklusif, terutama pada inisiasi (Agunbiade et.al dalam Hastuti dkk 2015).



Sumber: Susenas (2020) BPS dari Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 24. Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI menurut Tipe Daerah dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2020**

Seluruh provinsi di Sulawesi memiliki capaian di bawah nasional. Namun Provinsi Gorontalo memiliki capaian terendah dibanding provinsi lain yang hanya mencapai 62,89 persen. Pemberian ASI Eksklusif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah harus terus ditingkatkan untuk menjamin pemenuhan hak bayi untuk ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai berusia enam bulan.



Sumber: Susenas (2020) BPS dari Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

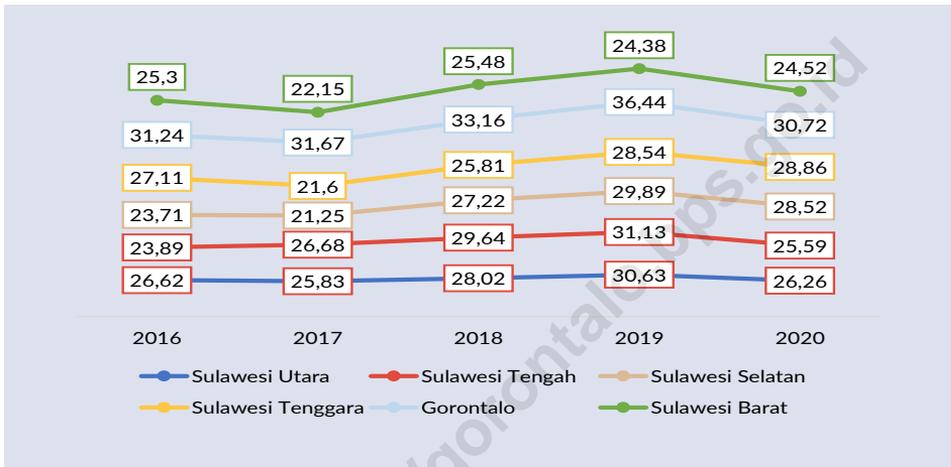
**Gambar 25. Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Selama 6-23 Bulan Menurut Provinsi se-Sulawesi, 2020**

## 5. Keluhan Kesehatan

Kesehatan anak sangat penting untuk dijaga sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kondisi fisik yang prima mendukung anak untuk dapat belajar dengan baik. Oleh karena itu penanganan terhadap anak yang mengalami gangguan kesehatan harus segera dilakukan. Ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan haruslah terjangkau agar keluarga dapat dengan mudah mendapatkan penanganan Ketika memiliki gangguan kesehatan. Keluhan kesehatan didefinisikan

sebagai keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain.

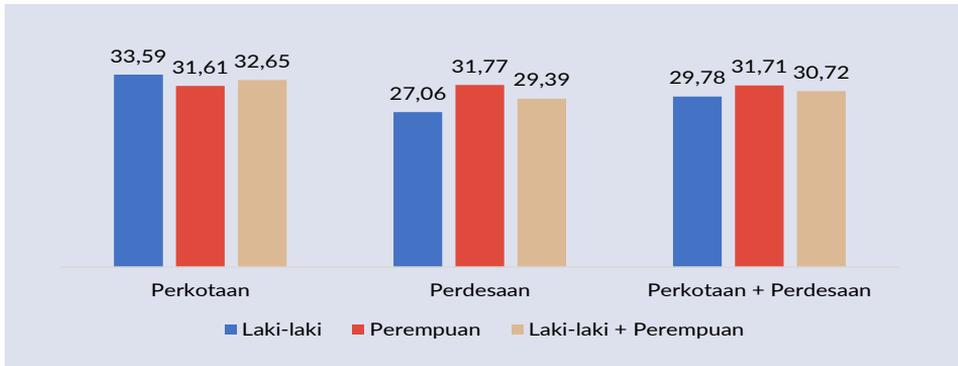
Selama periode 2016-2019 persentase anak di Gorontalo yang mengalami keluhan kesehatan terus meningkat dan menurun di tahun 2020. Pada tahun 2020, sebanyak 30,72 persen anak di Gorontalo mengalami keluhan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa satu dari tiga anak pernah mengalami keluhan kesehatan. Tiga provinsi dengan persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan tertinggi diantaranya Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.



Sumber: Susenas (2020) BPS dari Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 26. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan se-Sulawesi, 2016-2020**

Jika dilihat dari tipe daerah, penduduk 0-17 tahun di perkotaan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan dibandingkan di perdesaan. di Daerah perdesaan sekitar 29,39 persen anak mengalami keluhan kesehatan, sedangkan di perkotaan mencapai 32,65 persen. Menurut WHO (2017) banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Sehat atau tidaknya seseorang ditentukan oleh keadaan lingkungannya seperti pendapatan, pendidikan, hubungan dengan teman dan keluarga, akses dan penggunaan layanan kesehatan, serta lingkungan fisik. Daerah perkotaan dengan tingkat polusi yang lebih tinggi dibanding di daerah perdesaan, merupakan salah satu faktor yang memicu tingginya keluhan kesehatan di perkotaan. Seperti diutarakan Kelishadi & Poursafa (2010) bahwa polusi terutama memengaruhi mereka yang tinggal di daerah perkotaan, dimana emisi transportasi dan gas hasil pembakaran dari industri berkontribusi paling besar terhadap penurunan kualitas udara. Efek jangka pendek dari polusi udara adalah bersifat sementara dan berkisar dari ketidaknyamanan, seperti iritasi mata, hidung, kulit, tenggorokan, sakit kepala, mual, pusing, batuk dan sesak dada, serta kesulitan bernafas. Efek jangka panjangnya bersifat kronis, berlangsung selama bertahun-tahun atau seumur hidup dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, dalam jangka panjang toksisitas beberapa polutan udara juga dapat menyebabkan berbagai jenis kanker (Manisalidis et al, 2020).

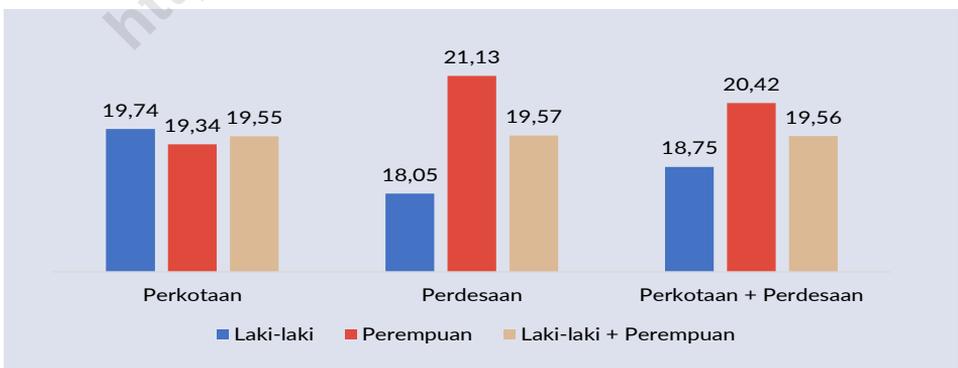


Sumber: Susenas (2020) BPS dari Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 27. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020**

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase tertinggi anak yang mengalami keluhan kesehatan adalah anak perempuan yang mencapai 31,71 persen.

Tingkat keparahan keluhan kesehatan dapat memengaruhi aktivitas, terutama pada kegiatan sehari-hari anak seperti sekolah, atau kegiatan sehari-hari lainnya yang ditunjukkan pada Gambar 28. Persentase anak yang sakit di Gorontalo pada tahun 2020 mencapai 19,56 persen. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 25,18 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase anak umur 0-17 tahun yang sakit baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan tidak signifikan berbeda. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase tertinggi anak yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya adalah anak perempuan yang mencapai 20,42 persen.



Sumber: Susenas (2020) BPS dari Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

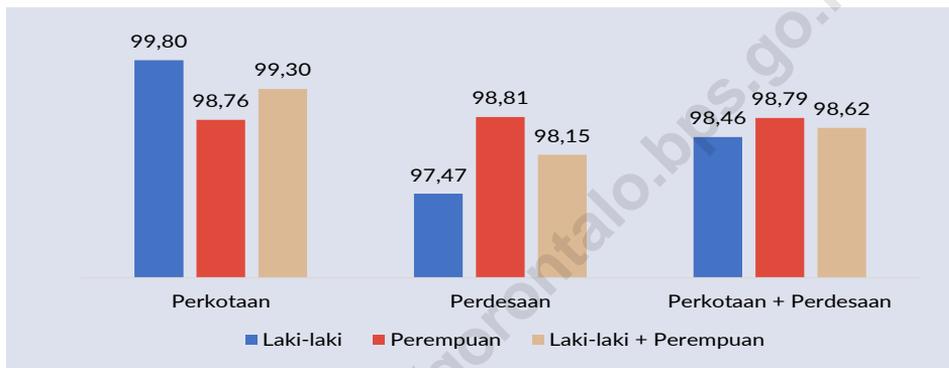
**Gambar 28. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Sakit (terganggu pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo , 2020**

## 6. Imunisasi Pada Anak

Perhatian utama terhadap kesehatan anak merupakan salah target SDGs yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua

orang di segala usia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan menghasilkan berbagai penemuan, salah satunya adalah vaksin yang diimplemetasikan melalui program imunisasi. Imunisasi didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Kemenkes, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003 terkait program imunisasi dasar lengkap wajib diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun yang terdiri dari Bacillus Calmette Guerin (BCG), Diphteria Pertussis Tetanus-Hepatitis B (DPT) atau Diphteria Pertussis Tetanus-Hepatitis B-Haemophilus Influenza tipe B (DPT-HB-Hib), Hepatitis B pada bayi baru lahir, polio dan campak.



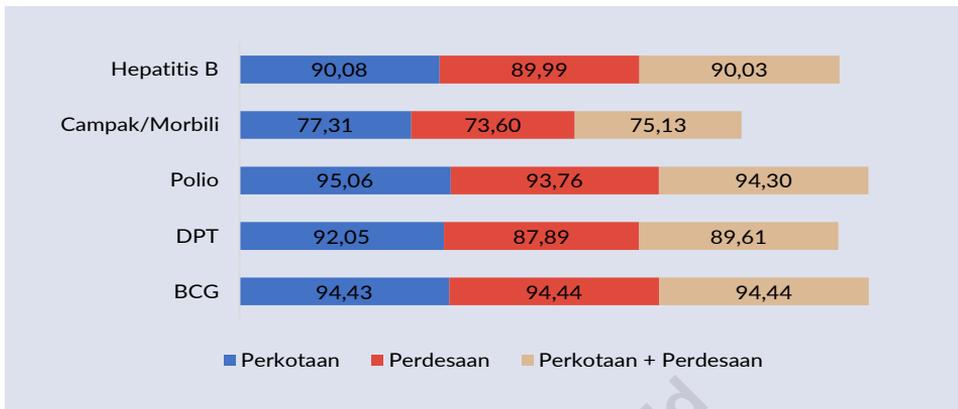
Sumber: Susenas Maret (2020) BPS pada Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 29. Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2020**

Berdasarkan Gambar 29, cakupan balita yang pernah diberi imunisasi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 mencapai 98,62 persen. Persentase balita perempuan yang pernah diberi imunisasi tidak berbeda signifikan dengan persentase laki-laki yaitu masing-masing sebesar 98,79 persen dan 98,46 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase balita di daerah perkotaan yang pernah diberi imunisasi lebih tinggi dibandingkan balita di daerah perdesaan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan aksesibilitas fasilitas kesehatan yang lebih tinggi di daerah perkotaan.

Menurut Tanjung (2017), faktor yang menentukan tinggi rendahnya cakupan imunisasi ialah sikap petugas, lokasi imunisasi, kehadiran petugas, usia ibu, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu, tingkat pendapatan keluarga, kepercayaan terhadap dampak buruk pemberian imunisasi, status pekerjaan ibu, tradisi dan dukungan keluarga.

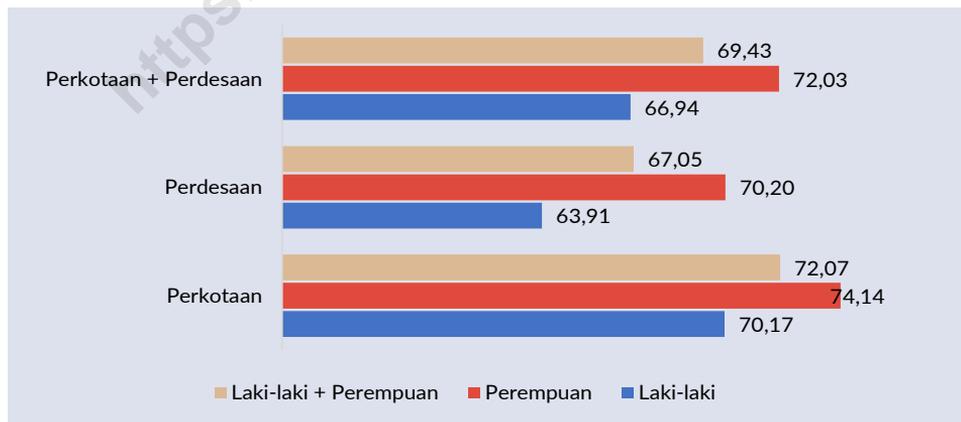
Hasil Susenas tahun 2020 pada Gambar 30 menunjukkan bahwa persentase balita yang pernah diberi imunisasi sudah mencapai lebih dari 80 persen pada hepatitis B, polio, DPT, dan BCG. Namun untuk imunisasi campak hanya mencapai 75,13 persen. Berdasarkan usia pemberian imunisasi campak berada pada tahap terakhir untuk imunisasi lengkap yaitu usia sembilan bulan.



Sumber: Susenas Maret (2020) BPS pada Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 30. Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Tipe Daerah dan Jenis Imunisasi di Provinsi Gorontalo, 2020**

Meskipun hepatitis B, BCG, Polio, DPT, dan campak merupakan imunisasi dasar lengkap, ternyata cakupannya belum mencapai 100 persen. Pada tahun 2020, persentase anak umur 12-23 bulan yang mendapat imunisasi lengkap hanya mencapai 69,43 persen. Capaian untuk anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki yang masing-masing sebesar 72,03 persen dan 66,94 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah terlihat capaian di perkotaan cenderung memiliki persentase lebih tinggi 5,02 persen dibandingkan di perdesaan yang hanya 67,05 persen.



Sumber: Susenas Maret (2020) BPS pada Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 31. Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2020**

### 7. Stunting pada Balita

Kejadian balita *stunting* (pendek dan sangat pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia termasuk Gorontalo. *Stunting* pada balita adalah kondisi

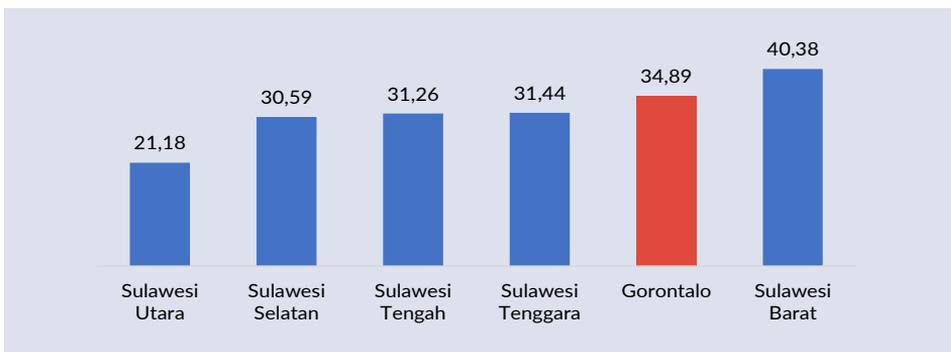
kurang gizi kronis pada anak berusia 0-59 bulan yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Anak disebut *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Indikator ini bermanfaat untuk membantu dalam mendiagnosa kondisi kesehatan dari balita serta memberikan pengetahuan pentingnya pemberian gizi. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Terintegrasi (SSGBI) oleh Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019, diketahui bahwa persentase *stunting* Gorontalo tahun 2019 sebesar 34,89 persen. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 32,50 persen.



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2019

**Gambar 32. Persentase Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) di Provinsi Gorontalo, 2015-2019**

Jika dibandingkan provinsi-provinsi se-Sulawesi, persentase *stunting* tertinggi pada tahun 2019 terdapat di Provinsi Sulawesi Barat (40,38 persen), Gorontalo (34,89 persen) dan Sulawesi Tenggara (31,44 persen). *Stunting* pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Selain itu anak yang mengalami *stunting* berisiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah.



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2019

**Gambar 33. Persentase Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) di Provinsi-Provinsi se-Sulawesi, 2019**

## E. Pekerja Anak

### 1. Angkatan Kerja

Profil anak pada bab ini mengacu pada definisi anak bekerja sebagai penduduk usia 10-17 tahun bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Pada kelompok umur 10-17 tahun. Terdapat pula anak yang termasuk dalam angkatan kerja. BPS mendefinisikan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja ( 15 tahun dan lebih), yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Gambar 34 memperlihatkan persentase penduduk laki-laki dan perempuan usia 10-17 tahun di perkotaan dan perdesaan yang termasuk angkatan kerja. Pada tahun 2020, anak usia 10-17 tahun yang termasuk angkatan kerja di Provinsi Gorontalo sebesar 13,59 persen, artinya 13 dari 100 anak usia 10-17 tahun sedang bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan dalam waktu seminggu terakhir. Persentase ini jauh berbeda untuk daerah perdesaan yang mencapai 15,62 persen bahkan untuk anak laki-laki di perdesaan angkanya jauh lebih tinggi yaitu mencapai 22,52 persen. Sedangkan persentase anak perempuan usia 10-17 tahun yang termasuk angkatan kerja lebih rendah dibandingkan anak laki-laki.



Sumber: Sakernas (2020) BPS pada Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 34. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2020**

### 2. Anak yang Bekerja di Gorontalo

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga.

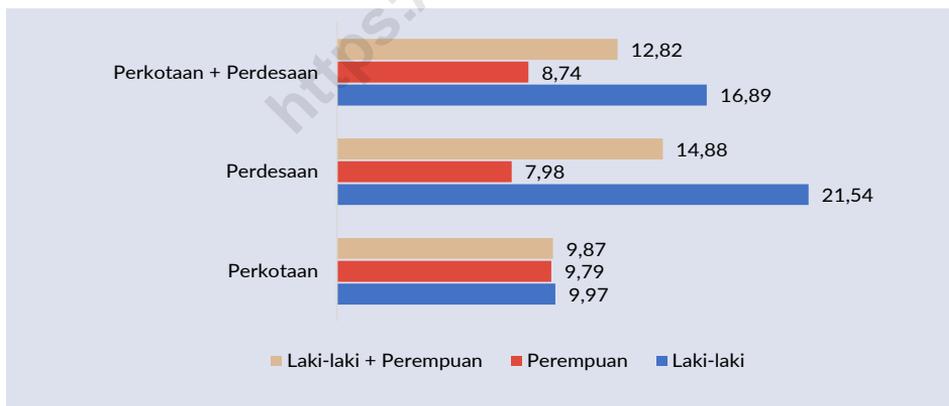
Keputusan Menteri dalam negeri dalam otonomi daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja

anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Pandemi Covid-19 tahun 2020 berdampak pada penambahan pekerja anak di Indonesia, utamanya rumah tangga yang rentan secara ekonomi. Tidak semua orang tua dan anak berpandangan anak yang bekerja sebagai pekerja anak, dikarenakan pemikiran anak bekerja merupakan bentuk pengembangan pribadi anak (Nurhadi, 2015).

Hingga tahun 2020, belum ada survei khusus pekerja anak sehingga dengan mengacu pada aturan-aturan yang telah disebutkan sebelumnya, konsep “pekerja anak” masih menggunakan pendekatan jam kerja dalam seminggu (Publikasi Pekerja Anak di Indonesia, 2009).

Selanjutnya data pekerja anak didekati dengan persentase anak yang bekerja, dimana BPS mendefinisikan anak yang bekerja sebagai anak yang melakukan minimal satu jam secara berturut-turut (tidak terputus) dalam periode seminggu yang lalu dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Angkatan kerja anak usia 10-17 tahun di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 mencapai 13,59 persen, dengan sebagian besar sudah bekerja. Persentase penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja sebanyak 12,82 persen. Selanjutnya 0,77 persen sisanya berstatus sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Padahal pada usia ini, anak-anak seharusnya masih fokus untuk bersekolah, namun 13 dari 100 anak usia 10-17 tahun di Provinsi Gorontalo harus bekerja.



Sumber: Sakernas (2020) BPS pada Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 35. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2020**

Dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase anak 10-17 tahun yang bekerja lebih banyak berada di daerah perdesaan yaitu mencapai 14,88 persen sedangkan di perkotaan persentasenya hanya sebesar 9,87 persen. Di daerah perkotaan persentase anak yang bekerja hampir sama baik anak laki-laki maupun perempuan yang masing-masing sebesar 9,97 persen dan 9,79 persen. Namun di daerah

perdesaan anak laki-laki yang bekerja mencapai 21,54 persen sedangkan untuk anak perempuan sebesar 7,98 persen.

### 3. Perbandingan Anak yang Bekerja se-Sulawesi

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi se-Sulawesi, persentase tertinggi anak 10-17 tahun yang bekerja terdapat pada provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 18,91 persen. Kemudian disusul oleh provinsi Sulawesi Barat (18,57 persen) dan Sulawesi Selatan (15,27 persen). Satu-satunya provinsi yang capaiannya di bawah nasional adalah Sulawesi Utara dengan persentase penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja hanya mencapai 7,87 persen.



Sumber: Sakernas (2020) BPS pada Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 36. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja di Provinsi-Provinsi se-Sulawesi, 2020**

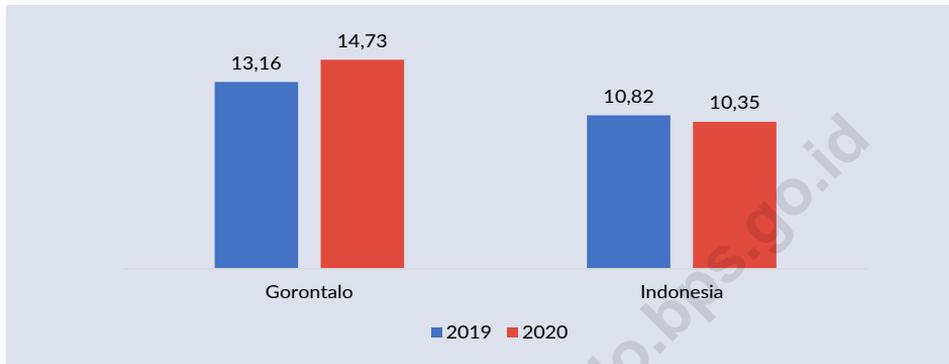
Permasalahan pekerja anak akan semakin pelik jika dibiarkan saja. Semakin hari semakin meningkat jumlah anak yang bekerja, jika tidak dilindungi oleh undang-undang, maka akan semakin besar pula peluang pengeksploitasi hak asasi anak dan memperbesar angka kemiskinan penduduk. Untuk mengatasi masalah pekerja anak dan anak putus sekolah, seyogyanya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak rakyat kecil, seperti menyediakan lapangan kerja, memberikan bekal keterampilan dan modal usaha yang dapat dikembangkan, misalnya melalui koperasi unit desa. Hal tidak kalah penting adalah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan (Nandi, 2006).

## F. Perkawinan Anak

### 1. Perkawinan Usia Anak di Gorontalo

Perkawinan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satunya pasangan yang berusia dibawah 18 tahun. Perkawinan anak merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia, salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak (BPS-Bappenas 2020). Pasal 26 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Terdapat beberapa faktor penyebab perkawinan usia anak, antara lain tingkat pendidikan yang rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja, dan kehamilan di luar nikah (Jones & Gubhaju ,2008).

Penurunan perkawinan anak merupakan salah satu indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (target 5.3), yaitu proporsi perempuan yang kawin sebelum usia 15 tahun dan sebelum 18 tahun. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai 14,37 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 13,16 persen, bahkan angka ini mencapai di atas angka nasional.

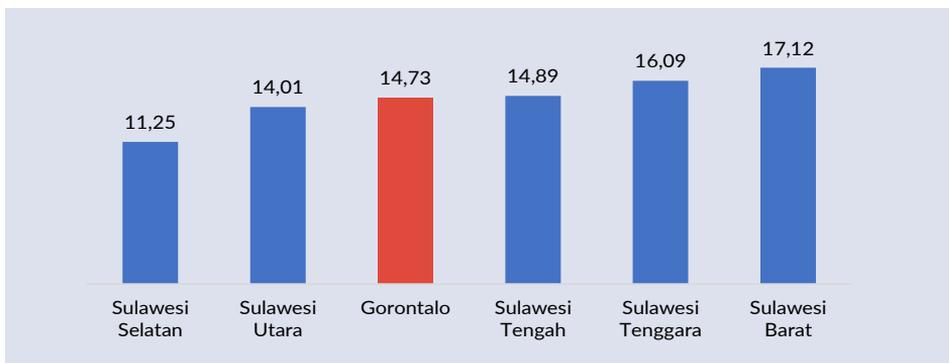


Sumber: Sakernas (2020) BPS pada Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 37. Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun, 2020**

## 2. Perkawinan Usia Anak di Kawasan Pulau Sulawesi

Tiga provinsi di kawasan pulau Sulawesi dengan persentase terendah perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun adalah Provinsi Sulawesi Selatan (11,25%), Provinsi Sulawesi Utara (14,01%) dan Provinsi Gorontalo (14,73%). Sementara persentase tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 17,12 persen.



Sumber: Sakernas (2020) BPS pada Lampiran Profil Anak Indonesia 2021

**Gambar 38. Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun, 2020**

Perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak. Pengantin anak sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih baik. Perkawinan bagi anak perempuan membuat mereka berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan remaja, meningkatkan risiko kematian dan cedera ibu dan bayi baru lahir (Unicef, 2019).

Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik pada akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak terbukti menjadi salah satu faktor risiko dari masalah kesehatan serta gizi ibu dan anak, tingkat pendidikan yang rendah, dan kekerasan dalam rumah tangga (Gibbs CM et al 2012; Raj A et al 2013; Brown G 2012; Peter A et al 2015). Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.

## G. Kesimpulan

1. Jumlah anak tahun 2020 sebanyak 358.553 jiwa atau 30,60 persen dari total penduduk Gorontalo.
2. Mempersiapkan anak sedini mungkin sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, utamanya untuk dapat memetik keuntungan dari bonus demografi dan upaya mitigasi dari penuaan populasi.
3. Pekerja anak dan perkawinan usia anak merupakan fenomena yang menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas anak. Pandemi Covid-19 yang menjadi katalis meningkatnya kedua tantangan tersebut. Untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, pemerintah terus berupaya mengentaskan kedua tantangan tersebut dengan berbagai kebijakan.
4. Orang tua memegang peranan penting dalam memastikan tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak anak serta dalam membentuk karakter anak. Orang tua dan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dari seorang anak.
5. Perencanaan dan persiapan yang matang dalam dunia pendidikan, dukungan kesehatan, serta terpenuhinya hak anak akan membentuk generasi yang berdaya saing dan menjadi investasi yang tidak ternilai bagi bangsa dimasa mendatang.

## Referensi

- Adioetomo, S.M., Pardede, L.P. (2020). Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini – Pembangunan Manusia: Pendekatan Daur Hidup Dalam Konteks Bonus Demografi, hal. 9, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, Jawa Barat.
- Aheniwati. (2019). Pengaruh Internet Bagi Anak. *Edukasia : Jurnal Pendidikan*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2019. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Kristen Satya Wacana
- Asseffa, N.A., Bukola, F., dan Ayodele, A. (2016). Determinants of Use of Health Facility for Childbirth in Rural Hadiya Zone, Southern Ethiopia.
- Bappenas. (2017). Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030.
- Bappenas. (2020). Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024.
- Badan Pusat Statistik. (2010). Publikasi Pekerja Anak di Indonesia 2009. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 2020. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020. BPS. Jakarta.
- BPS Provinsi Gorontalo. (2020). Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Agustus 2020. BPS. Gorontalo.
- BPS Provinsi Gorontalo. (2021). Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo 2020. BPS. Gorontalo.
- BPS Provinsi Gorontalo. (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2020. BPS. Gorontalo.
- BPS Provinsi Gorontalo. (2020). Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo [Online] Available at: <https://gorontalo.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3> [Accessed 6 Juni 2022]
- BPS Provinsi Gorontalo. (2021). Publikasi Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2021. BPS. Gorontalo.
- Cicik, L.H.M., Nugroho, D.N.A. (2021). Kondisi Lanjut Usia di Indonesia Era Bonus Demografi. *E-Journal Kementerian Sosial RI*.
- Darmayanti, Andia Kusuma. (2015). Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar Ditinjau Dari Pola Asuh Orang Tua. *Jurnal Psikovidya*, Vol. 20, No. 2 Tahun 2016. Universitas Wisnuwardhana Malang.
- Djama, N.T., Emilia, O., dan Hasanbasri, M. (2011). Pemanfaatan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan oleh Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 27, No.1 Tahun 2011.

- Gibbs, C.M., Wendt, A., Peters, S., dan Hogue C.J. (2012). The Impact of Early Age at First Childbirth on Maternal and Infant Health. *Paediatric and Perinatal Epidemiology*, Vol. 26 Tahun 2012.
- Hamal, M., Dieleman, M., Brouwere, V.D., dan Buning, T.D.C. (2020). Social Determinan of Maternal Health: A Scoping Review of Factors Influencing Maternal Mortality and Maternal Health Service Use in India
- Hartawan, I.M. (2020). Meningkatkan Perkembangan Nilai Moral Agama Anak Usia Dini Melalui Peran Aktif Orang Tua di TK Bina Putra. *Jurnal Pendidikan Agama Hindu*, Vol.1, No.2 Tahun 2020. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.
- Hastuti, B.W., Machfudz, S., dan Febriani, T.B.. (2015). Hubungan Pengalaman Menyusui dan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan Barukan, Kecamatan Manisreggo, Kabupaten Klaten. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, Vol.6, No.4, Tahun 2015. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.
- Hayes, A. (2014). The Mixed Blessing of Asias Growing Middle Class. "East Asia Forum Quarterly, 6(4), 23-26.
- Hurlock, E.B. (1980). *Perkembangan Anak*. Jakarta:Erlangga
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.
- Jones dan Gubhaju. (2008). Trends in Age at Marriage in Provinces of Indonesia, Asia Research Institute Working Paper No 105. Available at: [https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/Pidato%20Kepala%20BKKBN/Banjarmasin.MENCEGAH\\_PERKAWINAN\\_ANAK\\_MEL\\_PROG\\_KKBPK.pdf](https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/Pidato%20Kepala%20BKKBN/Banjarmasin.MENCEGAH_PERKAWINAN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK.pdf)
- Kelishadi, R. and Poursafa, P. (2010). Air Pollution and Non-Respiratory Health Hazards for Children. *Archives of Medical Science*, Vol.6 Tahun 2010.
- Khrist, G, Josefa . (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Manyaran, Kecamatan Semarang Barat. Artikel Penelitian. Semarang: Program Pendidikan Sarjana Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Universitas Diponegoro.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Profil Anak Indonesia 2021*. KPPA. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
- Kurnia, N., Wendratama, E., Adiputra, W.M., dan Poerwaningtias, I. (2019). Literasi Digital Keluarga: Teori dan Praktik Pendampingan Orangtua terhadap Anak dalam Berinternet. Gajah Mada University Press.
- Kustimah, abidin, dan Kusumawati. (2007). Gambaran kesiapan anak masuk sekolah dasar ditinjau dari hasil Test N.S.T (Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test): online. Fakultas Psikologi-Universitas Padjadjaran.
- Manisalidis, I., Stavropoulou, E., Stavropoulos, A., and Bezirtzoglou, E. (2020). Environmental and Health Impacts of Air Pollution : A Review. *Frontiers in Public Health*, Vol. 8 Tahun 2020.
- Muhson, A., Wahyuni, D., Supriyanto, dan Mulyani, E. (2012). Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja. *Jurnal Economia*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2012. Politeknik Kesehatan Aceh.

- Nandi. (2006). Pekerja Anak dan Permasalahannya. *Jurnal Geografi GEA*, Vol.6, No.1. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nurhadi. (2015). "Child Labour in Rual Indonesia : Children and Parents' Perspectives," University of York, Social Policy and Social Work.
- Kemendikbud. (2020). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Available at: <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/RENSTRA-KEMENDIKBUD-full-version.pdf>
- Papalia, D.E., Old, and S.W. Feldman, R.D. (2008). *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. Ahli Bahasa; A.K. Anwar
- Prawirohardjo, S. (2016). *Buku Ilmu Kebidanan Edisi 4*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Roesli, U. (2012). *Panduan Insiasi Menyusui Dini Plus ASI Eksklusif*. Jakarta: Pustaka Bunda.
- Rofiqoch,I., Effendi, J.S., dan Bratakoesoema, D.S. (2016). Hubungan Umur Ibu, Paritas dan Penolong Persalinan dengan Kematian Neonatal di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 3, No.1 Tahun 2016. Universitas Padjajaran.
- Tanjung I.C.D., Rohmawati, L., dan Sofyani, S. (2017). Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan Faktor yang Memengaruhi. *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 19, No. 2 Tahun 2017. Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara.
- Tsegay, Y., Gebrehiwot, T., Goicolea, I., Edin, K., and Lemma, H. (2013). Determinants of antenatal and delivery care utilization in Tigray region, Ethiopia: a cross-sectional study. *Internatioanal Journal For Equity in Health*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- UNICEF. (2019). *Low birthweight*. UNICEF.



# 3

## Profil Usia Produktif

- A. Penduduk Usia Produktif: Aktor dalam Agenda Pembangunan Nasional
- B. Tren Usia Produktif Gorontalo
- C. Kualitas Penduduk Usia Produktif Gorontalo
- D. Penduduk Usia Produktif Menjawab Peluang Ketenagakerjaan
- E. Penduduk Usia Produktif Menurut Generasi
- F. Kesimpulan



Tahun 2020, Provinsi Gorontalo masih berada pada bonus demografi (*windows of opportunity*). Hal ini ditandai rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berada di bawah 50% (44,15 persen).

# Profil Usia Produktif

**M**asa transisi demografi tengah dirasakan oleh Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan penurunan baik tingkat kelahiran maupun kematian penduduk. Penurunan tingkat kelahiran dan kematian ini menyebabkan perubahan komposisi kelompok umur penduduk. Komposisi kelompok umur yang menimbulkan benefit optimal ketika penduduk usia produktif menduduki persentase tertinggi. Kondisi ini juga sering disebut sebagai bentuk komposisi penduduk yang konstruktif. Bentuk piramida penduduk berdasarkan kelompok umur akan mengalami penggembungan di bagian tengah. Penduduk usia kerja akan mengalami peningkatan bahkan persentasenya mampu mengurangi rasio ketergantungan. Kejadian ini sering dilabeli dengan istilah bonus demografi atau *windows of opportunity*.

Bloom *et.al* (2003) dalam Kurniawati dan Sugiyanto (2021) menjelaskan bahwa terdapat tiga karakteristik *windows of opportunity*. *Pertama*, jika lebih banyak pekerja, akan lebih banyak output yang dihasilkan. *Kedua*, penambahan akumulasi kekayaan jika terdapat tabungan dan diinvestasikan untuk sesuatu yang produktif. *Terakhir*, persediaan modal manusia yang besar jika terdapat investasi yang tepat untuk meningkatkan modal manusia tersebut.

Sampai dengan tahun 2020, Provinsi Gorontalo masih berada pada *windows of opportunity* yang masih akan dirasakan hingga tahun 2023. Kondisi ini tergambar dalam hasil SP2020, rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif sebesar 44,15 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 44 penduduk dengan usia tidak produktif. Jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk (SP) pada tahun 2010 yang mencapai 55,29 persen maka rasio ketergantungan penduduk usia produktif mengalami penurunan yang signifikan, demikian dengan kondisi SP tahun 2000 yang mencapai 55,66 persen.

## A. Penduduk Usia Produktif: Aktor dalam Agenda Pembangunan Nasional

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah berkaitan dengan peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi serta ketenagakerjaan. Sebagaimana tersebut dalam tujuan SDGs ke-8, bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat diiringi dengan terbukanya kesempatan kerja yang produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (United Nation, 2019). Oleh karena itu, menjadi relevan ketika penyerapan tenaga kerja akan menjadi optimal apabila terdapat upaya dalam menangkap jendela peluang dari bonus demografi.

Bonus demografi menggambarkan tingginya tingkat penawaran tenaga kerja di suatu wilayah. Hal tersebut terjadi akibat proses transisi demografi karena

penurunan fertilitas dan mortalitas dalam jangka panjang. Implikasinya adalah terjadi penurunan rasio ketergantungan akibat penurunan proporsi penduduk non produktif dan peningkatan penduduk yang masuk usia kerja (produktif). Kondisi tersebut menyebabkan beban seseorang yang berada pada usia produktif dalam menanggung usia non produktif semakin kecil. Dalam literatur studi kependudukan disebutkan bahwa suatu daerah dianggap menikmati bonus demografi ketika rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berada di bawah 50%.

Bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan jendela peluang (*windows of opportunity*) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adioetomo, 2012 dalam Setiawan, 2018). Jendela peluang tersebut timbul akibat adanya ketersediaan modal kapital yang akan berimbas terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Smith (2012) menyebutkan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi yang pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan output atau hasil. Pertumbuhan ekonomi yang cepat lantas mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara drastis. Namun, dampak positif akibat dari bonus demografi dapat tercipta jika diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada level provinsi, waktu berlangsungnya bonus demografi berbeda-beda antar wilayah. Puncak dari bonus demografi akan menjadi kesempatan emas apabila seluruh penduduk yang masuk dalam usia kerja dapat terserap masuk ke dalam pasar kerja. Namun, apabila penawaran tenaga kerja tidak diimbangi dari sisi permintaan yang memadai maka bisa menjadi bencana. Penduduk yang masuk ke dalam usia kerja tidak mendapatkan pekerjaan, menambah jumlah pengangguran dan akan menjadi beban.

## B. Tren Usia Produktif Gorontalo

### 1. Penduduk Usia Produktif

William H. Frey mengelompokkan penduduk ke dalam beberapa generasi, penggolongan kelompok penduduk dibagi berdasarkan beberapa generasi. Adapun menurut OECD (2021), penduduk usia produktif ialah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Apabila dilihat dari penggolongan kelompok umur dari William H. Frey, maka penduduk usia produktif mencakup: sebagian generasi Z (15-23 Tahun); seluruh generasi Y; seluruh generasi X; serta sebagian generasi Baby Boomer (56-64 Tahun). Semakin banyaknya penduduk usia produktif menunjukkan potensi jumlah penduduk yang mampu atau siap bekerja di suatu wilayah.

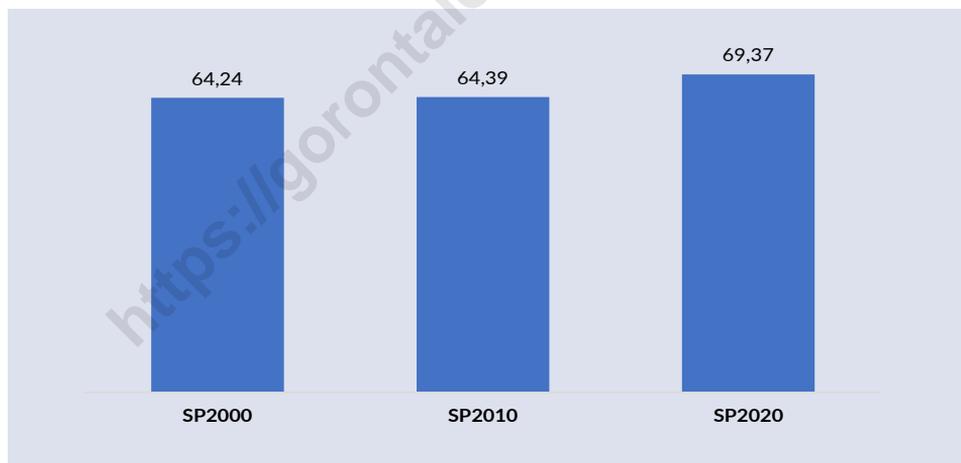
**Tabel 1. Kalasifikasi Generasi menurut Wiliam H.Frey**

No.	Generasi	Tahun Lahir	Usia Tahun 2020
1	Post Generasi Z	2013-sekarang	0-7 Tahun
2	Generasi Z	1997-2012	8-23 Tahun
3	Generasi Y (Milenial)	1981-1996	24-39 Tahun
4	Generasi X	1965-1980	40-55 Tahun
5	Generasi Baby Boomer	1946-1964	56-74 Tahun
6	Generasi Pre-Boomer	Sebelum Tahun 1945	75+ Tahun

Sumber: Pengklasifikasian Wiliam H.Frey analysis of Census Bereau Population Estimates (25 June, 2020)

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Gorontalo terus meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 64,39 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 69,37 persen di tahun 2020.

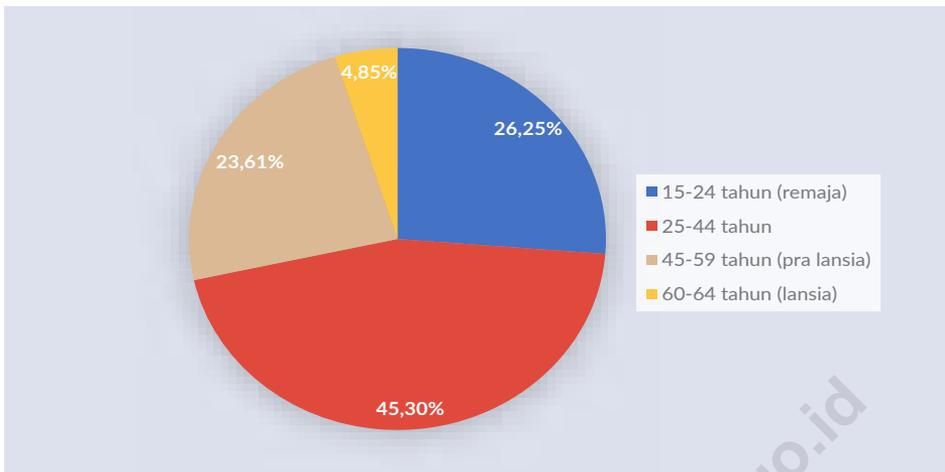
Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo masih berada pada jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi. Kondisi ini ditandai dengan struktur penduduk produktif (15-64 tahun) yang mendominasi di Provinsi Gorontalo atau di atas 50 persen. Berdasarkan perhitungan Proyeksi Penduduk dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, puncak terjadinya bonus demografi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 di mana persentase penduduk usia produktif mencapai titik tertinggi pada 69,43 persen. Puncak persentase penduduk usia produktif masih bisa dirasakan hingga tahun 2023 karena belum terjadi penurunan yang signifikan. Namun puncak bonus demografi akan terus menurun seiring bertambahnya tahun. Apabila kondisi tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka Provinsi Gorontalo dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: SP2000, SP2010, SP2020

**Gambar 1. Persentase Penduduk Usia Produktif Provinsi Gorontalo, 2000, 2010, dan 2020**

Apabila penduduk usia produktif dipartisi menurut kelompok umur menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo berada pada kelompok umur 25-44 tahun (45,30 persen). Persentase terbesar kedua yaitu penduduk usia produktif yang masuk usia remaja (15-24 tahun) yaitu sebesar 26,25 persen. Persentase penduduk usia produktif yang memasuki pralansia (45-59) tahun sebanyak 23,61 persen. Serta terdapat 4,85 persen penduduk usia produktif yang masuk pada kelompok umur lansia (60-64 tahun).

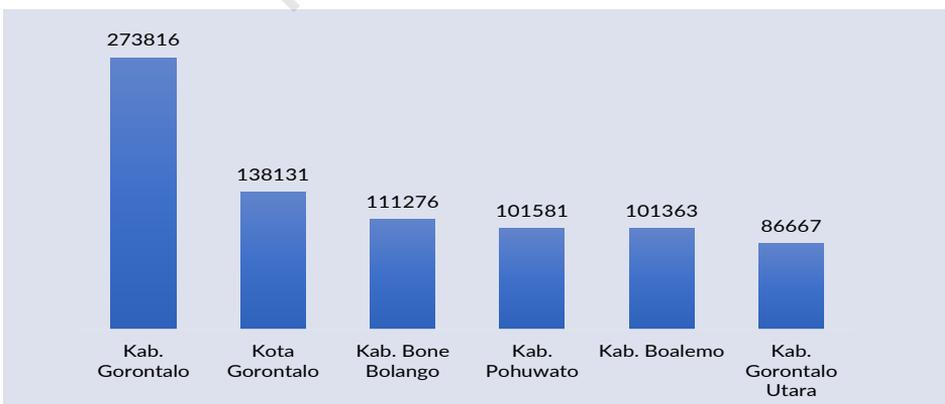


Sumber: SP2020

**Gambar 2. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur di Provinsi Gorontalo (persen), 2020**

## 2. Sebaran Penduduk Usia Produktif

Pada level Kabupaten/Kota, penduduk usia produktif paling banyak berada di Kabupaten Gorontalo. Yaitu, sebanyak 273,81 ribu jiwa atau 33,69 persen dari total penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 berada di Kabupaten Gorontalo. Kondisi tersebut merupakan keuntungan dari sisi demografi. Apabila dilihat dari sisi ketenagakerjaan, maka akan menjadi keuntungan apabila semua penduduk yang masuk dalam usia kerja berstatus bekerja (*full employment*). Sebaliknya, apabila penduduk usia kerja yang melimpah tidak dapat terserap dengan baik di pasar kerja, maka jumlah pengangguran akan meningkat.



Sumber: SP2020

**Gambar 3. Sebaran Penduduk Usia Produktif Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2020**

Sebaran penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo sejalan dengan sebaran penduduk secara total, dimana Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten

dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, Kota Gorontalo merupakan wilayah dengan jumlah penduduk usia produktif kedua terbesar dan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut tampak dari persentase penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota.

**Tabel 2. Persentase Penduduk Usia Produktif Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
1	Kab. Boalemo	101.363	69,49
2	Kab. Gorontalo	273.816	69,65
3	Kab. Pohuwato	101.581	69,37
4	Kab. Bone Bolango	111.276	68,36
5	Kab. Gorontalo Utara	86.667	69,36
6	Kota Gorontalo	138.131	69,57
	<b>Total</b>	<b>812.834</b>	<b>69,37</b>

Sumber: SP2020

## C. Kualitas Penduduk Usia Produktif Gorontalo

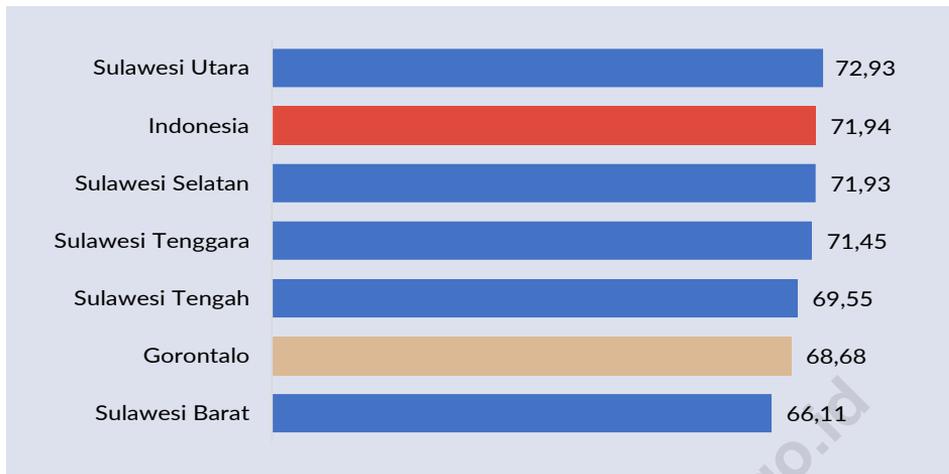
### 1. Situasi Pembangunan Manusia di Gorontalo

Pembentukan modal manusia merupakan hal yang tidak bisa digantikan. Sumber Daya Alam serta modal fisik lainnya merupakan sumbangan awal untuk pertumbuhan di suatu wilayah yang bersifat pasif. Di sisi lain, manusia merupakan agen aktif yang akan mengakumulasikan modal, melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, politik, hingga meneruskan pembangunan di suatu wilayah.

Selanjutnya, muncul pendapat bahwa pembangunan pada suatu wilayah idealnya tidak hanya diukur dari capaian fisik. Akan tetapi, juga dari sudut pandang sumber daya manusianya. Konsep tersebut pertama kali digagas oleh United Nations Development Programme (UNDP). Dimana suatu pembangunan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga menekankan pada pentingnya pembangunan berdasarkan pencapaian rata-rata dalam dimensi pembangunan manusia.

Indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mampu merepresentasikan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan terutama dalam hal kemampuannya memperoleh kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (daya beli). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Capaian pembangunan manusia Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang sebesar 68,68 masuk dalam kategori IPM “sedang” (capaian  $60 \leq \text{IPM} < 70$ ). Menduduki urutan ke-2 terbawah dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Dari total 6 provinsi di Pulau Sulawesi, terdapat 3 provinsi dengan status capaian IPM “sedang”. Di sisi lain, sebanyak 3 provinsi telah masuk kategori IPM “tinggi” (capaian  $70 \leq \text{IPM} < 80$ ).



Sumber: BPS, 2020

**Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se-Pulau Sulawesi, 2020**

Jika dilihat berdasarkan komponen penyusun IPM, maka komponen IPM Provinsi Gorontalo yang memiliki angka di bawah angka rata-rata Indonesia yaitu dimensi pendidikan yang diwakili oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dimensi kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan pengeluaran riil per kapita.

Pada tahun 2020, pandemi Covid 19 berdampak pada pertumbuhan IPM Gorontalo yang mengalami perlambatan sebesar 0,28 poin. Komponen penyusun IPM Gorontalo tahun 2020 yang mengalami penurunan yakni pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Adapun komponen IPM tahun 2020 yang tumbuh namun melambat yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata lama Sekolah.

**Tabel 3. Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020**

Provinsi	Komponen IPM Tahun 2020				IPM
	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
Indonesia	12,98	8,48	71,47	11.013	71,94
Gorontalo	13,08	7,82	68,07	10.020	68,68
Boalemo	12,44	6,82	69,07	8.789	65,91
Gorontalo	13,17	7,13	67,58	9.277	66,92
Pohuwato	12,37	7,12	64,07	10.255	65,37
Bone Bolango	13,57	8,31	69,46	10.052	69,98
Gorontalo Utara	12,45	7,03	65,87	8.921	64,86
Kota Gorontalo	13,34	10,36	72,49	12.278	77,13

Sumber: BPS

Secara umum pembangunan manusia di Gorontalo tidak terjadi ketimpangan yang signifikan antar kabupaten/kota. Tingkat disparitas IPM kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo menempati posisi keempat terkecil di Indonesia. Kondisi ini mungkin terjadi karena luas wilayah Provinsi Gorontalo yang tidak terlalu besar. Namun, Kota Gorontalo merupakan satu-satunya wilayah yang capaian IPM masuk ke dalam kategori “tinggi”, sedangkan lima wilayah lainnya masih dalam kategori “sedang”. Seluruh komponen penyusun IPM Kota Gorontalo tahun 2020 juga menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan nilai komponen penyusun IPM Indonesia. Hal ini menandakan bahwa pembangunan manusia di lima kabupaten lain perlu ditingkatkan.

## 2. Tingkat Daya Saing Tenaga Kerja di Gorontalo

Salah satu agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu indikator sosial yang dapat menggambarkan perkembangan SDM dapat dilihat melalui sejauh mana kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tenaga kerja yang mumpuni dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi yang dilihat dari kemapanan ekonomi yang akan memberikan efek dan kekuatan bagi pembangunan secara umum. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Chisholm dan Kovacheva, (2002), jika tenaga kerja dapat melakukan kegiatan yang produktif, ketika kondisi ekonominya tidak mendukung, maka hal ini menyebabkan mudah untuk jatuh dalam kemiskinan yang pada akhirnya memberikan manfaat pada proses pembangunan. Oleh karena itu, salah satu modal unggul dalam mencapai keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat melalui indikator tenaga kerja berkualitas.



Sumber: Kemnaker, 2021

**Gambar 5. Indeks Daya Saing Tenaga Kerja Menurut Provinsi se-Pulau Sulawesi, 2021**

Tenaga kerja yang berkualitas dapat dilihat dari seberapa besar daya saing yang dimiliki. Berdasarkan Indeks Daya Saing Tenaga Kerja yang dihitung oleh Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2021, Gorontalo menduduki posisi ke 24 dari 34 provinsi dengan nilai indeks sebesar 51,74. Indeks Daya Saing Tenaga Kerja Gorontalo juga menduduki posisi ke dua terbawah dari enam provinsi di Sulawesi. Secara garis besar, hal ini menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja di Gorontalo

masih cukup rendah. Indeks Daya Saing Tenaga Kerja dibentuk dari tiga dimensi, yaitu dimensi pemberdayaan angkatan kerja, dimensi kualitas tenaga kerja, dan dimensi kompensasi dan produktivitas. Dari ketiga pembentuk dimensi tersebut, dimensi terendah Gorontalo yaitu pada dimensi kompensasi dan produktivitas sedangkan dimensi pemberdayaan angkatan kerja mendapatkan nilai yang paling tinggi.

**Tabel 4. Produktivitas Tenaga Kerja Gorontalo menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun), 2018-2020**

Wilayah	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)		
	2018	2019	2020
Provinsi Gorontalo	46,91	49,63	49,99
Boalemo	41,40	43,15	44,23
Gorontalo	44,66	49,06	49,29
Pohuwato	56,35	58,19	56,47
Bone Bolango	39,59	42,21	43,55
Gorontalo Utara	38,98	42,94	42,91
Kota Gorontalo	60,39	60,07	60,84
Indonesia	82,56	85,04	83,47

Sumber: Kemnaker, 2021

Produktivitas tenaga kerja Gorontalo memiliki nilai yang masih jauh dari rata-rata Indonesia. Tahun 2018 hingga 2020, produktivitas tenaga kerja Indonesia berkisar 82 hingga 85 persen. Adapun produktivitas tenaga kerja Gorontalo hanya berkisar sekitar 46 hingga 49 persen. Kota Gorontalo memberikan kontribusi yang paling besar yaitu 60,84 persen pada tahun 2020 selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Pohuwato dengan nilai 56,47 persen. Adapun Kabupaten Gorontalo Utara memiliki produktivitas terkecil pada tahun 2020 yaitu 42,91 persen. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi menunjukkan daya saing tenaga kerja yang baik sehingga mampu meningkatkan penawaran tenaga kerja. Namun, penawaran tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan justru dapat menyebabkan tenaga kerja jatuh dalam kubang pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran terdiri dari penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha/ tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan meraka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja (BPS, 2020).

Selama satu dekade terakhir, TPT Gorontalo mengalami perbaikan. Tercatat, tahun 2010 TPT Gorontalo mencapai 5,16 persen dan lambat laun mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 mencapai 4,28 persen. Bahkan, persentase TPT Gorontalo lebih rendah dibandingkan TPT Indonesia secara umum.



Sumber: Sakernas, BPS

**Gambar 6. TPT Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2010-2020**

Untuk menganalisis lebih lanjut, kondisi ketenagakerjaan di Gorontalo juga dapat dilihat dari tenaga kerja formal. Tenaga kerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai. Pekerja formal dipandang sebagai status pekerjaan yang layak dengan tingkat upah yang lebih besar dan risiko pemberhentian kerja yang kecil.

Pekerja formal terdiri dari pekerja dengan status pekerjaan utama sebagai buruh/ karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Sebaliknya, tenaga kerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, pekerja keluarga/ tidak dibayar, serta pekerja bebas di pertanian dan non pertanian, dikategorikan sebagai pekerjaan informal. Pekerjaan informal menyiratkan risiko tertentu karena pekerja sektor informal secara umum memiliki pendapatan yang lebih rendah dan tidak stabil. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki pekerjaan informal tidak memiliki akses ke perlindungan dan layanan dasar.

Semakin tinggi besaran tenaga kerja formal menunjukkan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja (buruh/karyawan/pegawai) secara tetap di Gorontalo. Dengan kata lain, semakin tinggi besaran tenaga kerja formal di Gorontalo juga menunjukkan keberlanjutan suatu usaha dapat bertahan dengan waktu yang cukup lama.

Kondisi tenaga kerja formal di Gorontalo selama enam tahun terakhir masih berfluktuatif di kisaran 37 hingga 41 persen. Sedangkan, persentase tenaga kerja formal Indonesia cenderung lebih tinggi yaitu berkisar antara 39 hingga 44 persen. Hal ini dapat mengonfirmasi sektor kegiatan mana yang mendominasi dalam perekonomian di Gorontalo. Persentase tenaga kerja formal yang masih sedikit di Gorontalo juga sejalan dengan waktu bekerja yang kurang dari 15 jam seminggu. Tenaga kerja yang bekerja di sektor formal cenderung memiliki waktu kerja yang lebih lama dibandingkan di sektor informal. Kondisi tersebut dapat tergambarkan dari Tingkat Setengah Pengangguran (*underemployment*).

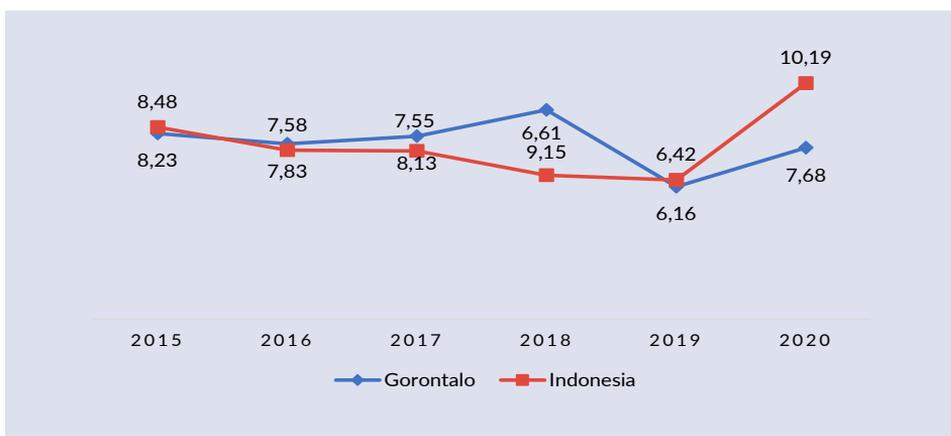


Sumber: Sakernas, BPS

**Gambar 7. Tenaga Kerja Formal Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2015-2020**

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah penduduk yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Tingkat setengah penganggur merupakan persentase jumlah setengah penganggur terhadap total penduduk yang bekerja (BPS, 2021). Setengah pengangguran Gorontalo pada tahun 2015-2020 berkisar antara 6 hingga 8 persen per tahunnya. Artinya dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja maka terdapat sekitar 6 hingga 8 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan.

Kondisi setengah pengangguran Indonesia cenderung memiliki pola yang sama dengan Gorontalo. Secara umum, persentase setengah pengangguran Indonesia memiliki angka lebih tinggi yaitu berkisar antara 6 hingga 10 persen. Namun baik Indonesia maupun Gorontalo memiliki kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid 19.



Sumber: Sakernas, BPS

**Gambar 8. Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2015-2021**

## D. Penduduk Usia Produktif Menjawab Peluang Ketenagakerjaan

Penduduk usia produktif dianggap sebagai bagian terpenting dari penduduk yang ikut andil dalam ketenagakerjaan. Mereka dianggap sudah mampu untuk mempunyai beban dalam menanggung hidup penduduk yang masuk kategori penduduk belum produktif dan non produktif. Kondisi ini disebabkan karena penduduk usia produktif dianggap sudah mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam proses produksi. Penduduk usia produktif menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penduduk usia produktif menjadi peluang ketenagakerjaan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bonus demografi untuk membantu meringankan beban hidup seseorang (BKKBN, 2014).

Potensi penduduk usia produktif di Gorontalo dalam ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator tersebut menggambarkan kondisi penduduk yang berusia 15-64 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja. Sehingga, dapat diperoleh gambaran mengenai besarnya pesertase penduduk usia 15-64 tahun yang aktif secara ekonomi. Semakin besarnya nilai TPAK menunjukkan semakin tinggi pasokan tenaga kerja usia produktif yang tersedia di suatu wilayah untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (BPS, 2021).

### 1. Pasar Tenaga Kerja Usia Produktif Gorontalo

TPAK penduduk usia produktif provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir Provinsi Gorontalo berada di posisi ke lima dari tujuh provinsi. Posisi tersebut menunjukkan pasokan tenaga kerja usia produktif di Gorontalo belum sebesar provinsi lainnya, khususnya jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat yang menduduki posisi pertama.

TPAK Gorontalo tahun 2020 sebesar 68,87 persen. Artinya, sedikitnya tujuh dari sepuluh penduduk usia produktif siap masuk pasar kerja. Nilai tersebut juga menunjukkan perbedaan selisih hampir lima persen dengan TPAK Sulawesi Barat tahun 2020 yang sudah mencapai 71,85 persen. Perbedaan selisih nilai TPAK diantara kedua provinsi tersebut terjadi lebih dalam pada sepuluh tahun lalu. TPAK Gorontalo tahun 2010 yang hanya sebesar 66 persen menunjukkan perbedaan hampir tujuh persen di tahun yang sama pada Sulawesi Barat.

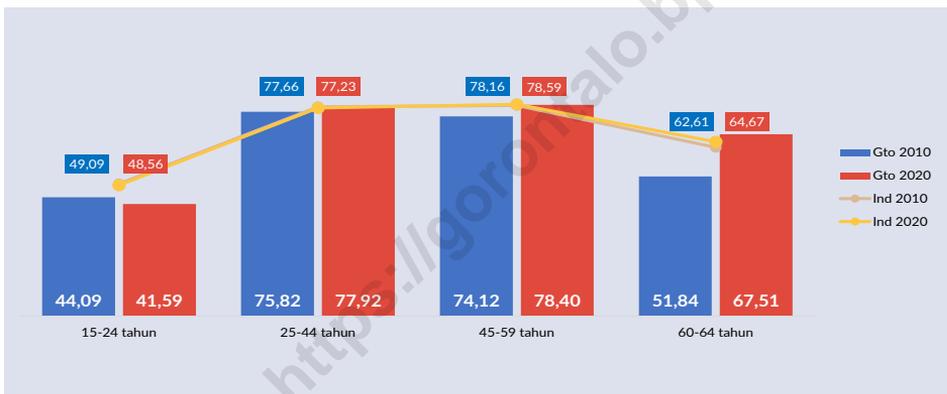


Sumber: Sakernas, BPS

**Gambar 9. TPAK Penduduk Usia Produktif Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2010 & 2020**

Walaupun kondisi TPAK usia produktif Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sulawesi kurang menonjol, namun jika dilihat lebih dalam, Provinsi Gorontalo memiliki TPAK usia produktif yang berkembang paling pesat. Hal ini ditunjukkan dari selisih TPAK usia produktif Gorontalo diantara 2010 dan 2020. Peningkatan Gorontalo yang mencapai 2,87 persen merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Sulawesi. Bahkan, jika dibandingkan dengan Sulawesi Barat dengan notabene provinsi yang memiliki TPAK usia produktif tertinggi justru menunjukkan penurunan sebesar -0,92 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Apabila diamati TPAK usia produktif penduduk Gorontalo yang dikelompokkan berdasarkan umur, secara umum TPAK usia produktif Gorontalo masih berada di bawah angka nasional dan memiliki pola akan meningkat seiring peningkatan kelompok umur. Tingkat partisipasi penduduk pada kelompok umur 15-24 tahun pada 2020 sebesar 41,59 persen. Rendahnya angka partisipasi kerja pada kelompok ini mengindikasikan masih sedikitnya mereka yang berpartisipasi dalam pasar kerja yang dapat diakibatkan oleh banyaknya penduduk yang bersekolah.



Sumber: Sakernas, BPS

**Gambar 10. TPAK Penduduk Usia Produktif menurut Kelompok Umur di Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2010 & 2020**

TPAK penduduk usia produktif paling tinggi terjadi pada kelompok umur 45-59 tahun pada tahun 2020 yang mencapai 78,40 persen, dan kembali menurun pada kelompok umur 60-64 tahun. Pola yang semakin menurun tersebut menggambarkan seiring bertambahnya umur maka tenaga kerja semakin tidak produktif. Tahun 2010 juga menunjukkan pola yang serupa dengan TPAK penduduk usia produktif tertinggi terjadi pada kelompok umur 25-44 tahun.

Pentingnya kesempatan kerja yang lapang pun tertuang pada salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) (Tujuan ke-8) yaitu “meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua”. Pasokan tenaga kerja usia produktif selayaknya diimbangi dengan luasnya kesempatan kerja yang memadai. Dengan terbukanya kesempatan kerja khususnya pada penduduk usia produktif, maka dapat menurunkan jumlah orang menganggur, meningkatkan produktivitas penduduk, dan meningkatkan produksi serta pendapatan nasional.

Kesempatan kerja atau permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*) dari permintaan terhadap produk barang dan jasa (Situmorang, 2005:1).

Pentingnya kesempatan kerja dinyatakan dengan baik oleh Kristianto dalam Tjiptoherijanto, et al. (1982:145) dengan lima hal. Pertama, penciptaan lapangan kerja serta pembayaran upahnya mungkin merupakan satu-satunya mekanisme yang dapat membagi kembali pendapatan kepada mereka yang sebelumnya tanpa pekerjaan. Kedua, pengangguran (*unemployment*) adalah demoralizing, seseorang yang tanpa pekerjaan dapat hilang harga dirinya. Ketiga, pada hakekatnya bekerja adalah baik, apapun dampaknya pada semangat (*morale*), harga diri atau perasaan lainnya. Keempat, akan muncul keresahan sosial-politik jika sejumlah besar penduduk tidak memperoleh pekerjaan. Kelima, setiap tahun akan muncul sejumlah besar pencari kerja baru. Akan tetapi, untuk memperluas kesempatan kerja, industri atau usaha besar pun dapat diarahkan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknologi yang dapat menyerap sejumlah besar tenaga kerja atau bersifat padat karya (*labor intensive*).

Tingkat kesempatan kerja (TKK) penduduk produktif di Gorontalo tahun 2020 mencapai 95,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang yang merupakan angkatan kerja, terdapat sekitar 95 hingga 96 penduduk usia produktif yang bekerja. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan sepuluh tahun silam dimana TKK Gorontalo hanya mencapai 94,79 persen. Bahkan kondisi TKK Gorontalo juga lebih baik jika dibandingkan dengan nasional. Tercatat, TKK Indonesia tahun 2020 justru mengalami penurunan dari 92,58 persen hingga 92,69 persen pada sepuluh tahun sebelumnya.



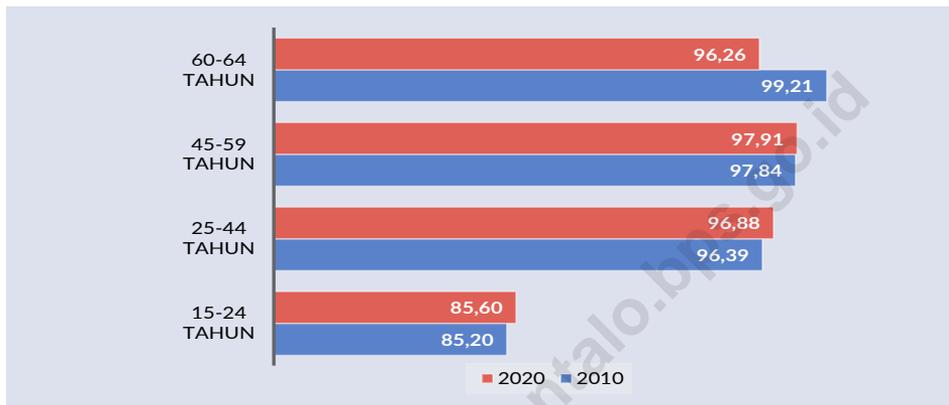
Sumber: Sakernas, BPS

### Gambar 11. TKK Penduduk Usia Produktif di Provinsi Gorontalo, 2010-2020

Tingkat kesempatan kerja di Gorontalo menunjukkan bahwa angka perdesaan baik tahun 2020 maupun 2010 lebih besar dibandingkan angka perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan kerja di daerah perkotaan lebih terbatas dibandingkan daerah perdesaan sehingga tidak mampu menyerap semua angkatan kerja yang tersedia. Selain itu, lapangan kerja yang tersedia di daerah perkotaan umumnya didominasi oleh sektor ekonomi yang mengutamakan tingkat pendidikan atau keterampilan tertentu, sementara tingkat pendidikan pasokan

tenaga kerja yang tersedia masih tergolong rendah dan terbatas. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah seolah tidak memiliki pilihan banyak dalam menentukan lapangan usaha yang digeluti (BPS, 2021).

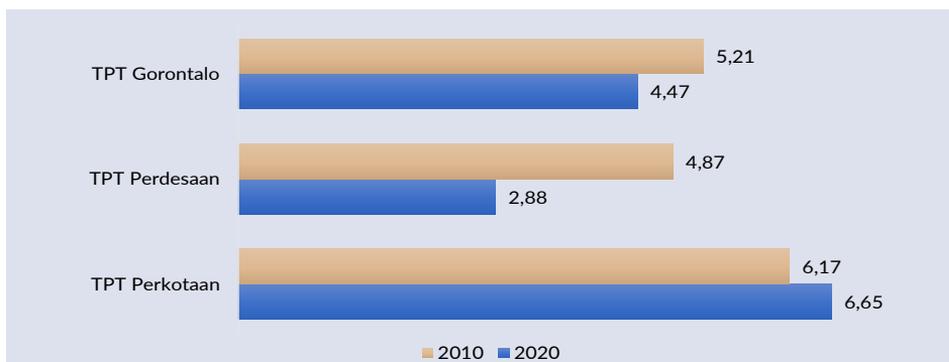
Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tidak signifikan berbeda kecuali pada kelompok umur 15-24 tahun. TKK pada kelompok umur tersebut hanya mencapai 85,60. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang yang merupakan angkatan kerja, terdapat sekitar 85 hingga 86 penduduk usia produktif yang bekerja.



Sumber: Sakernas, BPS

**Gambar 12. TKK Penduduk Usia Produktif menurut Kelompok Umur di Provinsi Gorontalo, 2010 & 2020**

Tingkat kesempatan yang luas berkesempatan untuk mengurangi beban pengangguran pada suatu wilayah. Tingkat pengangguran penduduk usia produktif Gorontalo tahun 2020 mencapai 4,47 persen. Artinya, dari seluruh angkatan kerja penduduk usia produktif di Gorontalo tahun 2020 terdapat 4,47 persen yang tidak terserap ke dalam pasar kerja atau menjadi pengangguran terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan sepuluh tahun silam di mana tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,21 persen.



Sumber: Sakernas, BPS

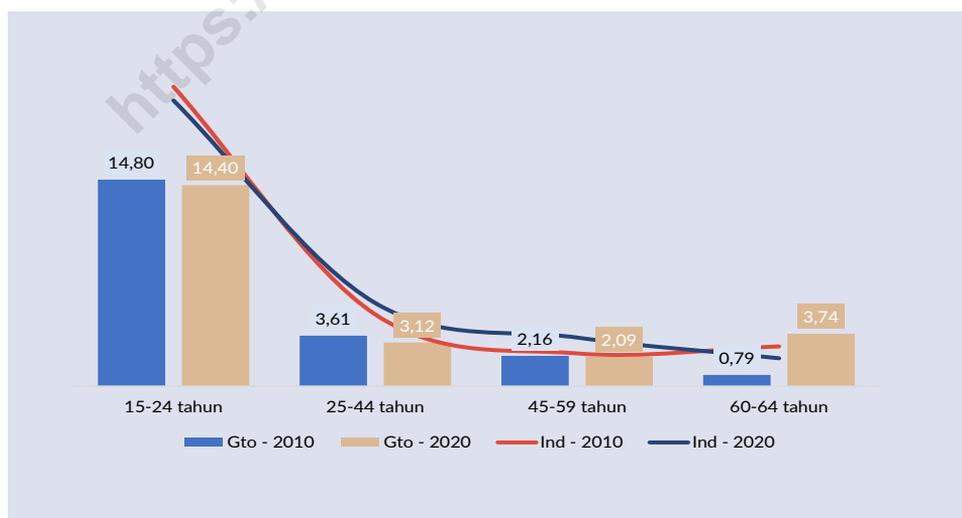
**Gambar 13. TPT Penduduk Usia Produktif di Provinsi Gorontalo, 2010 & 2020**

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. TPT merupakan indikator yang sangat informatif yang dapat menggambarkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kesenjangan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Berdasarkan tempat tinggal, TPT penduduk usia produktif di wilayah perkotaan Gorontalo baik tahun 2020 maupun 2010 lebih besar dibandingkan di perdesaan. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi terjadinya kesenjangan perkotaan dan perdesaan yaitu kesempatan kerja di perkotaan tidak mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia. Secara umum, kesempatan kerja di perkotaan masih mengutamakan tingkat pendidikan atau keterampilan khusus, sedangkan pasokan tenaga kerja yang tersedia belum memenuhi kondisi tersebut. Selain itu, kondisi tersebut juga didukung dengan kurangnya ketersediaan lowongan pekerjaan yang sedikit di perkotaan.



Sumber: Sakernas, BPS

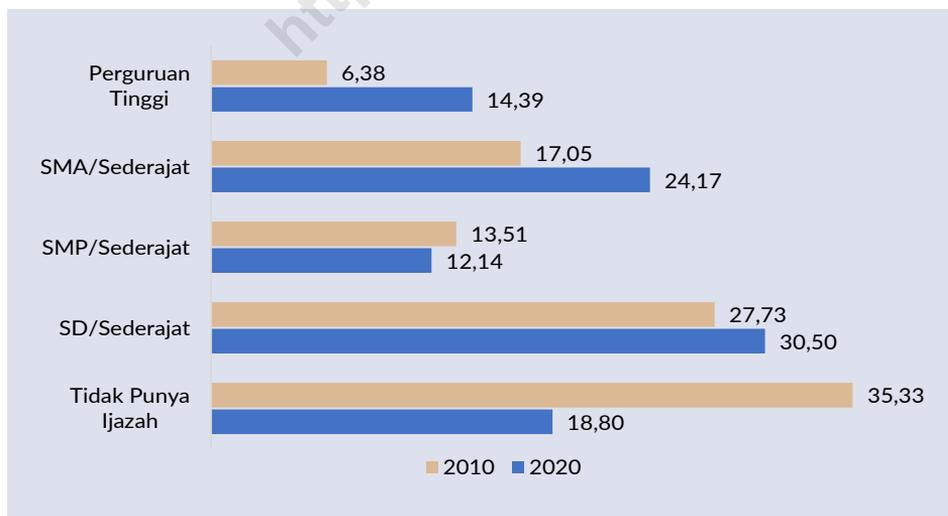
**Gambar 14. TPT Penduduk Usia Produktif menurut Kelompok Umur di Provinsi Gorontalo, 2010 & 2020**

TPT usia produktif di perkotaan Gorontalo pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010. Salah satu faktor yang sangat mungkin mempengaruhi kondisi tersebut yaitu pandemi Covid-19 yang terjadi. Namun tidak dipungkiri juga bahwa banyak faktor lain yang relatif berpengaruh terhadap peningkatan nilai TPT tersebut, seperti adanya mismatching pelatihan/Pendidikan vokasi terhadap kebutuhan perusahaan, minimnya akses informasi di masyarakat, hingga faktor budaya dan adat-istiadat yang ada di masyarakat, maupun faktor lainnya. Sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan faktor-faktor tersebut.

Adapun jika diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur, pengangguran terbuka di Gorontalo memiliki pola berbentuk seperti Huruf J terbalik. Pola tersebut terjadi baik tahun 2020 maupun 2010. Hal ini menandakan bahwa pengangguran terbuka di Gorontalo paling tinggi terjadi pada usia paling muda yaitu 15-24 tahun, kemudian menurun pada kelompok umur 25-44 tahun dan 45-59 tahun, dan meningkat sedikit pada usia 60-64 tahun. Kondisi tersebut mencerminkan masalah pengangguran yang utama adalah pengangguran usia muda (*youth unemployment*).

## 2. Tantangan Ketenagakerjaan

Penduduk usia produktif menghadapi tantangan yang besar dalam sektor ketenagakerjaan. Salah satu tantangan yang dihadapi pada penduduk usia tersebut yaitu minimnya kesempatan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja muda akibat dari jenjang pendidikan yang belum tinggi, belum terampilnya tenaga kerja muda dan harus bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis. Sebagaimana yang tertulis pada artikel di Indonesia Investments, mahasiswa yang baru lulus dari universitas dan siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan menemukan pekerjaan di pasar kerja. Semakin tinggi pendidikannya semakin rendah partisipasinya dalam kekuatan tenaga kerja.



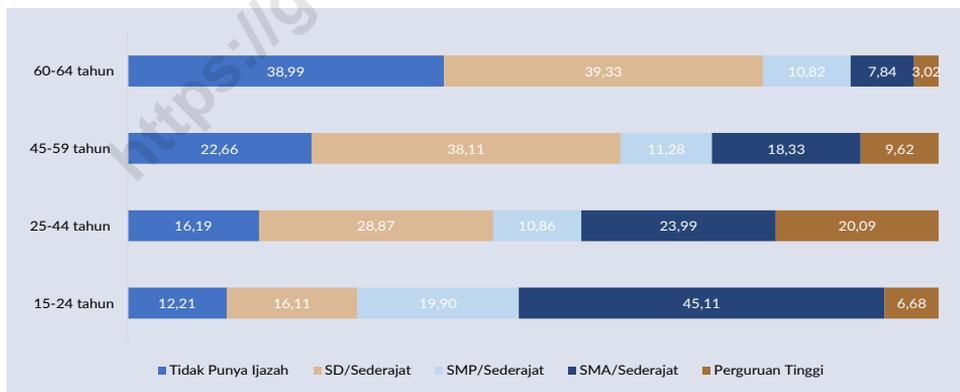
Sumber: Sakernas, BPS

**Gambar 15. Persentase Tenaga Kerja Usia Produktif Provinsi Gorontalo menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2010 & 2020**

Tenaga kerja usia produktif di Provinsi Gorontalo masih didominasi dengan jenjang pendidikan yang rendah. Pada tahun 2020 pendidikan terakhir yang ditamatkan penduduk Gorontalo didominasi oleh Sekolah Dasar (SD)/ Sederajat sebanyak 30,50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perbaikan karena sepuluh tahun lalu justru penduduk yang tidak memiliki ijazah yang mendominasi, yaitu sebesar 35,33 persen.

Walaupun tenaga kerja usia produktif di Gorontalo didominasi dengan pendidikan rendah, terdapat perubahan yang signifikan dalam pergeseran jenjang pendidikan selama sepuluh tahun terakhir. Tenaga kerja usia produktif yang tidak memiliki ijazah tahun 2010 berkurang hampir setengahnya pada tahun 2020. Tenaga kerja usia produktif tahun 2020 yang tamat perguruan tinggi meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2010. Adapun tenaga kerja usia produktif yang tamat SMA tahun 2020 meningkat hampir satu setengah kali dibandingkan sepuluh tahun lalu. Peningkatan tersebut berpengaruh dalam memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia di Gorontalo.

Berdasarkan komposisi umur, tenaga kerja usia produktif tahun 2020 dengan usia lebih lanjut memiliki komposisi jenjang pendidikan rendah yang lebih rendah. Tercatat, pada tahun 2020 usia 60-64 tahun didominasi oleh dengan tanpa ijazah dan tamat SD masing-masing sebesar 38,99 persen dan 39,33 persen. Komposisi pendidikan rendah tersebut akan menurun di kelompok yang lebih muda. Hal ini terlihat dari kelompok umur 25-44 tahun di mana komposisi tamatan perguruan tinggi tertinggi yaitu sebesar 20,09 persen, dan kelompok umur 15-24 tahun yang didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat.



Sumber: Sakernas, BPS

**Gambar 16. Persentase Tenaga Kerja Usia Produktif Provinsi Gorontalo menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan dan Kelompok Umur, 2020**

Menariknya, walaupun kelompok umur 15-24 tahun masih didominasi oleh tamatan SMA/Sederajat, tingkat pengangguran di kelompok umur tersebut juga menunjukkan angka yang paling tinggi. Tercatat pada tahun 2020, pada kelompok umur 15-24 tahun memiliki tenaga kerja dengan lulusan SMA/Sederajat sebesar 45,11 persen memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 14,40 persen. Kemungkinan terjadinya kondisi tersebut yaitu akibat kecilnya kesempatan kerja

pada kelompok umur tersebut di Gorontalo. Kondisi tersebut digambarkan pada Tingkat Kesempatan Kerja tahun 2020 di kelompok umur tersebut hanya sebesar 86,60 persen dan menunjukkan TTK terkecil dari seluruh kelompok umur. Kondisi tersebut menunjukkan tantangan bahwa besarnya tenaga kerja pada kelompok umur 15-24 tahun belum seutuhnya dapat diserap oleh sedikitnya kesempatan kerja yang tersedia.

Adapun, kelompok umur 45-59 tahun pada tahun 2020 yang didominasi dengan lulusan SD (38,11 persen) memiliki tingkat pengangguran paling rendah (2,09 persen). Hal ini sejalan dengan tingkat kesempatan kerja pada kelompok umur tersebut yang memiliki persentase tertinggi pada tahun 2020 (97,91 persen).

Kondisi pada kedua kelompok tersebut mencerminkan bahwa tantangan tenaga kerja yang dapat terserap pada dunia kerja di Gorontalo tidak hanya memerlukan pendidikan yang tinggi namun juga kesempatan dan keterampilan yang mumpuni. Dengan demikian, tenaga kerja mampu bersaing secara dinamis di pasar tenaga kerja yang semakin bersaing. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi khususnya tenaga kerja usia yang lebih muda yaitu masih terjadi mismatch antara pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, serta tantangan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan kaum muda agar mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Tantangan - tantangan yang dihadapi oleh kaum muda tersebut merupakan hal yang tidak mudah untuk dihadapi, namun dibalik tantangan tersebut juga terdapat kesempatan yang terbuka luas bagi kaum muda jika dimanfaatkan dengan baik, yaitu akses kesempatan kerja yang semakin luas dan berkembang khususnya di era Industri 4.0 ini. Oleh karena itu, peran pemerintah adalah menjamin akses pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian bagi kaum muda dan akses kesempatan kerja bagi kaum muda.

## **E. Penduduk Usia Produktif Menurut Generasi**

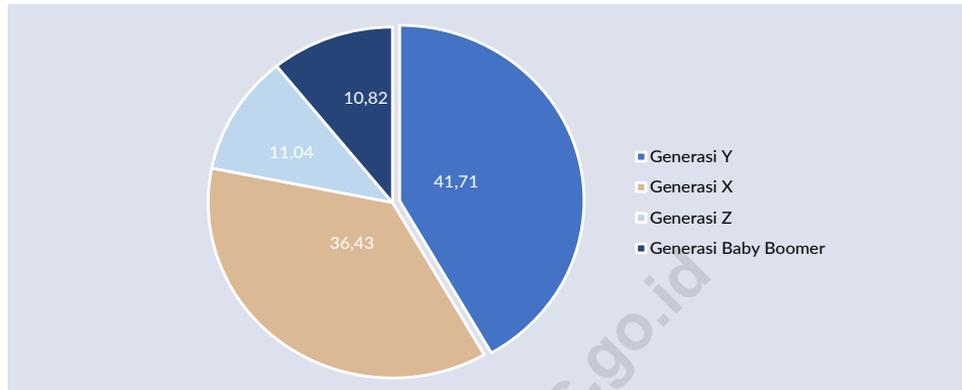
### **1. Komposisi Tenaga Kerja Usia Produktif menurut Generasi**

Jumlah tenaga kerja usia produktif di Gorontalo termasuk paling sedikit setelah Provinsi Kalimantan Utara dan Papua Barat. Gorontalo memiliki jumlah tenaga kerja yang berusia 15-64 tahun sebanyak lebih dari 542 ribu jiwa yang hanya menyumbang sebesar 0.45 persen dari total tenaga kerja usia produktif di Indonesia. Adapun provinsi yang memiliki tenaga kerja usia produktif paling banyak yaitu Provinsi Jawa Timur yang mencapai lebih dari 19 juta jiwa.

Berdasarkan klasifikasi penduduk William H. Frey ke dalam beberapa generasi, maka penduduk usia produktif mencakup sebagian generasi Z (15-23 Tahun), seluruh generasi Y atau milenial (24-39 tahun), seluruh generasi X (40-55 tahun), serta sebagian generasi Baby Boomer (56-64 Tahun). Berdasarkan klasifikasi tersebut, tenaga kerja di Provinsi Gorontalo didominasi oleh generasi Y sebanyak 41.71 persen dan generasi X sebesar 36.43 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah tenaga kerja di Provinsi Gorontalo merupakan generasi Y dan X.

Kondisi tersebut menunjukkan kesempatan yang baik melihat bahwa pada tahun 2020 Provinsi Gorontalo masih mendapati bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan non produktif. Kesempatan yang baik

tersebut perlu diimbangi dengan pemberdayaan penduduk produktif yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing sehingga menghasilkan kebermanfaatn dan percepatan perkembangan suatu wilayah.

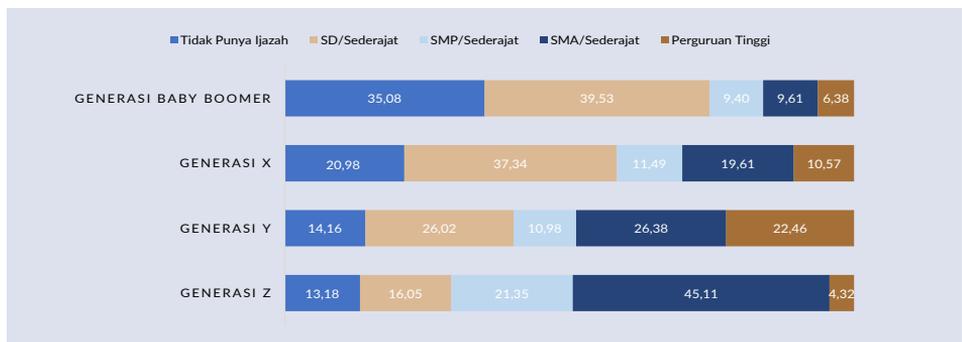


Sumber: Sakernas, BPS

**Gambar 17. Persentase Penduduk Usia Produktif yang Bekerja di Provinsi Gorontalo menurut Generasi Tahun 2020**

## 2. Penduduk Usia Produktif menurut Generasi dalam Ketenagakerjaan

Salah satu cara mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki di suatu wilayah adalah jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan. Menurut Binus (2020), sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan dapat diraih dari serangkaian proses belajar yang dilalui setiap orang. Proses belajar tersebut akan menghasilkan seorang individu yang memiliki *soft* dan *hard skill* yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan. Selain itu, nilai-nilai dan etika yang juga menjadi bekal di dunia pekerjaan menjadi salah satu hal yang didapatkan dalam proses pembelajaran. Sumber daya manusia yang berkualitas dan handal mampu menjadi modal besar dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.



Sumber: Sakernas, BPS

**Gambar 18. Persentase Penduduk Usia Produktif yang Bekerja menurut Pendidikan terakhir yang Ditamatkan di Masing-masing Generasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2020**

Berdasarkan Sakernas 2020, penduduk usia produktif yang bekerja di Gorontalo memiliki kecenderungan dapat menamatkan pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi pada penduduk dengan usia yang lebih muda. Tenaga kerja pada generasi Baby Boomer masih didominasi dengan pendidikan yang rendah (SD/ sederajat) atau bahkan tidak memiliki ijazah. Persentase pendidikan rendah atau tidak memiliki ijazah kian menurun seiring semakin mudanya generasi. Tercatat, komposisi penduduk bekerja yang tidak memiliki ijazah pada generasi Z paling kecil yaitu berkisar hanya 13,18 persen, dan penduduk bekerja yang tamatan SD/ Sederajat berkisar hanya 16,05 persen. Adapun komposisi tenaga kerja dengan lulusan perguruan tinggi paling banyak terdapat pada generasi Y/ milenial. Hal ini bisa disebabkan karena generasi Z masih menjalani proses pendidikan SMA/ Sederajat ataupun Perguruan tinggi.

### 3. Generasi Muda dan Teknologi

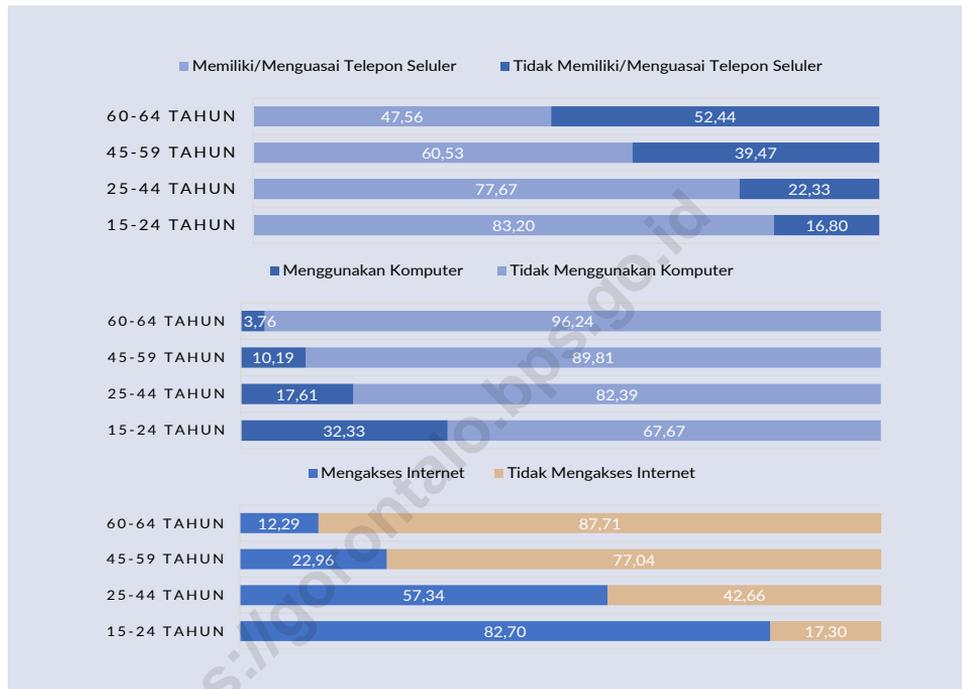
Selain pendidikan, kemampuan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan kualitas SDM khususnya di masa sekarang. Masa sekarang yang memasuki Era Industri 4.0 atau Revolusi Industri 4.0 menuntut segala aspek kehidupan masyarakat mengalami digitalisasi. Proses digitalisasi tersebut membuat sistem yang terintegrasi antara manusia, mesin, dan metode atau alur kerja yang membuat aktivitas masyarakat jauh lebih efektif dan efisien melalui konektivitas jaringan yang cerdas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa terhindar bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Pemanfaat teknologi yang tepat sasaran dan didasari oleh ilmu pengetahuan pada akhirnya mampu mengakselerasi pembangunan suatu wilayah.

Sayangnya, teknologi masih erat kaitannya dengan generasi muda. Generasi muda dianggap lebih melek teknologi karena mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurut Hellen Chou P. (2012), Generasi Z atau yang kemudian lebih dikenal dengan generasi digital merupakan generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan yang besar pada teknologi digital. Hal tersebut menandakan bahwa generasi muda memiliki keterampilan yang lebih baik dalam penggunaan teknologi.

Akses TIK yang diperoleh dari Susenas diukur melalui pertanyaan apakah seseorang menggunakan telepon seluler (HP), menggunakan komputer, dan mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Telepon seluler atau lebih dikenal dengan handphone (HP) merupakan bagian dari perkembangan teknologi digital yang dapat membantu berbagai kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Perilaku komunikasi masyarakat tidak terbatas pada jarak dan waktu semenjak keberadaan telepon seluler dapat dimanfaatkan. Tidak jarang, telepon seluler kini menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Secara umum, Susenas 2020 menunjukkan bahwa semakin muda sebuah generasi maka persentase memiliki/menguasai telepon seluler dalam tiga bulan terakhir semakin besar. Sebanyak 47,56 persen kelompok umur 60-64 tahun memiliki/menguasai telepon seluler selama tiga bulan terakhir pada tahun 2020. Persentase tersebut akan meningkat semakin mudanya kelompok umur. Hal ini terlihat hampir seluruh kelompok umur 15-24 tahun yang memiliki/menguasai telepon seluler yaitu sebanyak 83,20 persen.

Komputer juga memudahkan pekerjaan masyarakat di berbagai bidang. Penggunaan komputer seperti multimedia dan internet memberikan kesempatan bagi generasi muda khususnya pelajar untuk memperoleh ilmu dan wawasan yang lebih luas. Komputer juga memudahkan proses penghitungan, pengolahan data, hingga media aplikasi pendukung kebutuhan administrasi.



Sumber: Susenas, BPS

**Gambar 19. Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mengakses Internet, Menggunakan Komputer, dan Memiliki/Menguasai Telepon Seluler di Provinsi Gorontalo, 2020**

Persentase penggunaan komputer tahun 2020 selama tiga bulan terakhir juga menunjukkan pola yang sama dengan persentase memiliki/menguasai telepon seluler bahwa semakin muda generasi maka penggunaan komputer semakin besar. Kelompok umur 15-24 tahun yang menggunakan komputer selama tiga bulan terakhir di tahun 2020 sebesar 32,33 persen. Persentase ini menurun pada kelompok umur 25-44 tahun yang mencapai 17,61 persen hingga pada kelompok umur 60-64 tahun yang hanya mencapai 3,76 persen.

Kemajuan teknologi juga tidak dapat lepas dari pemanfaatan internet. Seluruh lini kegiatan masyarakat tidak dapat optimal tanpa penggunaan internet baik dari kegiatan pendidikan, sosial, bisnis, hingga ekonomi. Selama tiga bulan terakhir pada tahun 2020, kelompok umur 15-24 tahun yang menggunakan internet mencapai 82,70 persen. Kesenjangan penggunaan internet juga terjadi pada generasi yang lebih tua. Persentase penggunaan internet akan semakin menurun seperti halnya pola pada penggunaan komputer dan telepon seluler. Hal ini terlihat dari kelompok umur 60-64 tahun yang menggunakan internet pada tiga bulan terakhir tahun 2020 hanya mencapai 12,29 persen.

Secara garis besar, terjadi kesenjangan digital antara generasi muda dan generasi sebelumnya. Menurut OECD (2001), kesenjangan digital merupakan kesenjangan yang terjadi antara individu, rumah tangga, kawasan bisnis, dan geografis pada berbagai tingkatan ekonomi sosial dalam kesempatan mengakses TIK dan menggunakan internet untuk berbagai macam kegiatan.

## F. Kesimpulan

1. Penduduk usia produktif yang berkualitas memiliki peran penting dalam pemanfaatan bonus demografi dan meningkatkan pembangunan suatu wilayah.
2. Penduduk usia produktif di Gorontalo menunjukkan peningkatan dan mayoritas berada di Kabupaten Gorontalo.
3. Kualitas penduduk Gorontalo masih perlu upaya peningkatan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang masuk kategori sedang dan Indeks Daya Saing yang masih rendah.
4. Ketenagakerjaan merupakan tantangan pembangunan yang krusial. Salah satu upaya dalam menjawab tantangan tersebut yaitu meningkatkan kualitas penduduk usia produktif.
5. Tenaga kerja di Provinsi Gorontalo saat ini didominasi oleh generasi milenial yang dinilai memiliki kapabilitas yang tinggi dalam penggunaan teknologi.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Pemuda Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2021). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2021. Gorontalo: CV. Rifaldi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2021). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2021. Gorontalo: CV. Rifaldi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2021). Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Gorontalo. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.
- Bius Higher Education. (2020). Pentingnya Pendidikan Berkualitas Demi Tingkatkan SDM Yang Handal. Diakses pada 25 Maret 2022, <https://onlinelearning.binus.ac.id/2020/12/28/pentingnya-pendidikan-berkualitas-demi-tingkatkan-sdm-yang-handal/>
- BKKBN. (2014). Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Non Formal Materi Presentasi Dari Paper. Jakarta: Direktorat Kerjasama Pendidikan kependudukan.
- Chisholm, L. dan Kovacheva, S. (2002). Exploring the European Youth Mosaic. The Social Situation of young people in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Dzulfikar, M.R. (2021). Tantangan bagi Remaja Indonesia pada Industri 4.0. Diakses pada 1 April 2022, <https://kumparan.com/muhammad-rafly-dzulfikar/tantangan-bagi-remaja-indonesia-pada-industri-4-0-1v0zhOm27RB/full>
- Hellen Chou Pratama. (2012). Cyber Smart Parenting. Bandung: PT. Visi Anugerah Indonesia.
- Indonesia Investments. (2019). Pengangguran di Indonesia. Diakses pada 21 Maret 2022, <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255>.
- Kristianto, Kustiah. (1982). Perkembangan Ekonomi Daerah Indonesia bagian Timur dan Kesempatan Kerja, dalam Prijono Tjiptoherijanto et al.: "Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja, dan Pembangunan Ekonomi, Depok: Lembaga Penerbit FE UI.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2001). Knowledge and Setiawan, Satria Aji. (2018). Mengoptimalkan Bonus Demografi untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan Vol.2 Tahun 2018 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, 11-23.
- Skill for Life: First Result from The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) 2000. Diakses dari [www.oecd.org](http://www.oecd.org)
- Situmorang, Boyke, TH. (2005). Elastisitas Kesempatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Suku Bunga di Indonesia Tahun 1990-2003. Institut Pertanian Bogor.
- Smith, Adam. (2012). Wealth of Nations. Hertfordshire: Wordsworth Editions.





# 4

## Profil Penduduk Lanjut Usia

- A. Kualitas Hidup Meningkat, Gorontalo Menuju *Ageing Population*
- B. Lansia SMART, Tantangan dan Peluang
- C. Sebaran Lansia
- D. Lansia dan Keluarga
- E. Perlindungan Terhadap Lansia
- F. Potensi Lansia di Masa Setelah Bonus Demografi: Penduduk Pralansia
- G. Kesimpulan



Provinsi Gorontalo berada dalam transisi menuju *Ageing Population* (penuaan penduduk). Hal ini ditandai dengan persentase penduduk berusia 60 tahun ke atas telah berada di atas 7 persen.

# Profil Penduduk Lanjut Usia

Peningkatan jumlah serta proporsi penduduk lanjut usia (lansia) memberikan tantangan baru bagi dunia. Hal tersebut terjadi seiring dengan terkendalinya tingkat kelahiran, meningkatnya fasilitas dan layanan kesehatan, meningkatnya angka harapan hidup, serta menurunnya tingkat kematian. Secara global, terdapat 727 juta orang yang berusia 65 tahun atau lebih pada tahun 2020 (UN, 2020). Jumlah tersebut diproyeksikan akan berlipat ganda menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050.

Fenomena penuaan penduduk (*ageing population*) ini bisa dimanfaatkan sebagai bonus demografi kedua bagi dunia, dengan syarat tersedianya lansia yang sejahtera dan produktif dalam jumlah yang cukup. Sebagaimana disebutkan bahwa suatu negara ketika mengalami peningkatan populasi lansia yang masih produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian, maka negara tersebut tengah mengalami bonus demografi kedua (Heryanah, 2015). Artinya, jumlah penduduk lansia yang membesar berpotensi memberikan banyak benefit jika tangguh, sehat, dan produktif. Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan banyak persiapan serta dukungan dari semua pihak.

Persoalan kualitas gizi, sanitasi serta dukungan lingkungan yang sehat kemudian menjadi beberapa hal prioritas yang wajib diwujudkan. Mengingat begitu besarnya peran penduduk lansia, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah harus komprehensif bersinergi dengan kebijakan penduduk usia produktif. Momen ini juga harus dijadikan sebagai awal dari reformasi kebijakan pemerintah di sektor kependudukan. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan program kebijakan di bidang kesejahteraan lanjut usia yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang memadai.

Di balik peningkatan jumlah dan proporsi lansia terselip tantangan baru yang harus diwaspadai. Hal ini dimungkinkan karena lansia dihadapkan dengan masalah kestabilan dan kemandirian finansial. Tidak semua lansia memiliki dana pensiun, jaminan sosial, atau bahkan sumber pendanaan lainnya yang mampu membiayai kebutuhan mereka. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam satu struktur keluarga, penduduk lansia secara ekonomi harus bergantung pada anaknya atau orang yang lebih muda. Dalam jurnal yang berjudul "*The Sandwich Generation: Adult Children of The Aging*" oleh Dorothy A. Miller disebutkan bahwa fenomena generasi Sandwich terjadi ketika suatu keadaan dimana seseorang memiliki tanggung jawab ganda untuk menghidupi dua generasi. Hal ini menjadikan penduduk usia produktif memiliki beban tanggungan yang banyak yaitu diri sendiri, keluarga inti, dan keluarga orang tua sehingga penduduk mereka menjadi bagian dari *sandwich generation*.

## A. Kualitas Hidup Meningkat, Gorontalo Menuju Ageing Population

### 1. Lansia dan Bonus Demografi

Penuaan merupakan proses akumulasi perubahan yang kompleks. Secara demografis, penuaan penduduk merupakan kecenderungan yang terjadi sebagai dampak dari perubahan struktur umur penduduk di suatu wilayah dalam beberapa waktu belakangan ini. Perubahan struktur umur terjadi sebagai hasil dari perubahan tiga aspek kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Dalam struktur kependudukan, lansia merupakan kelompok usia “beban” yang berarti memiliki ketergantungan terhadap usia produktif. Jumlahnya yang semakin banyak, secara tidak langsung memiliki dampak sosial dan ekonomi baik bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial.

Penduduk lanjut usia di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan seiring kemajuan di bidang kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Selain itu, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari mengingat banyak dari mereka saat ini masih berusia produktif dalam beberapa tahun yang akan datang akan berusia lanjut atau pensiun. Di sisi lain, bonus demografi memberikan konsekuensi jika pada era pasca bonus demografi akan terjadi ledakan jumlah lansia.



Sumber: SP 2010

**Gambar 1. Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Gorontalo, 2010-2020**

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, Usia Harapan Hidup di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, Usia Harapan Hidup di Provinsi Gorontalo mencapai 68,07 tahun. Angka ini jauh meningkat dibandingkan kondisi tahun 2010 dimana Usia Harapan Hidup sebesar 66,41 tahun. Konsekuensi yang terjadi dari semakin membaiknya Usia Harapan Hidup penduduk Gorontalo adalah semakin bertambah banyaknya jumlah penduduk lanjut usia.



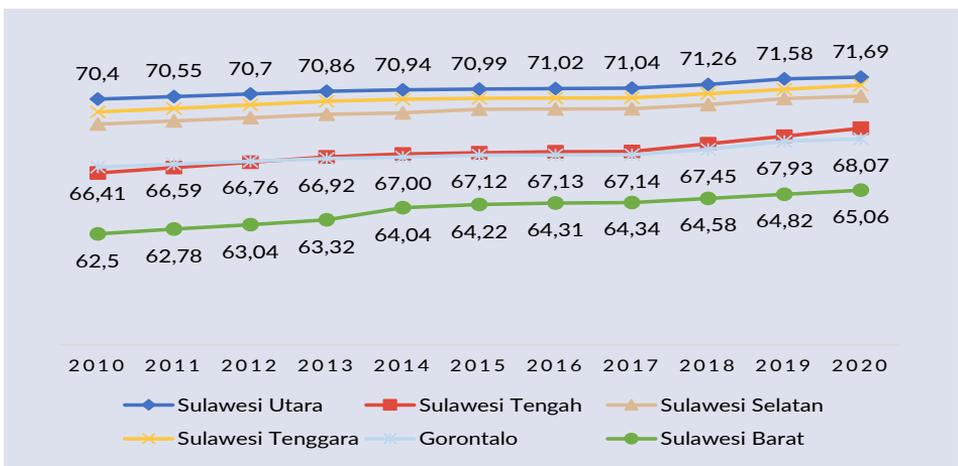
Sumber: Tahun 2010: SP 2010; Tahun 2011-2020: Susenas Maret

**Gambar 2. Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Gorontalo, 2010-2020**

Pada tahun 2020, persentase penduduk lansia Provinsi Gorontalo mencapai 8,33 persen. Dengan kata lain, saat ini Gorontalo dalam transisi menuju kondisi penuaan penduduk. Hal tersebut mengindikasikan persentase penduduk berusia 60 tahun ke atas telah berada di atas 7 persen dari keseluruhan penduduk dan akan berubah menjadi wilayah dengan struktur penduduk tua (*ageing population*) ketika angkanya di atas 10 persen. Kondisi tersebut tentu tidak lepas dari peningkatan angka harapan hidup yang terbentuk dari berbagai macam faktor yang mempengaruhinya.

**2. Lansia Gorontalo dalam Perbandingan di Pulau Sulawesi**

Selama tahun 2010 hingga 2020, Usia Harapan Hidup saat lahir pada level provinsi di Pulau Sulawesi cukup beragam. Akan tetapi, semua provinsi menunjukkan trend yang sama, yaitu meningkatnya Usia Harapan Hidup dari tahun ke tahun. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan adanya dampak positif atas peningkatan kualitas kesehatan dan keadaan sosial masyarakat khususnya provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi.

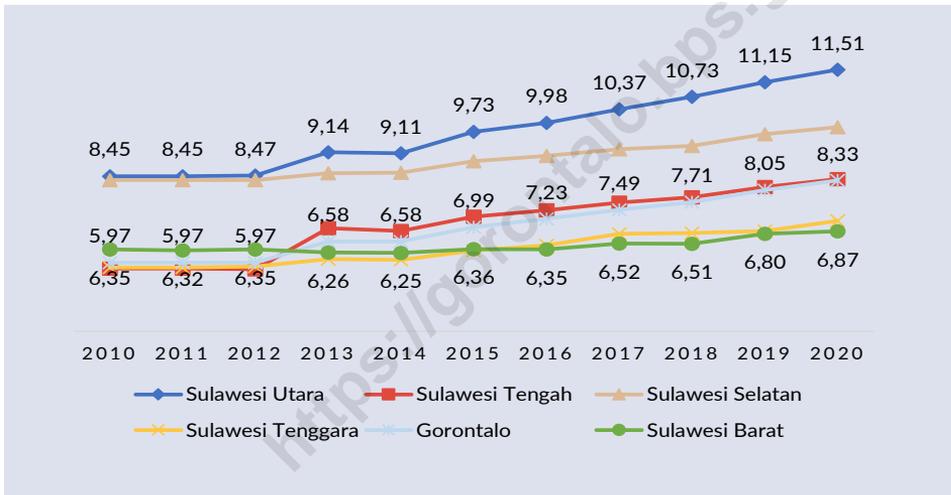


Sumber: SP 2010

**Gambar 3. Usia Harapan Hidup Provinsi di Pulau Sulawesi, 2010-2020**

Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan Usia Harapan Hidup tertinggi diantara provinsi lain se-Pulau Sulawesi pada tahun 2020, yaitu mencapai 71,69 tahun. Artinya, seorang bayi yang lahir di Provinsi Sulawesi Utara memiliki harapan hidup hingga usia 71,69 tahun. Sementara itu, harapan hidup saat lahir terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 65,06 tahun. Di sisi lain, Provinsi Gorontalo menduduki peringkat kedua terendah apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu 68,07 tahun pada tahun 2020.

Persentase penduduk lansia provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Provinsi dengan persentase penduduk lansia terkecil adalah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 6,87 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, provinsi dengan persentase penduduk lansia terbesar adalah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu mencapai 11,51 persen. Artinya, Sulawesi Utara telah memasuki fase struktur usia tua yakni persentase penduduk lansianya telah berada di atas 10 persen.



Sumber: Tahun 2010 Sensus Penduduk 2010; Tahun 2011-2020 Susenas Maret

**Gambar 4. Persentase Penduduk Lansia Provinsi-Provinsi se-Pulau Sulawesi, 2010-2020**

## B. Lansia SMART, Tantangan dan Peluang

### 1. Lansia SMART

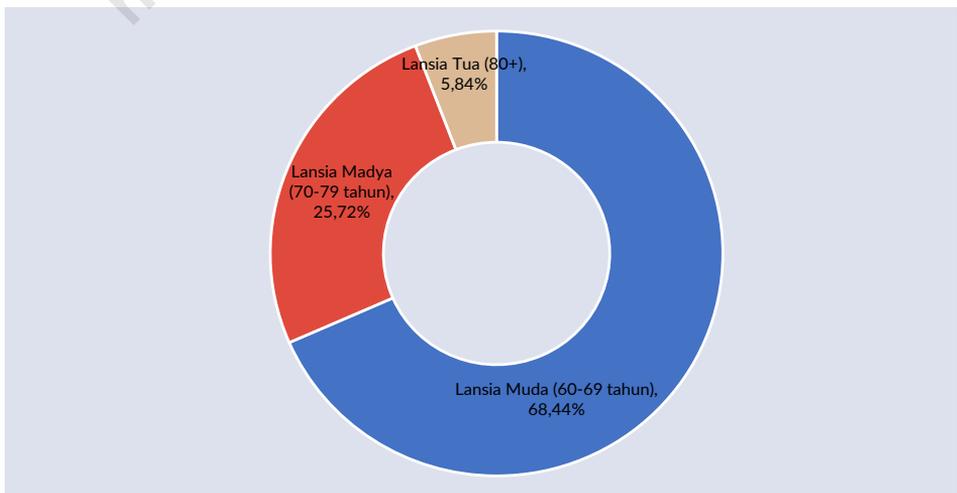
Lansia memiliki karakteristik individu tersendiri yang dapat dimaksimalkan sehingga bisa mencapai kesehatan yang multidimensional. Dalam *Internasional Council of Active Ageing (ICAA)* disebutkan bahwa kesejahteraan lansia dijabarkan dalam tujuh dimensi. Ketujuh dimensi tersebut yaitu: fisik, lingkungan, spiritual, sosial, profesional, intelektual, serta emosional. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga telah menyusun program-program untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia. Salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat atau disingkat dengan Lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif).

Fenomena meningkatnya jumlah lansia memiliki keunggulan dan keterbatasan tersendiri. Berdasarkan beberapa referensi, masalah yang dihadapi lansia diantaranya adalah ketidakberdayaan fisik yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain, keterbatasan ekonomi, serta penurunan tabungan (Hinggins & Williamson, 1997). Di sisi lain, lansia juga memiliki keunggulan. Lansia dianggap sebagai terkumpulnya kebijaksanaan dan kearifan sehingga harus dihormati (Swasono dan Hatta, 1989). Hal ini terkait dengan adanya ilmu dan pengalaman lansia bisa menjadi guru bagi yang lebih muda. Selain itu, lansia masih diberdayakan untuk mengasuh anak-anak di dalam keluarga, sehingga memperkecil risiko keterlantaran anak karena kedua orang tua yang bekerja.

Sebagian lansia memanfaatkan masa tua dengan menikmati jerih payah penghasilan selama masih muda, sebagian lainnya masih terus mencari penghasilan karena memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kasus lansia bekerja, diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menyatakan bahwa lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam pelayanan kesempatan kerja.

## 2. Tantangan dan Peluang Penduduk Lansia

Peningkatan jumlah penduduk lansia merupakan hal yang tidak bisa dihindari, mengingat banyak dari mereka yang saat ini masih dalam usia produktif dan akan memasuki usia lanjut di tahun-tahun mendatang. Jika dilihat dari kelompok umur, persentase lansia menurut kategori umur dibagi menjadi 3, yaitu: lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun), lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun), serta lansia tua (kelompok umur 80+). Dari seluruh lansia yang ada di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020, lansia muda jauh mendominasi dengan besaran mencapai 68,44 persen, selanjutnya diikuti lansia madya dan lansia tua dengan besaran masing-masing 25,72 persen dan 5,84 persen.



Sumber: Susenas Maret 2020

**Gambar 5. Persentase Lansia Menurut Kategori Lansia di Provinsi Gorontalo, 2020**

Pertambahan usia pada lansia cenderung diiringi dengan menurunnya kapasitas fungsional tubuh yang berdampak terhadap sistem imun tubuh. Tidaklah mengherankan kasus morbiditas semakin banyak ditemui pada kelompok umur lansia. Di sisi lain, kesehatan seseorang di usia lanjut merupakan cerminan dari proses kehidupan yang dijalani selama rentang kehidupannya. Pendekatan siklus hidup ini akan mengkaitkan gaya hidup seseorang dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sesuai pertambahan usia di sepanjang siklus kehidupannya. Dengan kata lain, kondisi kesehatan lansia saat ini merupakan pengaruh dari gaya hidup mereka di masa lalu.



Sumber: Susenas Maret, 2011-2020

**Gambar 6. Angka Kesakitan Penduduk Lansia Provinsi Gorontalo, 2011-2020**

Pada umumnya, penyakit yang dialami para lansia merupakan penyakit tidak menular yang bersifat degeneratif atau disebabkan oleh faktor usia misalnya penyakit jantung, diabetes mellitus, stroke, rematik dan cedera (Kemenkes RI, 2019). Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit kronis, berbiaya besar, dan apabila tidak disembuhkan akan menimbulkan ketidakmampuan atau disabilitas sehingga para lansia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Pada tahun 2020, angka kesakitan di Provinsi Gorontalo merupakan titik terendah selama kurun waktu 2014-2020, yaitu sebesar 29,48 persen atau sekitar 29 dari 100 lansia sakit dalam sebulan terakhir.



Sumber: Susenas Maret, 2020

**Gambar 7. Angka Kesakitan Penduduk Lansia Provinsi Gorontalo Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020**

Angka kesakitan lansia menggambarkan persentase lansia yang terganggu aktivitasnya sehari-hari dalam satu bulan terakhir sebagai akibat dari keluhan kesehatan yang dialaminya. Berdasarkan tipe daerah, angka kesakitan penduduk lansia di perdesaan pada tahun 2020 persentasenya lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (35,07 persen berbanding 21,83 persen). Di sisi lain, apabila dilihat dari jenis kelamin, angka kesakitan penduduk lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, hal ini bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan lansia untuk mencapai lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif).

## C. Sebaran Lansia

### 1. Perbandingan Lansia Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Persebaran penduduk lansia di Provinsi Gorontalo menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa populasi terbesar lansia berada di Kabupaten Gorontalo. Jumlah penduduk lansia di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 mencapai 35.936 jiwa atau sebesar 34,68 persen dari seluruh total lansia yang ada di Provinsi Gorontalo. Di sisi lain, jumlah penduduk lansia terkecil berada di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sejumlah 10.250 jiwa atau sebesar 9,89 persen dari seluruh lansia yang ada di Provinsi Gorontalo.

Secara keseluruhan, persentase lansia di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo masih di bawah 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada wilayah kabupaten/kota di Gorontalo yang memasuki fase struktur usia tua yakni persentase penduduk lansianya telah berada di atas 10 persen. Meskipun demikian, sebagian besar wilayah telah memiliki persentase lansia mendekati 10 persen. Secara lebih spesifik, terdapat 3 wilayah yang persentase lansianya di atas 9 persen, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, serta Kota Gorontalo.

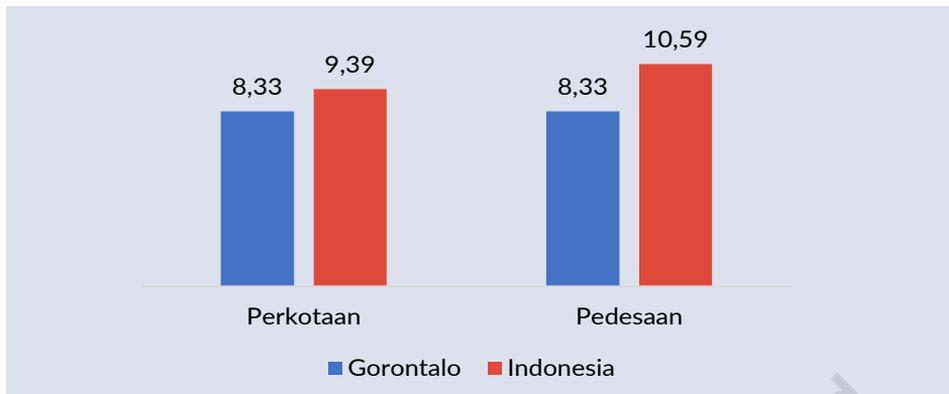
**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia (60 tahun ke atas) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Kab. Boalemo	11.805	8,09
2	Kab. Gorontalo	35.936	9,14
3	Kab. Pohuwato	11.041	7,54
4	Kab. Bone Bolango	15.943	9,79
5	Kab. Gorontalo Utara	10.250	8,20
6	Kota Gorontalo	18.637	9,39
	Total	103.612	8,84

Sumber: SP 2020

### 2. Perbandingan Lansia Antar Kota dan Desa

Secara umum persentase penduduk lansia di Provinsi Gorontalo lebih rendah dibandingkan persentase penduduk lansia pada level nasional, baik di perkotaan dan perdesaan. Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah yaitu perdesaan dan perkotaan di Provinsi Gorontalo maka tampak bahwa sebaran lansia antara perdesaan dan perkotaan cenderung berimbang, yaitu 8,33 persen.



Sumber: Susenas Maret 2020

**Gambar 8. Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah di Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2020**

## D. Lansia dan Keluarga

### 1. Lansia dalam Keluarga

#### a. Status Keanggotaan Lansia dalam Rumah Tangga

Bertambahnya jumlah lansia dari tahun ke tahun turut mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tangga yang dihuni lansia. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap bagaimana kedudukan lansia dalam keluarga. Persentase lansia menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 cukup mendominasi, yaitu sebesar 54,75 persen. Dari persentase tersebut menunjukkan bahwa 5 dari 10 lansia di Gorontalo masih terbebani tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumah tangganya dengan perannya sebagai KRT.

**Tabel 2. Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo, 2010-2020**

Tahun	Kepala Keluarga	Anggota Keluarga
2010	51,81	48,19
2011	55,01	44,99
2012	55,43	44,57
2013	58,15	41,85
2014	55,64	44,36
2015	52,86	47,14
2016	52,17	47,83
2017	53,76	46,24
2018	57,82	42,18
2019	55,62	44,38
2020	54,75	45,25

Sumber: Tahun 2010: SP 2010; Tahun 2011-2020: Susenas Maret

Tingginya persentase lansia yang berperan sebagai KRT tersebut merupakan kombinasi dari prespektif sosial masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur, bahwa lansia harus dihormati oleh masyarakat yang usianya lebih muda dan aspek budaya patrilineal yang mengutamakan peranan laki-laki dalam menjadi KRT. Selain itu, tingginya persentase lansia yang menjadi KRT juga bisa disebabkan karena persepektif sosial masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman bahwa pengambilan keputusan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari rumah tangga menjadi tanggung jawab dari anggota rumah tangga yang paling senior.

Selama tiga tahun terakhir persentase lansia yang berperan sebagai KRT mengalami penurunan. Pada tahun 2018 persentase lansia sebagai KRT mencapai 57,82 persen, akan tetapi persentasenya semakin menurun yaitu menjadi 54,75 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, sebagai konsekuensinya adalah terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia yang berstatus anggota keluarga. Dalam hal ini, penduduk lansia yang berstatus sebagai anggota keluarga memiliki kecenderungan untuk tidak bekerja.

Sementara itu, dari sisi komposisi lansia berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa persentase lansia perempuan di Gorontalo lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki. Pada tahun 2020, persentase lansia perempuan di Provinsi Gorontalo sebesar 8,93 persen. Lebih tinggi dibandingkan persentase lansia laki-laki yaitu sebesar 7,74 persen.



Sumber: Susenas Maret, 2020

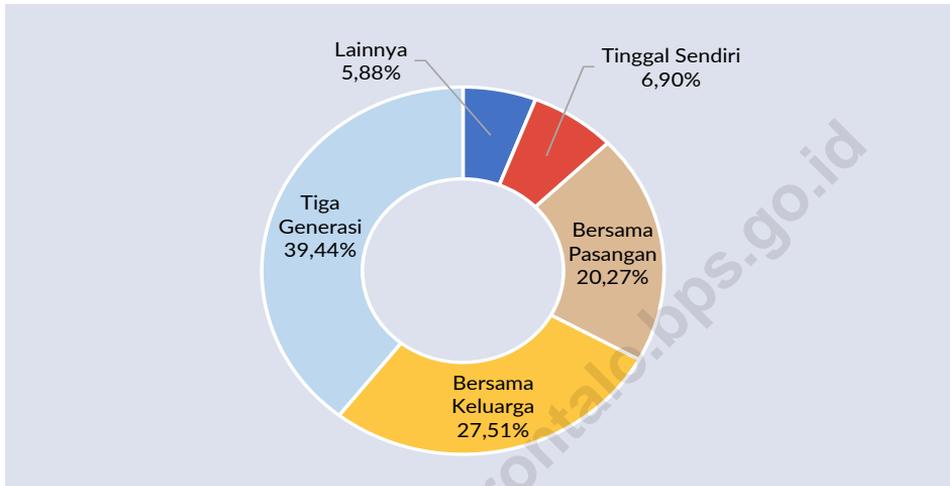
**Gambar 9. Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2020**

#### b. Status Tinggal Bersama

Permasalahan psikologis yang dominan terjadi pada lansia yakni kesepian. Dukungan sosial merupakan faktor utama yang melawan kesepian (Tomaka, Thompson, dan Palacios, 2006). Oleh karena itu, lansia dengan dukungan sosial yang besar kemungkinan besar memiliki tingkat kesepian yang lebih sedikit. Dukungan sosial dapat berupa kesempatan para lansia merasa terhubung secara sosial, memiliki sumber daya sosial yang memadai, kedekatan dengan orang lain, atau juga suatu rasa kebersamaan dalam kelompok.

Dalam masa tersebut, terlihat bahwa lansia bergantung kepada penduduk yang lain untuk mendapatkan dukungan/bantuan baik secara ekonomi maupun sosial. Tinggal bersama dengan keluarga adalah tempat terbaik guna menghabiskan masa

tua karena keluarga masih menjadi pemberi dukungan utama dalam kelangsungan hidup lansia. Lansia akan bahagia jika memiliki kesehatan yang baik, lingkungan sosial yang kuat, kondisi ekonomi yang memadai serta hubungan interpersonal yang baik. Pendampingan pasangan atau keluarga inti akan sangat berarti dibandingkan dukungan dari oranglain yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Secara psikologis, adanya dukungan dan pendampingan dapat mengurangi risiko penyakit dan kematian pada lansia.



Sumber: Susenas Maret 2020

**Gambar 10. Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Bersama di Provinsi Gorontalo, 2020**

Tempat tinggal lansia tidak dapat dipisahkan dari perawatan kesehatan lansia. Secara umum, sebagian besar lansia di Provinsi Gorontalo tinggal bersama keluarga, pasangan atau yang lainnya. Pada tahun 2020 lansia yang tinggal bersama pasangannya di Provinsi Gorontalo sebesar 20,27 persen; bersama keluarga sebesar 27,51 persen; dan tiga generasi sebesar 39,40 persen; serta lainnya sebesar 5,88 persen. Atau dapat dikatakan bahwa persentase lansia yang tinggal bersama (bukan berstatus tinggal sendirian) di Provinsi Gorontalo cukup tinggi, yaitu diatas 90 persen. Artinya sekitar 9 dari 10 lansia di Provinsi Gorontalo tinggal bersama dengan keluarga. Hal tersebut memberikan optimisme positif karena lansia yang masih memiliki pasangan, kebutuhan hidupnya diperhatikan pasangannya. Di sisi lain, lansia yang berstatus sebagai orang tua/mertua, kehidupannya akan diperhatikan oleh anak atau menantunya, dsb.

## 2. Lansia Bekerja

Bekerja tidaklah mengenal usia karena bekerja adalah hak segala usia. Di tengah kondisi penduduk dunia yang kian menua, banyak dijumpai lansia yang masih aktif dalam dunia kerja. Keberadaan lansia dalam pasar kerja pada dasarnya tidak hanya mencerminkan kemampuan lansia untuk tetap bekerja, tetapi dapat juga dimaknai rendahnya tingkat kesejahteraan lansia, sehingga mereka terpaksa masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



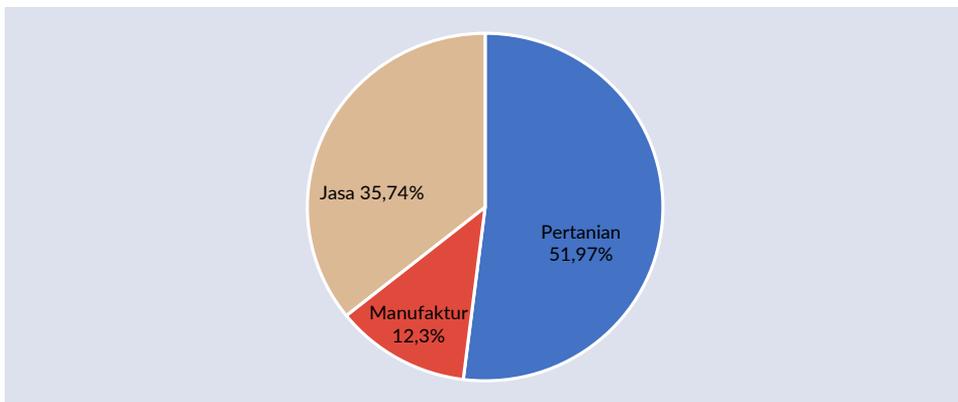
Sumber: Susenas Maret, 2013-2020

**Gambar 11. Persentase Penduduk Lansia Bekerja di Provinsi Gorontalo, 2013-2020**

Perkembangan lansia yang bekerja di Provinsi Gorontalo cenderung berfluktuatif. Secara umum selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 hingga 2020 persentase lansia yang bekerja lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 hingga 2015. Meningkatnya lansia bekerja secara umum mencerminkan peningkatan partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi, perpanjangan usia produktif, serta besarnya potensi pemberdayaan lansia dalam bonus demografi.

c. Karakteristik Pekerja Lansia

Sebagian besar lansia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dengan kemampuan kerja dan produktifitas yang kian menurun. Oleh karenanya, lansia dalam memasuki pasar kerja akan cenderung menjalani sektor lapangan usaha yang sesuai dengan kapasitasnya. Lapangan usaha sektor pertanian memang lebih terbuka untuk semua kalangan karena tidak mensyaratkan tingkat pendidikan serta keahlian spesifik. Menjadi hal wajar apabila pekerja lansia paling banyak terserap dalam lapangan usaha pertanian, yaitu sebesar 51,97 persen.

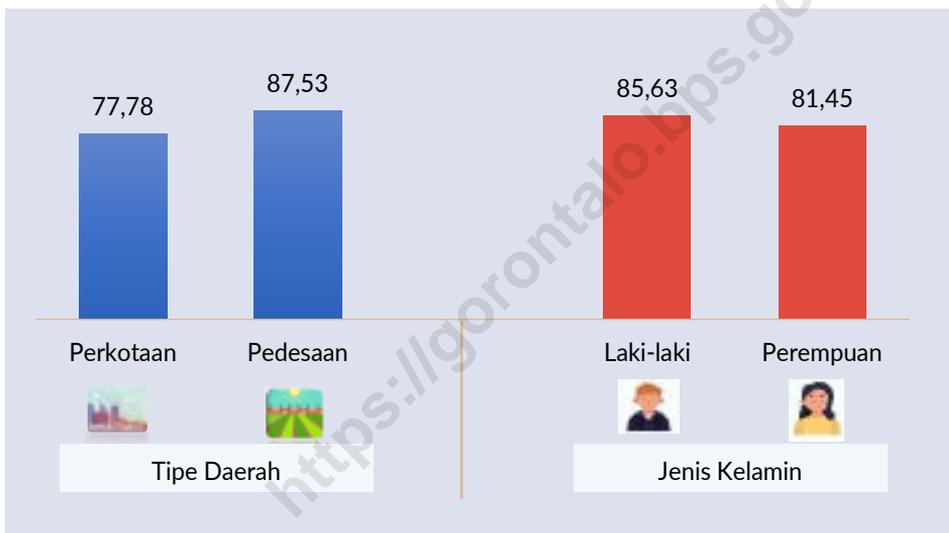


Sumber: Susenas Maret 2020

**Gambar 12. Persentase Lansia Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Gorontalo, 2020**

Literatur ketenagakerjaan umumnya mendefinisikan tenaga kerja informal adalah pekerja yang bertanggung jawab atas perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan. Sementara itu, BPS mengategorikan pekerja informal adalah seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas pertanian dan non-pertanian, serta pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Lansia yang bekerja di sektor informal menjadi rentan karena tidak memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, dan imbalan kerja layak. Kemampuan yang sudah menurun secara fisik dan psikologis, membuat sektor informal menjadi pilihan bagi para pekerja lansia. Berdasarkan tipe daerah, persentase lansia yang bekerja di sektor informal di perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Dari sisi jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan perempuan.

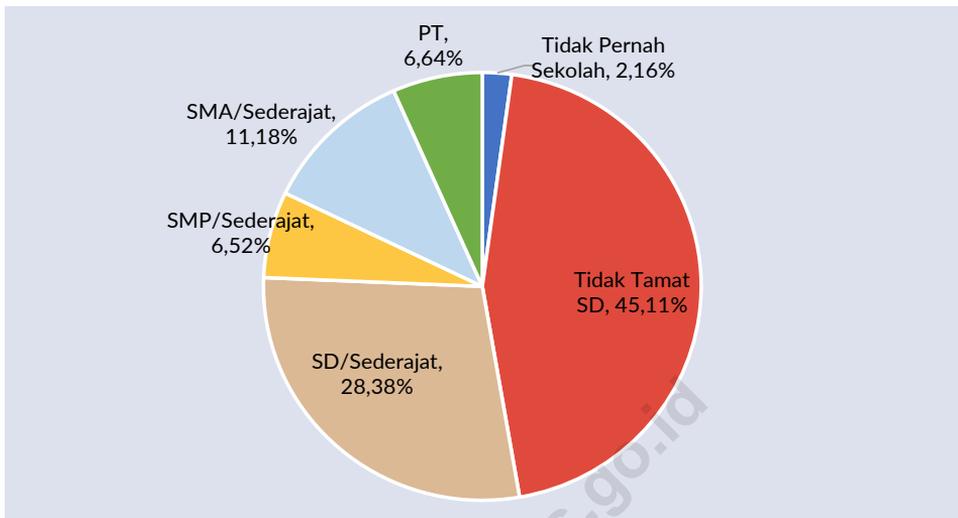


Sumber: Susenas Maret 2020

**Gambar 13. Persentase Penduduk Lansia Bekerja di Sektor Informal di Provinsi Gorontalo, 2020**

#### d. Pendidikan Pekerja Lansia

Pendidikan memberikan pengaruh terhadap pekerjaan di sektor informal. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit pekerja lansia yang bekerja di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan pekerja lansia, semakin tinggi kesempatan mereka untuk bekerja di sektor formal karena memiliki kualifikasi dan keterampilan yang mencukupi. Di sisi lain, tingkat pendidikan yang dicapai penduduk lanjut usia saat ini adalah cerminan pendidikan zaman dahulu dimana fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan akses sekolah yang jauh. Oleh karenanya, masih banyak lansia yang belum terpapar dengan dunia pendidikan. Lansia di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok lansia yang memiliki latar pendidikan rendah yakni 45,11 persen tidak tamat SD dan sebanyak 2,16 persen lansia tidak pernah sekolah.



Sumber: Susenas Maret 2020

**Gambar 14. Persentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Gorontalo, 2020**

e. Jam Kerja Layak

Produktivitas lansia dan peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat melalui jumlah jam kerja. Jam kerja lansia semakin menurun seiring dengan kondisi fisiknya yang mulai melemah. Partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi tidak lagi diutamakan pada kuantitas jam kerjanya, melainkan lebih kepada kualitas kerja yang tercermin keahlian dan pengalamannya. Namun pada kenyataannya, masih banyak lansia yang bekerja secara penuh dengan jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Bahkan, terdapat lansia yang bekerja secara berlebihan, atau disebut *excessive hours*, yaitu dengan jumlah jam kerja lebih dari 48 jam dalam seminggu.

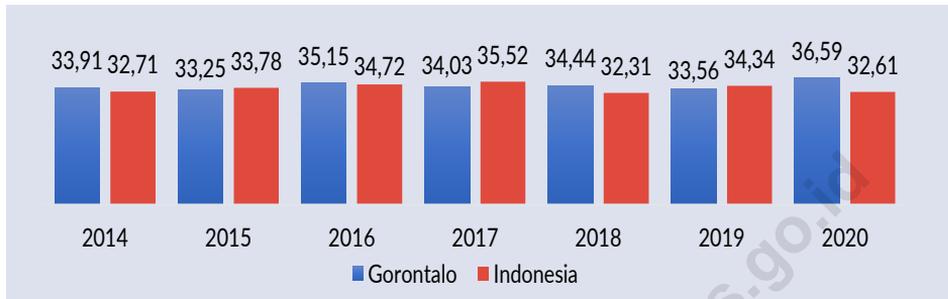
**Tabel 3. Rata-rata Jumlah Jam Kerja dan Persentase Penduduk Lansia Menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu di Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2020**

Wilayah	Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu					Rata-rata Jumlah Jam Kerja
	< 1 Jam	1-14 Jam	15-34 Jam	34-48 Jam	≥ 49 Jam	
Gorontalo	4,4	12,59	29,67	21,44	31,89	36,59
Indonesia	4,21	15,65	34,42	25,64	20,07	32,61

Sumber: Susenas Maret, 2020

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari setiap 10 orang pekerja lansia, setidaknya ada 3 orang yang bekerja secara berlebihan dalam seminggu terakhir. Sementara itu, pekerja lansia dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam sebesar 29,67 persen dan jumlah jam kerja antara 25-48 jam sebesar 21,44 persen. Persentase dari dua kelompok jam kerja tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan nasional yang masing-masing mencapai 34,42 persen (15-34 jam) dan 25,64 persen (34-48 jam).

Secara keseluruhan, rata-rata jam kerja Gorontalo lebih tinggi yakni mencapai 36,59 jam sedangkan nasional sebanyak 32,61 jam. Selama periode 2014-2020, rata-rata jumlah jam kerja baik Gorontalo maupun nasional mengalami fluktuatif. Lansia tentu tidak sepatutnya bekerja berlebihan. Selain itu, jam kerja berlebih akan mengancam kondisi fisik dan mental lansia dalam jangka panjang, serta menurunkan produktivitas dalam bekerja (Anker dkk, 2002).

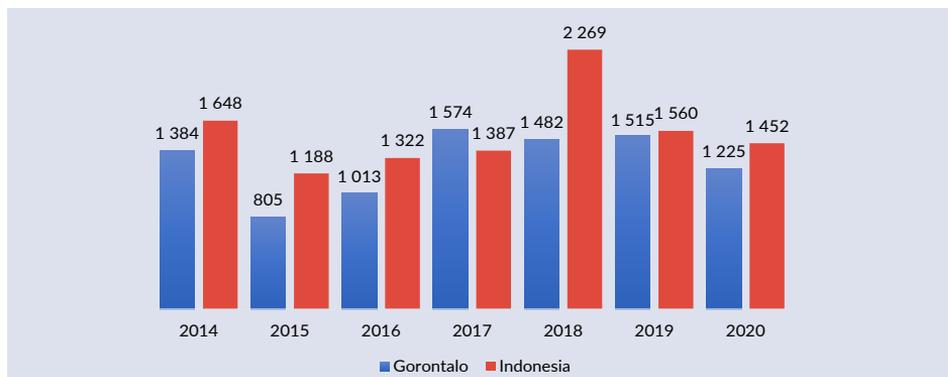


Sumber: Susenas Maret, 2014-2020

**Gambar 15. Rata-rata Jumlah Jam Kerja dari Penduduk Lansia yang Bekerja di Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2014-2020**

f. Penghasilan Lansia

Tingkat kesejahteraan lansia dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh lansia bekerja. Lansia memiliki hak untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menjamin kesejahteraan. Akan tetapi, lansia bekerja biasanya memperoleh penghasilan yang lebih sedikit daripada kelompok usia produktif. Hal ini disebabkan adanya stigma bahwa produktivitas lansia menjadi rendah karena kondisi fisiknya yang lemah sehingga membuat upah atau pendapatan yang diterima lansia lebih rendah dibanding usia produktif. Padahal kebutuhan hidup lansia tidak jauh berbeda dari usia produktif. Bahkan terkadang lansia memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kesehatan dibanding usia produktif.



Sumber: Susenas Maret, 2014-2020

**Gambar 16. Rata-rata Penghasilan Penduduk Lansia di Provinsi Gorontalo dan Indonesia (000 rupiah), 2014-2020**

Secara umum, rata-rata penghasilan dari lansia yang bekerja di Provinsi Gorontalo dari tahun 2014 sampai dengan 2020 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2020, rata-rata penghasilan dari lansia yang bekerja di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 1,22 juta rupiah per bulan. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang telah mencapai 1,45 juta rupiah per bulan.

Lansia bekerja dengan upah rendah adalah penghasilan di bawah 2/3 median upah (ILO, 2011). Upah rendah yang dimaksud terbatas untuk penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, buruh/karyawan, dan pekerja bebas baik pertanian maupun non pertanian. Pada tahun 2020, sebesar 42,07 persen lansia di Provinsi Gorontalo yang bekerja memperoleh upah yang rendah.



Sumber: Susenas Maret 2020

**Gambar 17. Persentase Penduduk Lansia yang Memperoleh Upah Rendah di Provinsi Se Pulau Sulawesi, 2020**

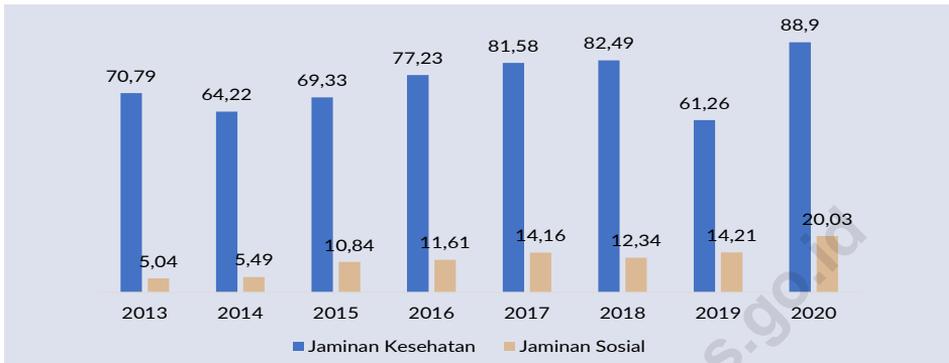
## E. Perlindungan Terhadap Lansia

### 1. Jaminan Kesehatan dan Sosial Bagi Lansia

Sejalan dengan bertambahnya usia, kondisi fisik manusia akan menurun. Oleh karena itu, penduduk lanjut usia memiliki kerentanan sosial maupun ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamatkan terciptanya kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, termasuk di dalamnya lansia. Selain itu, lansia juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu diperhatikan khususnya dengan program-program perlindungan sosial.

Jaminan kesehatan di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lansia. Meskipun demikian, sebagian besar penduduk lansia di Provinsi

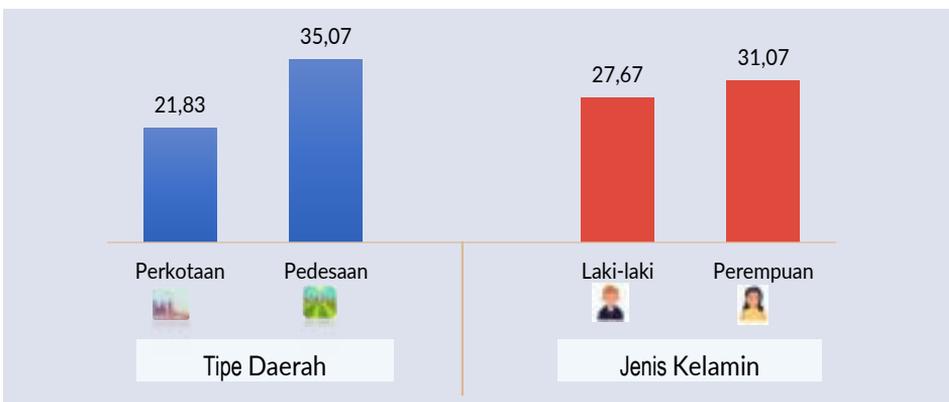
Gorontalo telah memiliki jaminan kesehatan. Pada tahun 2020, sekitar 8 dari 10 lansia telah memiliki jaminan kesehatan. Di sisi lain, baru sebagian kecil lansia yang telah memiliki jaminan sosial. Pada tahun 2020 sekitar 8 dari 10 lansia belum memiliki jaminan sosial.



Sumber: Tahun 2013-2020, Susenas Maret

**Gambar 18. Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial di Provinsi Gorontalo, 2013-2020**

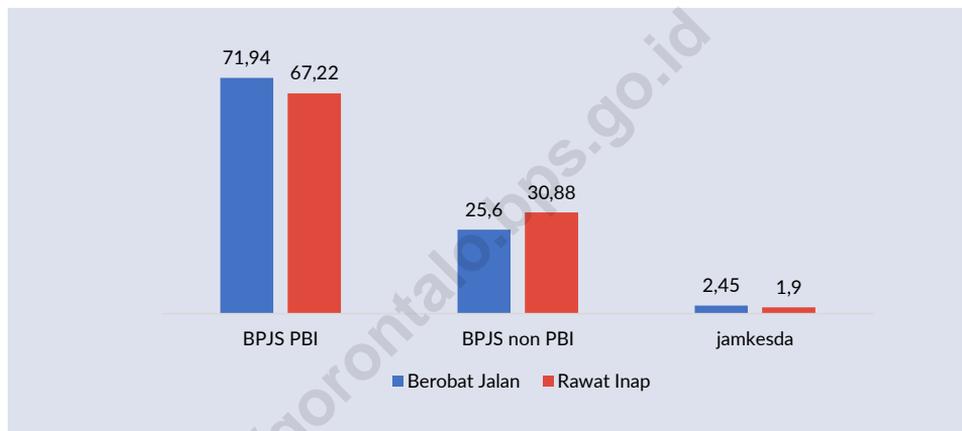
Seiring pertambahan usia, kondisi fisik manusia pasti menurun karena adanya proses degenerasi (penuaan) yang menyebabkan banyak penyakit tidak menular muncul terutama pada kelompok lanjut usia. Selain itu, proses degenerasi tersebut juga menurunkan imunitas tubuh sehingga juga rentan terkena infeksi penyakit menular (Kemenkes, Profil Kesehatan 2016). Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan jaminan kesehatan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawarkan bagi para lansia. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.



Sumber: Susenas Maret, 2020

**Gambar 19. Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2020**

Jaminan kesehatan merupakan fasilitas perlindungan untuk pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi penerima manfaat jika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. JKN terdiri dari BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), BPJS Non PBI, dan Jamkesda. Pada tahun 2020, penduduk lansia di Provinsi Gorontalo yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan dan rawat inap dengan menggunakan jaminan kesehatan BPJS PBI masih mendominasi dibandingkan jaminan kesehatan lainnya.



Sumber: Susenas Maret, 2020

**Gambar 20. Persentase Penduduk Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Provinsi Gorontalo, 2020**

## 2. Jaminan Sosial Bagi Lansia

Perlindungan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menanggapi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi dengan standart minimal. Dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, lansia memiliki kerentanan sosial yang paling tinggi. Oleh karena itu, selain jaminan kesehatan, jaminan sosial di Indonesia juga mencakup jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

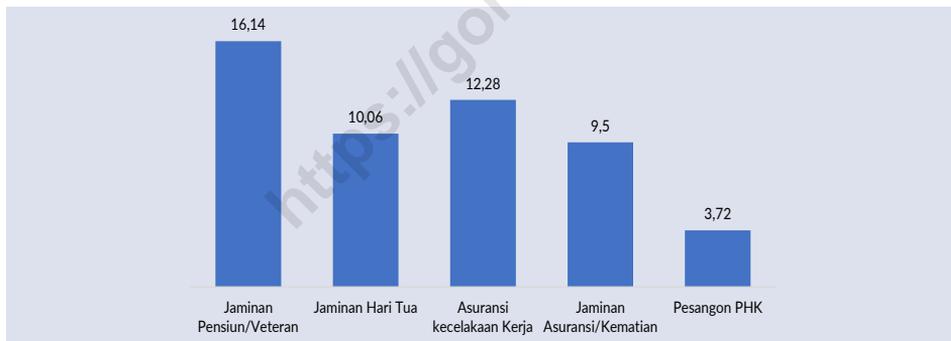
Program perlindungan sosial yang dirancang tepat sasaran dapat membantu terpenuhinya kekurangan pendapatan dan konsumsi rumah tangga miskin. Untuk provinsi Gorontalo, persentase lansia di perkotaan memiliki jaminan sosial lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (30,85 persen dibanding 12,04 persen). Angka tersebut dimungkinkan karena akses dan fasilitas di perkotaan yang lebih baik membuat para lansia lebih mudah untuk mendapatkan jaminan sosial dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan.



Sumber: Susenas Maret, 2020

**Gambar 21. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2020**

Berdasarkan jenisnya, jaminan sosial yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga lansia adalah jaminan pensiun/veteran (16,14 persen). Jaminan pensiun/veteran menjadi yang terbanyak dimiliki dapat disebabkan karena banyaknya lansia yang dulu pekerjaannya merupakan pegawai negeri sipil/polisi/tentara. Sementara itu, pesangon PHK merupakan jaminan yang paling sedikit dimiliki oleh rumah tangga lansia, yakni hanya 3,72 persen.



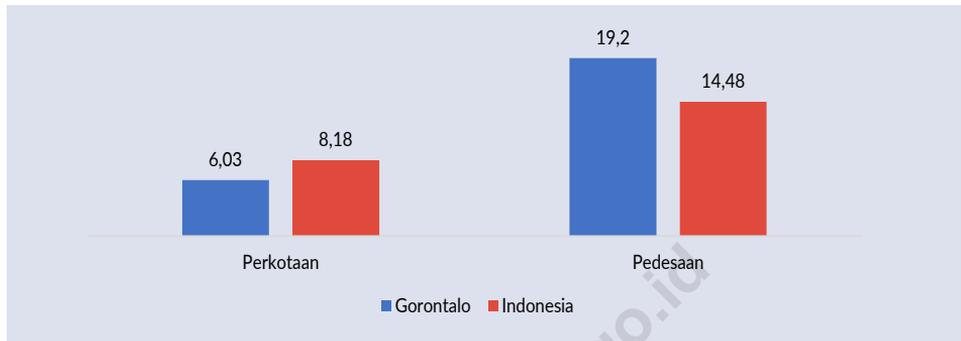
Sumber: Susenas Maret, 2020

**Gambar 22. Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Jenis Jaminan Sosial yang Dimiliki di Provinsi Gorontalo, 2020**

**Bantuan Sosial Lansia: Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka, termasuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan RPJMN. Berdasarkan tipe daerah, persentase rumah tangga lansia

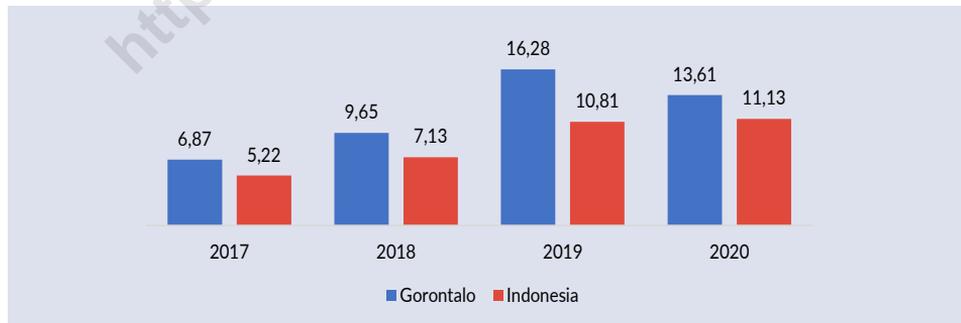
di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 yang masih tercatat/menjadi penerima PKH di pedesaan tiga kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan (19,20 persen dibanding 6,03 persen).



Sumber: Susenas Maret, 2020

**Gambar 23. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Tipe Daerah di Provinsi Gorontalo, 2020**

Persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH di Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sampai dengan 2019 cenderung meningkat. Selanjutnya, kembali menurun pada tahun 2020 dimana persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH di Provinsi Gorontalo sebesar 13,61 persen. Apabila dibandingkan dengan persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH pada level nasional selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2020, maka persentase Provinsi Gorontalo lebih tinggi.



Sumber: Tahun 2017-2020, Susenas Maret

**Gambar 24. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH di Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2017-2020**

#### Bantuan Sosial Lansia: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni program subsidi beras sejahtera/rastra. BPNT telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2017. Melalui Program BPNT diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas,

harga, dan tempat membeli bahan pangan. Program BPNT juga diharapkan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan ribuan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan.

Pelaksanaan BPNT menggantikan penyaluran beras langsung menjadi uang dalam kartu yang dapat dicairkan setiap bulannya dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selanjutnya, masyarakat dibebaskan dapat membeli kebutuhan pokoknya mulai dari beras, minyak goreng, membeli kebutuhan pangan berupa beras/telur di warung elektronik gotong royong (e-waroeng). PBPNT sejatinya adalah perwujudan kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sehingga diharapkan dapat tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Secara umum, persentase rumah tangga lansia di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 yang menerima BPNT di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan (29,09 persen dibanding 13,00 persen).



Sumber: Susenas Maret, 2020

**Gambar 25. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima BPNT Menurut Tipe Daerah di Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2020**

## F. Potensi Lansia di Masa Setelah Bonus Demografi: Penduduk Pralansia

### 1. Sebaran Penduduk Lansia

Penduduk pralansia merupakan kelompok umur yang memiliki peranan penting dalam agenda kesejahteraan lansia di masa yang akan datang. Penduduk yang sekarang berumur 45 s/d 59 tahun atau dikategorikan kelompok umur pralansia pada saat SP2020, maka pada masa setelah bonus demografi selesai akan berada pada usia lansia. Oleh karena itu, memperhatikan karakteristik calon lansia menjadi salah satu strategi dalam rangka menyongsong lansia yang tanggung, sehat, dan produktif di masa depan.

Persebaran penduduk pralansia di Provinsi Gorontalo menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa populasi terbesar pralansia berada di Kabupaten Gorontalo. Persentase penduduk lansia di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 yaitu sebanyak 65.806 jiwa atau mencapai 34,30 persen dari seluruh total pralansia yang ada di Provinsi Gorontalo. Di sisi lain, persentase penduduk pralansia terkecil berada di Kabupaten Gorontalo Utara.

**Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Pralansia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
1	Kab. Boalemo	23.515	12,26
2	Kab. Gorontalo	65.806	34,30
3	Kab. Pohuwato	23.582	12,29
4	Kab. Bone Bolango	26.204	13,66
5	Kab. Gorontalo Utara	19.391	10,11
6	Kota Gorontalo	33.377	17,40
	Total	191.875	100,00

Sumber: SP2020

## 2. Profil Pralansia

Salah satu tantangan penuaan penduduk di masa depan adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi lansia. Oleh karena itu, mempersiapkan kualitas hidup sebelum masuk ke dalam masa lansia menjadi hal yang penting. Salah satu aspek penting yang berdampak terhadap kualitas hidup pralansia diantaranya adalah pendidikan. Di Gorontalo, pada tahun 2020 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk pralansia mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010. Pada tahun 2020 RLS Gorontalo adalah 7,14 tahun meningkat dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 6,23 tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup penduduk pralansia. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk pralansia di Gorontalo yang buta huruf. Angka buta huruf penduduk pralansia di Gorontalo pada tahun 2020 sebesar 1,67 persen. Angka tersebut menurun apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, dimana angka buta huruf penduduk pralansia di Gorontalo mencapai 7,62 persen.

## G. Kesimpulan

1. Provinsi Gorontalo berada dalam transisi menuju kondisi penuaan penduduk (persentase penduduk berusia 60 tahun ke atas telah berada di atas 7 persen). Hal tersebut tidak terlepas dari usia harapan hidup yang terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Secara komposisi, lansia di Provinsi Gorontalo didominasi oleh Lansia Muda, yaitu lansia yang berumur 60-69 tahun.
3. Persentase lansia menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) di Provinsi Gorontalo cukup mendominasi. Selama kurun waktu 2010-2020, menunjukkan bahwa 5 dari 10 lansia di Gorontalo merupakan KRT.
4. Persentase lansia yang bekerja di Provinsi Gorontalo cukup tinggi (5 dari 10 lansia di Gorontalo merupakan lansia yang bekerja). Sebagian besar dari lansia tersebut terserap dalam lapangan usaha pertanian. Selain itu, masih banyak lansia yang bekerja secara penuh dengan jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu.
5. Rata-rata penghasilan dari lansia yang bekerja di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 1,22 juta rupiah per bulan.
6. Lansia di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh kelompok lansia yang memiliki latar pendidikan rendah yakni 45,11 persen tidak tamat SD.

7. Sebagian besar lansia telah memiliki jaminan kesehatan (sekitar 8 dari 10 lansia telah memiliki jaminan kesehatan). Akan tetapi, baru sebagian kecil lansia yang memiliki jaminan sosial (sekitar 8 dari 10 lansia belum memiliki jaminan sosial).
8. Persentase rumah tangga lansia di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 yang masih tercatat/menjadi penerima PKH di perdesaan tiga kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan.

<https://gorontalo.bps.go.id>

## Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2019). Analisis Isu Terkini 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Heryanah, H. (2015). Ageing population dan bonus demografi kedua di Indonesia. *Populasi*, 23(2), 1-16.
- Higgins, M., & Williamson, J. G. (1997). Age Structure dynamics in Asia and dependence on foreign capital. *Population and Development Review*, 261-293.
- International Labour Office. (2011). Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. (2014). Indonesia: Labour and Social Trends Update August 2014. Jakarta: ILO.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. Jakarta: Kemenkes RI
- Miller, D. A. (1981). The 'sandwich' generation: Adult children of the aging. *Social Work*, 26(5), 419-423.
- Swasono, Sri Edi dan Hatta, Meutia Farida. 1989. Proses Menua di Barat dan Timur: Suatu Tinjauan Antropologis. Makalah diajukan pada Seminar Sehari Tentang Usia Lanjut oleh Pusat Pengembangan Psikiatri dan Kesehatan Jiwa. Jakarta 14 Januari 1989.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. (2019). Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Tomaka, Thompson, dan Palacios. (2006). The Relation of Social Isolation, Loneliness, and Social Support to Disease Outcomes Among the Elderly. *Journal of Aging and Health* Volume: 18 issue: 3, page(s): 359-384.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- United Nation. (2019). Sustainable Development Goals. <https://sustainabledevelopment.un.org>

# LAMPIRAN

<https://gorontalo.bps.go.id>



**Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Usia Anak	0-4	49.090	47.217	96.307
	5-9	47.402	45.755	93.157
	10-14	53.916	51.281	105.197
Usia Produktif (Remaja)	15-19	54.595	51.985	106.580
	20-24	54.526	52.236	106.762
	25-29	52.064	50.108	102.172
Usia Produktif	30-34	48.081	46.522	94.603
	35-39	44.701	43.520	88.221
	40-44	42.004	41.191	83.195
Usia Produktif (Pra Lansia)	45-49	37.407	36.996	74.403
	50-54	32.285	32.298	64.583
	55-59	26.236	26.653	52.889
Usia Produktif (Lansia Muda)	60-64	19.287	20.139	39.426
Lansia Muda	65-69	13.399	14.564	27.963
Lansia Madya	70-74	8.570	9.826	18.396
Lansia Madya dan Tua	75+	7.786	10.041	17.827
<b>Total</b>	<b>591.349</b>	<b>580.332</b>	<b>1.171.681</b>	

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Boalemo Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020**

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	
Usia Anak	0-4	6.372	6.185	12.557
	5-9	5.799	5.640	11.439
	10-14	6.880	6.361	13.241
Usia Produktif (Remaja)	15-19	7.249	6.804	14.053
	20-24	6.769	6.322	13.091
	25-29	6.641	6.277	12.918
Usia Produktif	30-34	5.961	5.756	11.717
	35-39	5.466	5.349	10.815
	40-44	5.392	5.325	10.717
Usia Produktif (Pra Lansia)	45-49	4.851	4.603	9.454
	50-54	4.174	3.828	8.002
	55-59	3.125	2.934	6.059
Usia Produktif (Lansia Muda)	60-64	2.252	2.285	4.537
Lansia Muda	65-69	1.555	1.643	3.198
Lansia Madya	70-74	1.085	1.097	2.182
Lansia Madya dan Tua	75+	879	1.009	1.888
<b>Total</b>		<b>74.450</b>	<b>71.418</b>	<b>145.868</b>

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Usia Anak	0-4	16.103	15.333	31.436
	5-9	15.429	14.901	30.330
	10-14	17.885	17.252	35.137
Usia Produktif (Remaja)	15-19	18.170	17.281	35.451
	20-24	18.570	18.022	36.592
	25-29	17.481	16.768	34.249
Usia Produktif	30-34	15.869	15.035	30.904
	35-39	14.905	14.557	29.462
	40-44	13.985	13.819	27.804
Usia Produktif (Pra Lansia)	45-49	12.561	12.731	25.292
	50-54	11.056	11.202	22.258
	55-59	8.924	9.332	18.256
Usia Produktif (Lansia Muda)	60-64	6.616	6.932	13.548
Lansia Muda	65-69	4.677	5.120	9.797
Lansia Madya	70-74	2.958	3.402	6.360
Lansia Madya dan Tua	75+	2.763	3.468	6.231
<b>Total</b>		<b>197.952</b>	<b>195.155</b>	<b>393.107</b>

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020**

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)		(2)	(3)	(4)
Usia Anak	0-4	6.243	6.146	12.389
	5-9	6.375	6.024	12.399
	10-14	6.886	6.517	13.403
Usia Produktif (Remaja)	15-19	6.789	6.487	13.276
	20-24	6.590	6.483	13.073
	25-29	6.586	6.279	12.865
Usia Produktif	30-34	5.917	6.040	11.957
	35-39	5.782	5.560	11.342
	40-44	5.574	5.531	11.105
Usia Produktif (Pra Lansia)	45-49	4.883	4.533	9.416
	50-54	4.100	3.784	7.884
	55-59	3.261	3.021	6.282
Usia Produktif (Lansia Muda)	60-64	2.235	2.146	4.381
Lansia Muda	65-69	1.477	1.447	2.924
Lansia Madya	70-74	946	962	1.908
Lansia Madya dan Tua	75+	888	940	1.828
Total		74.532	71.900	146.432

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020**

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)		(2)	(3)	(4)
Usia Anak	0-4	7.045	6.713	13.758
	5-9	6.719	6.498	13.217
	10-14	7.399	7.104	14.503
Usia Produktif (Remaja)	15-19	7.398	7.167	14.565
	20-24	7.340	7.083	14.423
	25-29	6.994	6.835	13.829
Usia Produktif	30-34	6.666	6.283	12.949
	35-39	6.125	5.899	12.024
	40-44	5.826	5.537	11.363
Usia Produktif (Pra Lansia)	45-49	5.121	5.063	10.184
	50-54	4.318	4.373	8.691
	55-59	3.570	3.759	7.329
Usia Produktif (Lansia Muda)	60-64	2.858	3.061	5.919
Lansia Muda	65-69	2.014	2.233	4.247
Lansia Madya	70-74	1.283	1.584	2.867
Lansia Madya dan Tua	75+	1.209	1.701	2.910
<b>Total</b>		<b>81.885</b>	<b>80.893</b>	<b>162.778</b>

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020**

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)		(2)	(3)	(4)
Usia Anak	0-4	5.026	4.794	9.820
	5-9	5.242	5.113	10.355
	10-14	6.048	5.681	11.729
Usia Produktif (Remaja)	15-19	6.209	5.934	12.143
	20-24	6.288	5.851	12.139
	25-29	5.839	5.599	11.438
Usia Produktif	30-34	5.178	4.969	10.147
	35-39	4.644	4.461	9.105
	40-44	4.336	4.104	8.440
Usia Produktif (Pra Lansia)	45-49	3.825	3.650	7.475
	50-54	3.306	3.213	6.519
	55-59	2.782	2.615	5.397
Usia Produktif (Lansia Muda)	60-64	1.988	1.876	3.864
Lansia Muda	65-69	1.335	1.331	2.666
Lansia Madya	70-74	906	955	1.861
Lansia Madya dan Tua	75+	865	994	1.859
Total		63.817	61.140	124.957

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

**Tabel 7. Jumlah Penduduk Kota Gorontalo Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Usia Anak	0-4	8.301	8.046	16.347
	5-9	7.838	7.579	15.417
	10-14	8.818	8.366	17.184
Usia Produktif (Remaja)	15-19	8.780	8.312	17.092
	20-24	8.969	8.475	17.444
	25-29	8.523	8.350	16.873
Usia Produktif	30-34	8.490	8.439	16.929
	35-39	7.779	7.694	15.473
	40-44	6.891	6.875	13.766
Usia Produktif (Pra Lansia)	45-49	6.166	6.416	12.582
	50-54	5.331	5.898	11.229
	55-59	4.574	4.992	9.566
Usia Produktif (Lansia Muda)	60-64	3.338	3.839	7.177
Lansia Muda	65-69	2.341	2.790	5.131
Lansia Madya	70-74	1.392	1.826	3.218
Lansia Madya dan Tua	75+	1.182	1.929	3.111
<b>Total</b>	<b>98.713</b>	<b>99.826</b>	<b>198.539</b>	

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 8. Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponennya Menurut Wilayah, 2020

Wilayah	Komponen IPM				IPM
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp Per Tahun)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Indonesia	12,98	8,48	71,47	11.013	71,94
Provinsi Gorontalo	13,08	7,82	68,07	10.020	68,68
Boalemo	12,44	6,82	69,07	8.789	65,91
Gorontalo	13,17	7,13	67,58	9.277	66,92
Pohuwato	12,37	7,12	64,07	10.255	65,37
Bone Bolango	13,57	8,31	68,46	10.052	69,98
Gorontalo Utara	12,45	7,03	65,87	8.921	64,86
Kota Gorontalo	14,34	10,36	72,49	12.278	77,13

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 9. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo (Persen), 2015 - 2020

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persentase Pekerja Formal	Tingkat Setengah Pengangguran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	4,65	63,65	95,35	37,14	8,23
2016	2,76	67,89	97,24	39,69	7,83
2017	4,28	64,78	95,72	39,49	8,13
2018	3,70	67,94	96,30	38,22	9,15
2019	3,76	67,38	96,24	41,34	6,16
2020	4,28	66,46	95,72	37,88	7,68

Sumber: Badan Pusat Statistik





Sensus  
Penduduk  
2020

#MencatatIndonesia

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.gorontalo.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI GORONTALO**

Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117, Gorontalo  
Telp : (0435) 834596, Fax : (0435) 834597  
Homepage : <http://www.gorontalo.bps.go.id>  
E-mail : [bps7500@bps.go.id](mailto:bps7500@bps.go.id)

